Moch. Choirul Arif, M.Fil.I,

ISLAM KEINDONESIAAN

Jejak Langkah dan Pemikiran KH. A. Wahid Hasyim

revka petra media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

ISLAM KEINDONESIAAN

Jejak Langkah dan Pemikiran KH. A. Wahid Hasyim

Moch. Choirul Arif, M.Fil.I

ISLAM KEINDONESIAAN
Jejak Langkah dan Pemikiran KH. A. Wahid Hasyim

Penulis : Moch. Choirul Arif, M.Fil.I
Layout : M. Navis
Desain Cover : Desi Wulansari

Perpustakaan Nasional; ***Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

©Moch. Choirul Arif, M.Fil.I
ISLAM KEINDONESIAAN
Jejak Langkah dan Pemikiran KH. A. Wahid Hasyim

Cet. 1- Surabaya: Revka Petra Media, 2012
vi + 108 hlm.; 14.8x21 cm.

ISBN: 978-602-9415-78-0

Diterbitkan oleh:
PT. Revka Petra Media
Jl. Pucang Anom Timur No.5 Surabaya

KATA PENGANTAR

Tidak semua ulama negarawan, dan tidak semua negarawan adalah ulama. Pernyataan ini tampaknya tidak berlaku bagi sosok KH. A. Wahid Hasyim, seorang ulama sekaligus negarwan dan juga seorang negarawan yang ulama. Mencari sosok yang begitu komplit untuk situasi dan kondisi Indonesia saat ini, terasa sangat sulit untuk menemukan. Terlebih negeri ini telah kehilangan sosok yang dapat dijadikan panutan semua orang dalam beragama dan bernegara, yang mampu memadukan kecerdasan beragama dengan kecerdasan bernegara. Karena itu sangat wajar jika KH. A. Wahid Hasyim dikenal sebagai ulama visioner yang mampu mengantarkan Indonesia ke derajat Negara yang bermartabat di mata dunia.

Tulisan ini hadir, seakan menjadi jawaban secara referensial ditengah kekosongan dan kesulitan"menemukan" sosok terpilih bangsa, yang mampu berpikir negarawan tanpa melupakan basis pengetahuan keagamaannya. Melalui tulisan ini pula, kita dapat belajar bagaimana KH. A. Wahid Hasyim berpikir dan bersikap dalam menghadapi isu-isu sentral saat itu, yang membutuhkan sikap kenegerawanan seorang ulama dalam mendukung *establishnya* Indonesia di mata dunia dengan tegak berdiri sebagai bangsa merdeka dan mandiri.

Untuk itu, tulisan ini disusun secara sistematis yang dimulai dengan pembahasan pemikiran teologis KH. A. Wahid Hasyim, yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam pandangan Islam. Pembahahan tentang point begitu disengaja, karena dalam realitasnya pemikiran keislaman (*mainstreams*) seseorang akan ditentukan oleh bagaimana cara pandang dia terhadap posisi akal dan wahyu. dan KH. A. Wahid Hasyim menjawabnya dengan cara yang sangat brilian, tanpa pernah menisbihkan satu sama lain. Dari

sinilah kita dapat mengidentifikasi bagaimana esensi teologi KH. A. Wahid Hasyim dikontruksi. Sebuah kontruksi teologis yang mengarah pada pola moderasi dalam berislam yang berkonsekuensi pada kemampuan "menyesuaikan" diri dengan kondisi lingkungan. Meski sebagian orang mencibir teologi yang bergaya "jalan tengah" ini sebagai pola ambigu, namun realitas menunjukkan bahwa dengan moderasi atau jalan tengah inilah KH. A. Wahid Hasyim benar-benar menjadi "jalan tengah" yang sangat menentukan keberlangsungan Negara Indonesia di tengah kebuntuan.

Selanjutnya tulisan ini juga menyajikan bagaimana implementasi teologi moderat KH. A. Wahid Hasyim dalam menyikapi kenyataan hidup, yang terlihat dari pemikirannya yang menyikapi tentang arti penting dari sebuah persaudaraan antar manusia secara hakiki. Dengan dasar pijak teologi keislaman yang meoderat. KH. A. Wahid Hasyim mampu melihat lebih jauh tentang persaudaraan antar manusia tersebut tanpa terjebak kepada sektarianisme/doktrin-doktrin keislaman yang sempit. Justru dengan memahami Islam secara hakiki, menurut KH. A. Wahid Hasyim, seseorang akan dengan sangat mudah bersikap terbuka kepada siapapun, meski secara teologi berbeda. Karena Islam sangat memegang tali persaudaraan antar manusia.

Dalam kasus Indonesia, sikap moderat KH. A. Wahid Hasyim mampu menyelesaikan persoalan yang sangat pelik, disaat setiap individu mencoba saling mempertahankan argumentasinya serta keinginan "memaksakan" keinginannya. Namun, dengan jiwa yang sangat lapang yang didasari dengan kemoderasian dalam berislam, KH. A. Wahid Hasyim mampu meredakan tensi pihak-pihak yang bertikai secara ideologis tentang masa depan Indonesia. Dengan tetap focus pada masalah yang lebih besar, demi bangsa dan Negara Indonesia KH. A. wahid Hasyim dengan sangat ikhlas menerima dan mendorong berbagai pihak untuk menerima Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu-satunya model Negara yang sangat realistis.

Akhirnya, dengan hadirnya buku referensi ini semoga dapat menjadi inspirasi dan pencerah bagi siapapun yang ingin tetap tercerahkan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga.

DAFTAR ISI

BAGIAN -1-

PENDAHULUAN

Awal abad kedua puluh merupakan abad kebangkitan bagi dunia timur. Di awali dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905[1], gerakan Turki Muda dan terciptanya Republik Tiongkok pada tahun 1911 yang dimotori oleh Dr. Sun Yat Sen[2]. Dengan kejadian tersebut seakan memberikan inspirasi bagi negeri-negeri lain yang mengalami keterpurukan, untuk melakukan hal yang sama, yakni bangkit dan berjuang mengangkat nasib bangsa mereka.

Sementara itu, di dunia Islam gaung akan kebangkitan kembali telah lama menggema dan terserap di "benak" umat Islam, hal itu ditandai dengan munculnya berbagai pembaharuan pemikiran dalam Islam. Sebuah pembaharuan yang pada dasarnya merupakan wujud kongkrit dari sebuah kesadaran akan nasib yang menimpa umat Islam (dunia Islam)[3]. Tercatat nama-nama

---

[1] Benhard Dahm, *History of Indonesia in The Twentieth Century*, trans. PS Falla (Praeger Publisher, 1971), 20

[2] M. Masyhur Amin, *Dinamika Islam ; Sejarah Transformasi dan Kebangkitan* (Yogyakarta : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1995), 117

[3] Kebangkitan dunia Islam terjadi dan dipicu oleh kesadaran umat Islam akan kenyataan objektif umat,yaitu; *Pertama*, timbulnya kesadaran para ulama bahwa banyak ajaran-ajaran "asing" masuk dan diterima sebagai ajaran Islam, sehingga bid'ah, khurafat dan takhayul telah membuat umat menjadi jauh dari Islam sebenarnya. *Kedua*, dominasi Barat terhadap dunia Islam pada segala bidang, dominasi inilah yang kemudian menjadi pemicu akan pentingnya mengejar ketertinggalan itu. *Ketiga*, mundurnya tiga kerajaan besar Islam , yaitu Safawi, Mughal dan Turki Uthmani. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : Rajwali Press, 1998), 173-174. Pada kasus Indonesia, kesadaran baru yang muncul dan diupayakan kalangan pemimpin bangsa Indonesia adalah di samping sebagai respon kongkrit terhadap kolinalisme, juga merupakn

pembaharu Islam, misalnya Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897), Muhammaad 'Abduh (1849-1905), Muhammad Rashid Rida, 'Ali Abd al-Raziq, dan lainnya.

Munculnya gerakan pembaharuan di Timur Tengah tersebut ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar bagi gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Bermula dari pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan masyarakat Arab di Indonesia. Gema kebangkitan Islam tersebut semakin "nyaring" seiring dengan munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan, misalnya Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor (1909) dan di Solo (1911), Persyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat (1911), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (Persis) di Bandung (sekitar tahun 1920-an), Nahdlatul Ulama di Surabaya (1926), Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukittinggi (1930)[4].

Tumbuh dan berkembangnya organisasi yang berbasis keagamaan saat itu, lebih dikarenakan kesadaran baru di kalangan umat Islam. Sebuah kesadaran yang pada esensinya sama dengan kesadaran yang dimiliki oleh umat Islam di wilayah lain, yakni menumbuhkan spirit baru bagi umat dalam menentang kolonialisme asing, dengan cara memberikan pencerahan pemikiran keislaman dan berhimpun dalam sebuah wadah pergerakan.

Pencerahan pemikiran keislaman yang dilakukan lewat organisasi keagamaan tersebut tak dapat dilepaskan dari "motor" penggerak utamanya, yakni para pemimpin atau tokoh yang *nota bene* berasal dari kalangan santri[5]. Keberadaan mereka dalam

---

jawaban atas tiga persoalan mndasar dari umat Islam Indonesia, yaitu berkembangnya budaya local non muslim, konsenitas akidah dan amaliah Islam, dan akamodasi pemikiran dan teknologio modern. Lihat kata pengantar edisi Indonesia, Howard M Fedespiel, *Persatuan Islam ; Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), v

[4] Lebih lanjut lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* , cetakan kedelapan (Jakarta : LP3ES, 1996)

[5] Istilah santri dalam kontek budaya Islam Indonesia (Jawa) telah lama dikenal, keberadaannya selalu terkait erat dengan pesantren di mana elemen primernya

kancah pembaharuan pemikiran sekaligus juga perjuangan bangsa Indonesia diakui atau tidak telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi keberlangsungan bangsa ini, yaitu dengan menumbuhkembangkan "api kebangsaan" atau spirit kebangsaan yang begitu besar dalam benak setiap orang (umat Islam). Kebutuhan spirit itu terasa menjadi sebuah "keharusan" dalam menjaga kontinyuitas perjuangan. Untuk itu, penguatan spirit yang didukung oleh "dalil religius" yang dihasilkan dari pembaharuan pemikiran keislaman oleh para pemimpin itu, menjadi lebih hidup dan bermakna.

Memang, sosok pemimpin atau tokoh keberadaannya sangat "mewarnai" dalam setiap perubahan, termasuk di lembaga yang menjadi basis gerakannya. Dalam konteks Islam keindonesiaan (baca; perjuangan), peran itu begitu dominan sekali, terutama tokoh yang berasal dari kalangan muslim di mana mereka inipun pada suatu saat "terpecah" menjadi dua kelompok besar, yaitu modernis dan tradisionalis. Menyikapi keberadaan dua kelompok besar itu, Dahm pernah menyatakan bahwa dengan adanya dua kelompok muslim itu dalam kontek gerakan nasional Indonesia, telah terjadi dua penyikapan yang berbeda dalam melihat, memandang serta menyikapi keberadaan Islam di Indonesia, yaitu *pertama*, mereka yang menolak ajaran empat madzhab sunni dan berusaha meningkatkan peran Islam atau dengan perkataan lain mereka berusaha meremajakan Islam agar dapat menyerap kemajuan Barat dalam sains dan pengajaran serta meningkatkan kesadaran beragama pemeluknya *Kedua*, mereka yang memiliki pemikiran Islam dengan tetap berpegang pada ajaran empat

---

adalah Kyai dan Santri. Istilah santri menjadi lebih popular, ketika Clifford Geertz, salah seorang antropolog berkebangsaan Amerika melakukan penelitian tentang tradisi/budaya Jawa, tepatnya di daerah Mojokuto, Jawa Timur. Dalam penelitiannya tersebut Geertz memberika kategorisasi terhadap masyarakat Jawa, yaitu Santri, Abangan dan Priyayi. Lebih lanjut lihat Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakatr Jawa,* ter. Aswab Mahasin (Jakarta :Pustaka Jaya, 1981)

Madzhab[6]. Kondisi itulah yang kemudian telah menarik banyak peneliti untuk melakukan kajian (penelitian), sebut saja Noer[7], Benda[8], Federspiel[9], Anam[10], Haidar[11], Marijan[12], Dhofier[13], Bruinnessen[14], Zuhri[15], dan lainnya.

Sementara itu, gambaran sosok kedua kelompok tersebut dapat terlihat dari beberapa tokoh nasional Indonesia yang berkiprah saat itu, misalnya KH. Abdul Wahid Hasyim yang boleh dikategorikan sebagai kelompok kedua (tradisionalis), sedangkan HOS Cokroaminoto salah seorang pimpinan Sarekat Islam, Ahmad Hasan pendiri Persatuan Islam (Persis) termasuk kelompok pertama. Dalam waktu yang bersamaan muncul pula para pemimpin nasionalis sekular, misalnya Soekarno, Muh. Yamin, Mohammad Hatta, Mr. Supomo. Kelompok nasionalis sekular inilah yang memiliki pandangan bahwa kebangsaan (nasionalisme) harus dijadikan spirit dasar dalam membentuk dan membangun negara Republik Indonesia.

Dalam periode itulah KH. Abdul Wahid Hasyim muncul ke permukaan sebagai sosok pemimpin muslim yang memiliki

---

[6] Lebih jauh lihat Dahm, *History of Indonesia ...*,

[7] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* cetakan kedelapan (Jakarta : LP3ES, 1996)

[8] Harry J Benda, *The Crescent and The Rising Sun ; Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945* (The Hague and Bandung : W Van Hoeve, 1958)

[9] Howard M Federspiel, *Persatuan Islam ; Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX* (Yogyakarta : Gadja Mada University Press, 1996)

[10] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Sala : Jatayu , 1985)

[11] M. Ali Haidar, *Nahdaltul Ulama dan Islam Indonesia ; Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994)

[12] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU ; Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1992)

[13] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren ; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES, 1982)

[14] Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Ralasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru,* ter Farid Wafdi (Yogyakarta : LKIS, 1994)

[15] Achmad Muhibbin Zuhri, *Perkembangan Pemahaman tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam* NU (Tesis IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999)

tanggung jawab moral atas nasib bangsanya, di mana kemunculannya berseiringan dengan munculnya semangat kesadaran untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah lewat cara damai dan teroganisir, sebagai ganti dari perlawanan bersenjata. Meski dikenal sebagai pemimpin dari kalangan tradisionalis, KH. Abdul Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU), seorang pemimpin organisasi keagamaan "tradisionalis" Nahdlatul Ulama, pencetus Piagam Jakarta, dan Menteri Agama yang cukup disegani di tahun 1949-1951[16], namun teramat sulit untuk mengidentikkan KH. Abdul Wahid Hasyim dengan kelompok tradisional yang kolot, konservatif bahkan anti perubahan, justru sebaliknya KH. Abdul Wahid Hasyim dikenal sebagai sosok yang memiliki keterbukaan pandangan dan wawasan, responsif dan adaptif terhadap setiap perubahan. Karena pengecualian itulah Abdurrahman Wahid dalam sebuah tulisannya menyatakan betapa KH. Abdul Wahid Hasyim mengeluh dan menyatakan kekesalannya kepada mantan Menteri Agama Munawir Sadzali tentang sikap kiai-kiai NU yang dianggap begitu konservatif. Sikap itu menurut Abdurrahman Wahid, dianggap sebagai wujud betapa responsifnya KH. Abdul Wahid Hasyim terhadap realitas yang terjadi, di mana hal itu diungkapkan ketika KH. Abdul Wahid Hasyim mengikuti kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang dipimpin oleh pemuda Anwar Harjono di Yogyakarta[17].

Sementara itu dalam konteks perjuangan kebangsaan Indonesia keberadaan dan peran yang dimainkan KH. Abdul Wahid Hasyim begitu signifikan dalam membangun dan membangkitkan semangat kebangsaan dan pemahaman yang utuh tentang keagamaan (Islam) pada masyarakat Indonesia (umat Islam), sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti akan makna Islam sesungguhnya, dan bagaimana Islam bersikap terhadap

---

[16] Lihat *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta : Djambatan), 978-980

[17] Abdurrahman Wahid, " A. Wahid Hasyim, NU dan Islam dalam *Membangun Demokrasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 3-11

kolonialisme. Penyikapan inilah yang kemudian melahirkan sikap nasionalisme yang dilandasi nilai-nilai keislaman yang berguna bagi perjuangan dalam merebut kemerdekaan dan kemandirian bangsa.Dengan peran seperti itu, menunjukkan betapa utuh dan luasnya wawasan keislaman dan kebangsaan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam menyikapi persoalan yang berkembang saat itu.

Keluasan wawasan keislaman dan kebesaran semangat kebangsaan yang dimiliki KH. Abdul Wahid Hasyim semakin menebal dan mendalam setelah ia menunaikan ibadah haji dan menyelesaikan studi dari Makkah. Hal itu terlihat dari langsung "larutnya" ia dalam aktivitas keorganisasian baik yang bersifat keagamaan maupun kebangsaan, di samping mengembangkan pesantren Tebuireng milik ayahnya. Kerajinan dan kegemarannya membaca berbagai literatur telah menjadikan dirinya rajin menulis untuk menyampaikan gagasan-gagasan ke berbagai media saat itu. Rasionalitas dan humanitas ajaran agama Islam seringkali menjadi tema sentral gagasan-gagasan keagamaannya. Oleh karena itu, sosok KH. Abdul Wahid Hasyim dengan gagasan cemerlangnya, adalah sosok yang "unik" dan dapat diterima semua kalangan. Karena itu pula, Benda pernah menyebut KH.Abdul Wahid Hasyim sebagai *"Wakil Islam Indonesia yang paling berpengaruh pada masa pendudukan Jepang*[18]*".*

Sementara itu, karir politiknya yang merupakan implementasi kongkrit dari pemikiran-pemikirannya, dimulai ketika ia aktif dalam Konggres Rakyat Indonesia pada tahun 1941. Konggres Rakyat Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh tokoh-tokoh Indonesia yang bertujuan menuntut Indonesia berparlemen[19]. Setelah itu dia aktif sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tahun 1945, di mana ia bersama tokoh Islam modernis dan nasionalis berhasil mendeklarasikan Piagam Jakarta, sebuah piagam yang menjadi cikal bakal lahirnya pancasila (dengan berbagai pertimbangan, tujuh kata akhirnya dihilangkan).

---

[18] Benda, *The Crescent and the Rising Sun* ...,189

[19] Ibid, 98

Satu hal lagi yang tak dapat dilupakan adalah bahwa KH. Abdul Wahid Hasyim adalah salah seorang yang berjuang dan mencoba menjadikan Hukum Islam "masuk" menjadi bagian dari konstitusi hukum Indonesia[20]. Dengan demikian , apa yang dilakukan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjawab berbagai "tudingan " yang menyatakan bahwa kelompok tradisionalis tidak memiliki peran yang berarti bagi keberlangsungan negeri ini.

Dengan gambaran latar permasalahan tersebut, peneliti kemudian tertarik dan memutuskan sebagai objek kajian tesis ini . Kajian terhadap sosok KH. Abdul Wahid Hasyim telah dilakukan oleh peneliti lain. Atjeh[21], Sutjiatingsih[22], Dhofier[23], Harijanti[24] dan Zaini[25], namun menurut peneliti kajian yang dilakukan tersebut lebih banyak menyentuh profil dan aktivitas KH. Abdul Wahid Hasyim, sementara untuk kajian yang secara spesifik meneliti ataupun menyentuh dan menganalisis pemikiran-pemikiran keislaman dan kebangsaan KH. Abdul Wahid Hasyim belum begitu muncul. Dengan demikian, kajian yang akan dilakukan peneliti tampak "khas", tentunya dengan memberikan analisis tentang faktor-faktor tumbuhnya pemikiran-pemikiran dimaksud.

Dengan fenomena tersebut, maka ada dua hal ingin dikupas dalam buku ini, yaitu bagaimana pemikiran keislaman dan kebangsaan KH. Abdul Wahid Hasyim yang begitu moderat dan welcome dengan isu-isu kebangsaan saat itu. Pemikiran keislaman KH. A. Wahid Hasyim dalam pembahasan buku ini lebih

---

[20] Ahmad Zaini, *Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim ; His Contribution to Muslim Educational Reform and Indonesian Nationalism during the Twentieth Century* (Yogyakarta : Titian Ilahi press, 1998),6

[21] Aboebakar Atjeh, *KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar (Jakarta : Panitia Peringatan alm KH. A. Wahid Hasyim, 1957*

[22] Sutjiatingsih, *KH. A. Wahid Hasyim* (Jakarta : Depdikbud, 1984)

[23] Zamarkhsyari Dhofier, *KH.A.Wahid Hasyim ; Rantai Penghubung Peradapan Pesantren dengan Peradapan Indonesia Modern* (Jakarta : Prisma no 8 tahun 1984)

[24] Harijanti, *KH.Abdul Wahid Hasyim ; Peranannya dalam Pengembangan Jam'iyyah NU* (Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995)

[25] Zaini, *Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim ; His Contribution ...*

ditekankan pada persoalan tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam, Islam dan Persaudaraan Manusia serta Penerangan Islam. Penekanan ini memberikan gambaran bagaimana sisi teologi memberikan warna pada keberislaman KH, A. Wahid Hasyim. Sementara itu pemikiran kebangsaannya lebih ditekan kepada isu-isu actual di saat bangsa dan Negara Indonesia ingin mendapatkan jawaban dan dukungan moral dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pesantren. Karena itu pembahasannya mengarah pada isu nasioalisme, serta Islam, pancasila dan Negara.

Penekanan pembahasan pada dua aspek pemikiran KH. A. Wahid Hasyim tersebut memberikan manfaat kepada pelacakan secara komprehensif terhadap teologi yang dianut yang berimplikasi pola keberagamaan dan pola berbangsa bernegara KH. A. Wahid Hasyim. Dari sisi teologi pembahasan ini akan memberikan gambaran tentang relasi antara Akal dan Agama (Wahyu), Islam dan Persaudaraan Manusia serta Penerangan Islam. Dari aspek pemikiran kebangsaan akan diperoleh gambaran tentan sikap dan tindakan KH. A. Wahid Hasyim terhadap isu nasionalisme, Islam, pancasila dan negara.

Untuk membedah kedua kedua aspek pemikiran KH. A. Wahid Hasyim tersebut, maka tulisan ini menggunakan kajian literer (*Library Research).* Penetapan jenis kajian ini didasari pemikiran, *pertama*, penggunaan landasan berfikir rasionalistik, yaitu cara berfikir yang menggunakan kemampuan berargumen secara logis yang dibangun berdasarkan sekumpulan data beserta pemaknaannya. *Kedua*, Karena objek sasaran penelitian "bersifat dan bernuansa masa lampau", maka data yang akan digali tentunya lebih banyak lewat manuskrip atau dokumen-dokumen, di samping penelitian jenis ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku, periodikal, naskah-naskah, catatan sejarah dan dokumen[26].

[26] Sjamsudduha, "Penelitian Kepustakaan". Makalah Penataan dan Pelatihan Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Kopertais Wilayah IV, tanggal 9-14 Desember 1991

Sementara itu, untuk mempermudah penggalian hingga pengungkapan "makna" sesungguhnya dari data dimaksud, peneliti memutuskan penggunaan metode historis untuk mencapainya. Metode historis adalah seperangkat prinsip-prinsip yang sistematis dan aturan-aturan yang dirancang secara efektif dalam rangka membatu mendapatkan sumber-sumber material sejarah, menilainya secara kritis dan mempresentasikan hasil sintesis yang telah dicapai.[27]

Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode historis adalah sebagai berikut.[28]

a. **Heuristik**

Sebagai langkah awal dalam penulisan sejarah, heuristik digunakan untuk mencari jejak atau sumber informasi sejarah. Sumber sejarah tersebut terpilah menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam konteks penelitian ini sumber primer dimaksud adalah tulisan karya KH. A. Wahid Hasyim yang tertuang dalam majalah Soeara Moeslimin Indonesia serta dalam Sedjarah Hidup KH.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar yang disunting oleh Aboebakar Atjeh. Sedang sumber sekunder penelitian ini berasal dari hasil penelitian, tulisan atau manuskrip lain yang dianggap relevan dan yang mendukung pokok bahasan penelitian.

---

[27] Gilbert J Garraghan SJ, *A Guide to Historical Method* (Chicago : University Press Book, 1948), 33

[28] Ibid, 103-396. Bandingkan dengan Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Press,1988). Dalam bahasa Erns Berheim, empat kegiatan itu adalah *Heuristik, Kritik, Auffasung dan Darstellung*, Lihat Sherman Kent, *Writing History* (New York : Appleton Century Crofts,1967),6. Sedangkan Surakhmad menyatakan empat kegiatan itu sebagai, (1) Pengumpulan data, (2) Penilaian data, (3), Penafsiran data (sedikitnya : penyusunan data) dan (4), Penyimpulan. Lebih lengkap lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar metode teknik* (Bandung: Tarsito, 1980), 132-138

b. Kritik

Setelah sumber dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap berikutnya peneliti melakukan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini peneliti menguji keabsahan tentang otentisitas karya KH. Abdul Wahid Hasyim melalui kritik ekstern dan kritik intern, dengan mengajukan enam pertanyaan[29], yaitu ; *pertama*, kapan sumber itu dibuat. Pertanyaan ini mengharuskan peneliti menemukan tanggal pembuatan karya KH. Abdul Wahid Hasyim yang kemudian menghubungkannya dengan materi sumber guna mengetahui apakah sumber tersebut tidak menyalahi zaman (anakronistik). *Kedua*, Di mana sumber dibuat, pertanyaan ini juga mengharuskan peneliti mengetahui asal usul dan lokasi pembuatan sumber yang dapat menciptakan keasliannya. *Ketiga*, mempertanyakan siapa yang membuat, artinya peneliti harus melakukan penyelidikan atas kepengarangan atau setelah diketahui pengarangnya peneliti berusaha mengidentifikasi terhadap pengarang mengenai sikap, watak, pendidikan dan seterusnya dalam rangka mencari gambaran background sebuah pemikiran yang tertuang dalam karyanya. *Keempat*, mempertanyakan dari bahan apa sumber dibuat. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap bahan atau materi yang berlaku pada zaman tertentu yang dapat menunjukkan otentisitas. *Kelima*, mempertanyakan apakah sumber itu dalam bentuk asli, dalam hal ini peneliti perlu menguji integritas sumber. Kecacatan sumber dimungkin terjadi pada bagian sumber atau keseluruhannya yang disebabkan oleh usaha sengaja atau tidak, karena itu pula perlu dilakukan kritik teks. *Keenam*, mempertanyakan kredibilitas atau nilai bukti apakah yang ada dalam sumber.

---

[29] Gilbert J Garraghan SJ, *A Guide to Historical Method* ..., 168

c. **Sintesis dan Eksposisi**

Setelah melakukan heuristik dan kritik, maka tahap selanjutnya peneliti melakukan tahap sintesis dan eksposisi . Dalam tahap sintesis peneliti peneliti melakukan upaya interpretasi sumber (primer maupun sekunder), yaitu dengan menetapkan makna-makna yang saling berhubunngan dari fakta-fakta yang ada , dengan harapan akan lebih dapat mengungkap lebih mendalam tentang mengapa pemikiran itu terjadi, apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Tentunya interpretasi yang dilakukan juga mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi pemikiran tersebut, seperti faktor perkembangan sosial, budaya, politik atau dengan kata lain ,kompleksitas analisis (interpretasi) sangat diperhatikan dalam tahap ini.

Kemudian dilanjutkan dengan tahap eksposisi atau pemaparan hasil interpretasi dalam bentuk tulisan (laporan) secara kronologis dan analisis.

Data yang diperoleh melalui metode historis akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan Hermeneutik. Deduksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam konteks ini akan dianalisis kerangka pemikiran KH. Abdul Wahid Hasyim tentang persoalan keislaman dan kebangsaannya, kemudian mendeduksikannya sehingga menjadi kesimpulan yang umum.

Sedangkan penggunaan hermeneutik sebagai analisis penelitian ini lebih didasari pemikiran, bahwa untuk memahami makna yang terkandung dalam data penelitian perlu sebuah upaya penafsiran pesan-pesan sejarah (baik berupa dokumen maupun fenomena), dan "alat" yang dapat digunakan untuk maksud tersebut adalah melalui metode hermeneutik. Dengan kata lain secara metodologis melalui hermeneutik peneliti berupaya mengubah ketidaktahuan peneliti akan pesan tekstual dan

fenomena-fenomena sosiologis maupun historis yang melingkupi pemikiran objek penelitian.[30]

Dari berbagai pandangan hermeneutik yang ada, penulis "lebih memilih" hermeneutk Gadamer. Pemilihan model ini lebih didasari oleh beberapa pemikiran; *Pertama*, bahwa corak perhatian hermeneutik Gadamer lebih memberi perhatian harmonis dinamis terhadap studi filsafat dan sejarah dalam kerangka studi tekstual. *Kedua*, diasumsikan bahwa penulis teks dalam hal ini K.H. Abdul Wahid Hasyim bermaksud menyampaikan gagasannya secara lintas waktu di depannya, sedangkan fakta, fenomena dan informasi sebelum teks ditulis merupakan pertimbangan-pertimbangan material untuk menyusun teks tersebut. Dengan demikian fakta, fenomena yang telah dibentuk ke dalam teks merupakan data yang hidup dan dinamis untuk diinterpretasi dalam waktu yang berbeda. *Ketiga* hermeneutik Gadamer menurut penulis juga menekankan relasi antar interpreter dengan konteks tradisi, sehingga teks itu menjadi hidup dan dinamis[31].

---

[30] Jon Avery dan Hasan Askari, *Menuju Humanisme Spiritual ; Kontribusi Perspektif Muslim Humanis.* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 164

[31] Untuk lebih lengkap dan akuratnya terhadap hermeneutikanya Gadamer, lihat Joseph Bleicher, *Contemporary Hermeneutik as Method ; Philosophy and Critic* (London Boston and Henley Routledge and Kegan Paul, 1980)

BAGIAN -2-

SETTING SOSIAL POLITIK KEAGAMAAN MASYARAKAT INDONESIA ; SEBUAH PETA SITUASI

A. Peta Situasi Sosial Keagamaan

Jauh sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, yakni sekitar abad ke-7 dan ke-9, masyarakat Nusantara dikenal sebagai masyarakat dagang dengan ciri kosmopolitan[31]. Ke-kosmopolitan itu, dapat dilihat beberapa segi. *Pertama*, tingkat hubungan yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara yang begitu luas terbuka yang tidak hanya dilakukan secara terbatas di wilayah Nusantara, melainkan juga di luar wilayah Nusantara. Intensifitas dan intensitas hubungan yang dilakukan masyarakat Nusantara kala itu dimungkinkan, mengingat posisi Nusantara yang begitu strategis bagi perdagangan dunia, di mana secara geografis negeri ini juga berada tepat di perjumpaan Samudera Hindia dan Wilayah Tropis Pasifik dengan sekian banyak pulau-pulau yang tersebar. Dengan posisi ini jelas akses masyarakat terhadap terhadap dunia luar begitu mudah *Kedua,* dapat dilihat dari pola keberagamaan yang dianut masyarakat Nusantara yang yang dikatakan cukup beragam begitu beragam[32] Keberagamaan agama yang dianut oleh masyarakat

---

[31] Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam ; Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung : Mizan, 1990), 17-19

[32] Dalam konteks geografis kewilayahan, Alwi Shihab melihat bahwa kewilayahan Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan "jenis" masyarakat Indonesia, yaitu ; pertama, masyarakat pesisir yang orientasi perdagangannya serta komitmen keislamannya sangat kuat. Jalur perdagangan laut memang memungkinkan mereka yang tinggal di wilayah-wilayah ini memperoleh akses lebioh mudah pada dunia luar dan

teramat dimungkinkan, tingkat hubungan yang dilakukan masyarakat Nusantara dengan masyarakat luar (pedagang, red) begitu intensif, sehingga tak heran jika masyarakat Nusantara mengenal bahkan mengikuti pola keagamaan lain (Hindu, Budha dan Islam) selain yang mereka miliki selama ini (Animisme dan Dinamisme)[33].

Beranjak dari kondisi itulah Islam memasuki wilayah kepulauan Indonesia, sekitar abad ke-7[34] dan abad ke-13. Di awali dengan aktivitas perdagangan yang kemudian merambah ke wilayah penyebaran agama, Islam mulai dikenal dan diperkenalkan oleh para pedagang yang sekaligus juga sebagai penyebar agama.[35]

---

kebudayaan asing. Kedua, masyarakat yang menghuni wilayah pegunungan yang terpencil, adalah kelompok kesukuan yang berorientasi animistic. Ketiga, yang pada umumnya sangat dipengaruhi kebudayaan Hindu, sangat erat menjalin hubungan dengan kelompok elit istana, dan berdiam di wilayah-wilayah yang dapat dijangkau. Lebih lengkapnya lihat Alwi Shihab, *Membendung Arus ; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Kristen di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1998)

[33] Animisme merupakan kepercayaan masyarakat yang mempercayai bahwa benda-benda mati memiliki ruh, dan pohon-pohon serta makhluk hidup lainnya hidup, lebih dari itu juga mereka menyembah ruh nenek moyang mereka.

[34] Penulisan abad ke-7 didasarkan pada pemikiran bahwa pada abad tersebut telah datangnya para pedagang dan pelancong Arab yang disinyalir telah beragama Islam . Sehingga dimungkinkan jika telah terjadi persentuhan agama baik secara langsung maupun tidak

[35] Tentang pola penyebaran Islam, terjadi banyak perbedaan pendapat dan Aziz, Suhaelan dan Wafa, mencatat sedikitnya ada 3 pendapat dalam penyebaran agama Islam, yaitu ; (a), mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari tanah asalnya, yaitu tanah arab dan dibawa oleh pedagang arab dari semenjak awal. Pendapat demikian dianut oleh Hamka dan Snouck Hurgronje, (b) bahwa Islam masuk ke Indonesia secara tidak langsung dari tanah Arab, yaitu India dan Persia, (c) bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia melalui daerah lain, bukan dari tanag arab ke Persia atau India ke Indonesia melainkan dari tanah Arablewat Persia menuju daerah Cina da baru kemudian ke berbagai wilayah Indonesia. Lebih lanjut lihat M Imam Aziz, Suhaelan dan Wafa, *Agama dan Perubahan Sosial ; Studi tentang Hubungan Antar Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia* (Yogyakarta L LKPM, 2001). Sementara itu MC Ricklefs, mengajukan dua

Dalam catatan sejarah, masuknya Islam di Indonesia yang kala itu telah mendapat pengaruh cukup kuat dari agama Hindu dan Budha ditambah dengan kepercayaan lokal masyarakat[36], dikatakan sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Keluarbiasaan itu dapat dilihat dari hal, yaitu keberadaan Islam sendiri secara geografis keberasalannya memang cukup jauh, yakni dari wilayah jazirah Arab. Logika yang dapat dimunculkan dari hal pertama ini adalah perlunya waktu dan biaya yang begitu besar yang harus dikeluarkan penyebar agama untuk "mengusung" agama Islam ke negeri ini, namun kenyataannya ajaran Islam itu sampai juga ke wilayah Nusantara, Kedua, keteguhan dan kegigihan penyebar agama Islam (da'i) yang meskipun belum diorganisir secara matang dan digaji, mereka tetap melakukan kewajibannya menyebarkan agama Islam. Kondisi yang demikian itu teramat berbeda sekali ketika dibandingkan agama non Islam, yaitu kriten yang memiliki organisasi penyebaran agama yang telah tertata cukup rapi bila dibandingkan dengan Islam. Karena itu pula banyak kalangan memaklumi, jika secara kuantitatif Islam dapat tersebar cepat dan diterima oleh masyarakat, namun secara kualitatif belum begitu baik keberislamannya[37]

---

kemungkinan mengenai proses awal masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang Asia, Arab, India, Cina dan lain-lain---yang telah memeluk agama Islam bertempoat tingga secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran, dan mengikuti gaya hidup loka sampai sedemikian rupa,sehingga sebenarnya ,mereka itu sudah menjadi orang Jawa atau melayu, atau anggota suku lainnya. Kedua proses ini menurutnya mungkin telah sering terjadi bersamaan, dan apabila sedikit petunjuk yang masih dapat diperoleh menunjukkan, misalnya bahwa suatu bangsa yang beragama Islam telah berdiri kokoh di satu wilayah, maka seringkali mustahil untuk mengetahui mana yang lebih penting diantara kedua proses itu. MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern terj*, Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991), 3.

[36] Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit ; Islam Indonesia dan Masa Pendudukan Jepang.* Ter. Daniel Dhakidae (Pustaka Jaya, tt), 28

[37] Menurut Thomas W Arnold, dalam hal penyebaran Agama, tidak dikenal atau tidak ada kelas kependetaan atau seseuatu organisasi eklesiastik, dan apapun bentuk dan jenis tenaga yang mendorong dakwah Islam adalah itu sangat

Sementara itu, wilayah pertama yang dijadikan sasaran penyebaran Islam, sebagian kalangan menyatakan bahwa awalnya hanya terbatas di wilayah dekat dengan daerah semenanjung Malaka, termasuk wilayah Sumatera Utara, yang untuk perkembangan selanjutnya wilayah ini telah terbangun sebuah kerajaan Islam pertama, yakni Samudera Pasai. Lambat tapi pasti, perjalanan penyebaran agama Islam mulai berkembang di wilayah lain, dan perkembangan itu seringkali "menyentuh" wilayah pesisir atau kota-kota sekitar pantai. Penyentuhan terhadap kota pesisir di wilayah pantai dapat dipahami, karena kota-kota dimaksud merupakan pusat-pusat kegiatan komersial para pedagang, yang memungkinkan pula masing-masing pelaku melakukan "interaksi keagamaan"[38]. Dengan kata lain kota-kota di sepanjang Pantai itulah yang kali pertama mendapatkan pengaruh Islam melalui jalur perdagangan. Banyak penduduk yang awalnya berkepercayaan animisme dan dinamisme atau beragama Hindu dan Budha menjadi tertarik dan akhirnya menjadi seorang Muslim setelah "bersentuhan" dengan para pedagang muslim, apakah karena ketertarikan akan prilaku tampilan, kesadaran diri atau bahkan karena perkawinan. Kesemua hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konversi agama di kalangan masyarakat pribumi di Nusantara.

Fachri Ali dan Bahtiar Effendi, memberikan catatan menarik terhadap hasil interaksi tersebut, yang berupa penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam, dengan menyebutkan tiga alasan,

---

berbeda dengan missi Kristen, Islam tidak memiliki lembaga-lembaga misi, tidak pula petugas-petugas khusus yang terlatih serta sangat sedikit kelanjutan usahanya. Satu-satunya pengecualian ialah adanya perkumpulan-perkumpulan tarikat (*religious order*) yang bentuk organisasinya mirip seperti perkumpulan monastic Kristen. Tetapi di situpun tidak terdapat lembaga kependetaan atau sesuatu teori pemisah antara guru-guru agama dari umatnya, atau dibentuknya suatu kelompok tertentu sebagai fungsi penguasa agama. Namun baru abad ke-20 lembaga-lembaga yang sejenis dengan miliki Kristen muncul. Lebih jauh lihat Thomas W Arnold, *The Preching of Islam* ter. Nawaawu Rambe (Wijaya Putra, tt)

[38] Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*..., 28

yaitu[39] *Pertama*, ajaran Islam dalam hal keteologian, lebih mengedepankan prinsip ketauhidan atau keesaan Tuhan. Dengan prinsip tersebut umat Islam selalu dan pasti berkeyakinan bahwa Tuhan adalah Esa adanya, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan kata lain umat Islam berkeyakinan hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang satu itu yang memiliki kekuasaan mutlak, tidak ada kekuatan dan kekuasaan lain yang melebih kekuatan dan kekuasasan-Nya. Pada gilirannya prinsip ajaran ini memberikan pegangan kuat bagi para pemeluknya untuk membebaskan diri dari ikatan kekuatan apapun selain kekuatan Tuhan.

Sebagai konsekuensi berikutnya dari ajaran itu, Islam dalam kehidupan empiriknya selalu mengajarkan, menganjurkan dan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan (*justice*) dan kesamaan (*egalitarian*) dalam tata kehidupan masyarakat. Ketika prinsip-prinsip ini bersentuhan dengan tata kehidupan masyarakat Nusantara, itu dianggap sebagai sesuatu yang baru, menarik bahkan kontroversi di tengah prinsip dan ajaran kastaisme yang berlaku. Dengan keadaan itu jelas, muncul beberapa penyikapan dari kalangan masyarakat. Bagi yang merasa telah *"establish"* dengan ajaran kasta, ia akan bersikap kontra, dan merasa terusik dengan kehadiran Islam. Bagi masyarakat yang menginginkan egalitarian dan penghapusan kasta, Islam dianggap sebagai alternatif tawaran. Dengan memilih Islam, mereka yang "setuju dan menginginkan" pada dasarnya telah menempatkan diri pada suatu tatanan kehidupan baru yang lebih egaliter, bebas dan berkeadilan. Dalam konteks yang demikian itu secara tegas menurut Kuntowijoyo dapat dikatakan bahwa daya pikat Islam dapat diterima masyarakat Nusantara terletak konsep tawaran kebermasyarakatan berkeadilan dan berkesamaaan dan konsep ini teramat diminati oleh kalangan pedagang atau perajin di pesisir kota.

Terkait dengan gagasan egalitarianisme yang diperkenal Islam kepada masyarakat ternyata sangat diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, karena itulah kemudian Kuntowijoyo

---

[39] Ali dan Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam...*, 32-34

menyatakan bahwa gagasan persamaan itulah yang menjadi daya pikat perkembangan Islam, "Bahwa gagasan persamaan dalam Islam merupakan daya pikat utama agama ini, karena konsep stratifikasi social Hindu (sistem kasta) tidak menarik buat pedagang dan perajin kecil yang sedang tumbuh di kota-kota pesisir. Islam melengkapi kaum pedagang dan perajin kecil itu dengan ideology untuk melawan kelas atas Hindu. Runtuhnya kerajaan Majapahit dan lahirnya Demak sebagai kerajaan Islam petama di Jawa pada akhir abat ke-15 merupakan kemengangan atas kelas saudagar dan kemenangan jenis kerajaan maritime atas aristrokasi dan negara agraris Majapahit.[40]

Kedua, sebagai alasan berikutnya yang dapat dimunculkan adalah tingkat fleksibelitas ajaran Islam. Artinya, ketika Islam sebagai ajaran dan system nilai berhadapan berbagai bentuk tata kehidupan, kultur, sistem nilai, adat kebiasaan masyarakat, ternyata Islam mampu "berjalan" berseiringan tanpa harus mengubah "diri" dan mengubah masyarakat secara radikal,frontal dan gradual. Justru dengan kelenturan itu, Islam mampu mengubah sebuah tatanan masyarakat dalam gaya yang "apik", perlahan tapi pasti perubahan itu menjadi terwujud secara nyata. Dalam realitas empirik masyarakat Indonesia yang *nota bene* telah mengenal berbagai sistem nilai bahkan adat budaya, ternyata dengan hadirnya Islam, tidak menjadikan sistem nilai dan adat budaya itu dihilangkan bahkan secara ekstrim dihancurkan. Justru Islam dapat melakukan pemilihan dan pemilahan mana sistem nilai yang tidak bertentangan ajaran Islam dan kemudian dikembangkan, dan mana sistem nilai yang bertentangan untuk kemudian "dipoles kembali" bahkan ditata kembali berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, keberadaan dan kehadiran Islam, oleh masyarakat Indonesia secara global tidak dilhat sebagai "musuh yang menghancurkan" justru sebagai "kawan yang membangunkan"

---

[40] lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung : Mizan, 1991), 147

Ketiga, alasan diterimanya Islam oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuannya dalam menumbuhkan kebersatuan sebuah bangsa. Alasan ini sebenarnya berkaitan erat dengan ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia, di mana dalam ekspansi itu pihak Barat juga melakukan proses penyeberan agama Kristen kepada masyarakat. Namun karena misi agama yang dilakukan tidak hanya sekedar menyebarkan agama, tapi juga memperkuat dominasi pihak Barat, akhirnya masyarakat melakukan perlawanan, dan perlawanan ini dilakukan karena menganggap Barat telah melakukan perusakan dan pemerasan terhadap masyarakat berserta tatanan kehidupannya, dan di dalam Islam itulah masyarakat Indonesia kala itu mendapatkan "spirit kekuatan" untuk melakukan perlawanan.

Sebagai pelengkap ketiga alasan itu, Federspiel menambahkan bahwa sebenarnya diterimanya Islam oleh masyarakat Indonesia saat itu, karena memang sejak awal "format keberagamaan" yang diperkenalkan dan ditawarkan telah mengalami format ulang, atau penyesuaian, artinya Islam yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia saat itu bukan "murni" berasal dari negeri asalnya, arab, melainkan dari negeri Gujarat dan India, sehingga sejak awal mereka (para da'i) tersebut telah terbiasa bersentuhan dengan sesuatu yang sifatnya kultur. Dengan demikian Islam dapat diterima oleh bangsa Indonesia, karena Islam dapat menerima pola-pola keagamaan lama dan menghubungkan diri dengan praktek-praktek dan keyakinan-keyakinan yang ada[41]. Dalam kondisi seperti itu Islam boleh dikata cukup beruntung karena diperkenalkan ke kawasan Malaya oleh para pedagang dari Gujarat, di pantai barat India, di mana Islam telah terkena pengaruh Hindu dan Syiah Ismailiyah, sehingga juga sangat memberikan penekanan pada bentuk mistik. Islam versi Gujarat ini menempa nada responsif di kalangan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia mudah memahami, mengapresiasi dan menggunakannnya.

---

[41] Federspiel, *Persatuan Islam...*, 1-2

Banyak praktek keagamaan pribumi terus berlangsung setelah kedatangan Islam, beberapa secara terbuka, tetapi pada umumnya dibungkus sebagai bagian dari Islam itu sendiri. Pemujaan terhadap para wali dan pahlawan terus berlangsung, dengan keyakinan bahwa angka-angka dan nama-nama tertentu memiliki kekuatan magik dan mistik yang menampilkan wajah Islam dengan cara mencantumkan nama "empat khalifah pertama, empat huruf arab yang mengeja nama nabi dan nama Allah, dua belas tanda zodiak, dua belas Imam syi'ah dan lain-lain" Eksorsisme sangat dihormati, dan perintah-perintah dan referensi-referensi Islam diperkenalkan ke dalam praktek, jimat-jimat Indonesia tempil dengan wajah Islam, dengan cara ditempeli syahadat dan ayat-ayat al-Qur'an.

Karena mengambilalih di mana yang telah ditinggalkan oleh agama Budha, maka mistisisme Islam (tasawuf) mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap orang-orang Indonesia, dan pada masa awal sufi Islam sangatlah dihormati. Di Sumatera Utara di paruh terakhir abad ke-16, ulama-ulama yang paling dihormati semuanya adalah sufi dan di Jawa, walisongo yang menurut sejarah Jawa, bertanggung jawab atas penyebaran Islam di pulau ini, semuanya juga sufi. Para teolog dan juris yang begitu berpengaruh di berbagai Islam Timur Tengah, menduduki tempat kedua setelah sufi di masa-masa awal dan bahkan hingga abad ke-20, ulama Indonesia yang terkenal untuk pengetahuan hukum dan teologi juga sufi.

Bahwa Islam berkompromi dengan pola-pola keagamaan yang ada ketika diperkenalkan ke nusantara tidaklah mengherankan karena umat Islam, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, telah berebut dengan Islamisasi nominal terhadap para penduduk di kawasan baru manapun juga. Inilah pola dalam ekspansi besar pertama Islam di abad pertama Hijriyah. Ketika Syiria, Mesir dan Persia masuk ke dalam pengaruh dunia Islam melalui peperangan ; dalam abad-abad yang berhasil masyarakat dipengaruhi untuk menerima Islam karena alasan karena alasan politik dan ekonomi. Sejauh menyangkut keimanan, secara tradisional umat Islam

menerima pengucapan kalimat syahadat sebagai sesuatu yang memadai untuk menganggap seseorang sebagai saudara seiman. Namun demikian sejauh menyangkut umat Islam, toleransi ini walaupun diperluas selama proses pemindahan agama, tidaklah mengimplikasikan penerimaan internal atau kompromi permanen dengan poraktek-praktek yang oleh ulama dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih merupakan gencatan senjata sementara. Pendirian sekolah-sekolah, kontak dengan dunia Islam lainnya, dan bimbingan penguasa-penguasa Muslim dimaksudkan untuk memperdalam iman dan amal dengan masing-masing generasi selanjutnya. Perkembangan ini masih terjadi Indonesia, dan selama empat ratus tahun yang silam Islam di Indoneisa telah mengubah bentuknya secara perlahan-lahan; momentum kecenderungan-kecenderungan perilaku keagamaan yang menyimpang pada periode awal telah melemah, praktek-praktek dan pola-pola Islam ortodoks perlahan-lahan menjadi semakin penting. Kecenderungan ini terlihat dengan jelas ketika kawasan yang paling lama berada dibawah pengaruh Islam---Aceh dan Sumatera Utara--- dibandingkan dengan Jawa, di mana Islam masuk jauh lebih belakangan. Di Aceh dan Sumatera Utara, agama memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan pribadi individu-individu, dan Islam diakui sejajar dengan adat bahkan kadang-kadang lebih tinggi. Di kalangan orang Jawa, adat jelas di atas Islam. Di seluruh penjuru Indonesia kecenderungan selama beberapa ratus tahun mendukung nilai-nilai muslim ortodoks untuk memainkan peran yang lebih besar karena bangsa Indonesia belajar banyak tentang Islam dan menjadi lebih tertarik pada ajaran-ajarannya. Namun demikian, proses ini membutuhkan waktu yang lama, dan di Indonesia proses ini harus berbenturan dengan sejumlah faktor yang ikut memperkeruh perkembangannya.

Dengan kondisi seperti tersebut, maka "mungkin" ada benarnya jika ada sebagian kalangan akademisi yang kemudian menyatakan bahwa dalam penyebaran Islam di Indonesia mengalami proses sinkretisasi, yaitu proses bercampurnya ajaran

Islam dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat, di samping ada yang menyatakan bahwa penyebaran itu mengalami "penyesuaian" dengan kultur lokal.

Terhadap "penyesuaian" ini dalam bingkai kebudayaan bukan dimaksudkan untuk menggantikannya dengan yang baru, melainkan menambahkan kepada seuatu yang lama itu, dan kondisi itu menurut Manfred Ziemek yang dikutip Einar Martahan sitompul sebagai titik kelemahan Islam, seperti yang dikatakannya.

Dalam proses peleburannya dengan tradisi Hindu Jawa, Islam saat itu kehilangan banyak sifat-sifat egaliter serta tanggung jawab sosialnya dan menjadi suatu agama penguasa atau jadi bersifat pajangan, yang hampir dapat mengatas unsure-unsur budaya Jawa kuno. Betapa dangkalnya proses perpindahan agama dari Hindu ke Islam ini, juga terlihat jelas dari betapa mudahnya pusat-pusat pendidikan keagamaan dari tradisi Jawa mengambil alhi dan menerima faham-faham dari luar... Bakat bangsa Melayu untuk menerima pengaruh-pengaruh budaya yang baru dan menggabungkannya dengan unsure-unsur budaya tradisional sendiri, juga berahasil pada saat itu, mendesakkan dorongan pembebasan Islam yang bertujuan melindungi martabat dan hak-hak pribadi manusia ke dalam agama negara yang terbentuk waktu itu... Dengan demikian aliran-aliran ini telah mengubah faham-faham Islam yang dahulunya humanistis individualis menjadi kebalikannya, di mana hak keagamaan menjadi bentuk yang formal[42].

Menyikapi pandangan ini, Einar Martahan Sitompul mengkritisinya dengan memberikan beberapa argumen, yang intinya menolak pandangan Ziemeck, yaitu *pertama*, agama Islam sejak semula mampu melakukan integrasi, yang dilakukan secara sadar. Karena Islam berkembang dalam bingkai kebudayaan lama, maka kemunculan kerajaan Islam (Mataram) dianggap penerusan kerajaan Hindu Majapahit, Candi tidak dibangun lagi, tetapi tidak

---

[42] Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), 39

pula dihancurkan. Masjid dibangun secara besar-besaran ; yang unik gaya arsitekturnya dipengaruhi oleh corak Hindu Jawa. *Kedua*, justru setelah berkiprah dipedalaman, ortodoksi dapat makin memperkuat kedudukannya. Suasana tenang dan stabil di pedalaman memungkinkan Islam mengembangkan dirinya dan para ulama makin mengukuhkan kedudukannya di dalam masyarakat sebagai kyai "pemuka yang berkarisma karena keramatnya". *Ketiga*, abangan dan santri tidak dapat digolongkan sebagai kelompok yang bertentangan dalam soal kesalehan. Ia harus dimengerti sebagai dua kategori penghayatan keagamaan. Golongan abangan menghayati agama secara "pengalaman mistik", sedangkan kaum santri menjalankan prinsi-prinsip islamiyahnya menurut cara-cara yang diajarkan oleh ulama ortodoks dengan saleh, dalam arti bahwa yang terlebih penting baginya adalah penerapan hukum, moral, dan sosial di dalam kehidupan sehari-hari[43].

Dengan kondisi perkembangan Islam yang demikian itulah kemudian memuncukan berbagai bentuk penyikapan dari umat Islam Indonesia sendiri, misalnya gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari berbagai pengaruh yang bersifat kultur, dan kepercayaan lokal (*paganisme*) bahkan juga pemertahanan penyesuaian agama dengan kultur yang diyakini cukup bagus dan tidak bertentangan agama, untuk gerakan purifikasi dilakukan oleh seorang Haji Miskin, KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya dan lain sebagainya. Dengan munculnya penyikapan umat Islam Indonesia, apakah yang bersifat purifikasi ataupun yang penyeimbangan (kultur dan ajaran) memberikan dampak pada pola, format, dan model keberagamaan masyarakat Islam Indonesia, yang dalam term pemikiran Islam Indonesia dikatakan sebagai Islam tradisionalis, Islam modernis.

Dalam konteks munculnya Islam tradisonalis dan modernis Zamakhsyari Dhofier, menyatakan bahwa Islam tradisionalis itu pikiran-pikiran keislaman yang dimiliki mereka masih terikat kuat

---

[43] Ibid, 39-40

dengan poikiran-pikiran ulama fiqh (hukum Islam), hadith, tasawuf, tafsir dan tauhid yang hidup antara abad ke-7 hingga abad ke-13. Struktur referensi pengambilan hukum kelompok Islam tradisionalis merujuk pada empat rantai yang telah dibangun oleh keempat pendiri madzhab utama, termasuk Imam Syafi'i, yaitu al-Qur'an al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kendatipun begitu menurut Dhofier tidak berarti bahwa mereka dewasa ini masih tetap terbelenggu dalam bentuk-bentuk pemikiran yang diciptakan ulama abad-abad tersebut.[44] Dalam pada itu menurut Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, ciri lain yang dapat dikenakan pada kelompok ini adalah bahwa mayoritas mereka tinggal di daerah pedesaan dan pada mulanya merupakan kelompok yang pada mulanya eksklusif ; dalam taraf-taraf tertentu mengabaikan persoalan duniawi---hidup dalam asketisme, sebagai akibat keterlibatan mereka dalam kehidupan sufisme dan tarekat ; bertahan tidak seja terhadap pengaruh modernisasi, tetapi juga terhadap pengaruh santri kota ; serta cenderung mempertahankan apa yang telah mereka miliki, di mana kesemuanya itu mereka pusatkan dalam dunia pesantren. Lebih dari itu semua, sikap keimanan dan militansi mereka yang tradisional merupakan faktor utama untuk menarik diri dari urusan ukhrawi[45].

Sementara itu untuk kelompok modernis kemunculannya merupakan hasil reaksi terhadap kelompok tradisional. Reaksi itu tercermin dari langkah awal kaum modernis, yakni berusaha menghilangkan pikiran-pikiran tradsional yang tidak mendukung upaya umat Islam dalam melepaskan dori dari kebodohan, kemiskinan dan penjajahan. Karena sifatnya yang cenderung rasional, maka anggota yang berhimpun dan tertarik untuk berhimpun dengan kelompok ini sebagian besar berasal dari masyarakat kelas kota. Untuk ciri yang menempel pada kelompok ini banyak kalangan menyatakan bahwa pintu ijtihad tak pernah tutup. Oleh karena itu praktek taqlid harus dihilangkan ; ajaran-

[44] Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren (Jakarta LP3ES, 1982), 1
[45] Ali dan Effendi, Marambah Jalan Baru Islam ...., 48-50

ajaran Islam harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu membangun dan bersaing dengan peradaban modern[46]

B. Peta Situasi Sosial Politik

Merupakan suatu kenyataan bahwa proses islamisasi yang berkembang di Indonesia dilakukan dengan cara damai. Konsekuensi dari proses islamisasi semacam itu adalah munculnya sikap toleransi dan kompromistis yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang telah ada. Keberadaan Indonesia yang secara geografis letaknya cukup jauh dengan negeri asal agama Islam, juga memberikan dampak terhadap kurang terpengaruhinya nilai-nilai budaya lokal dengan budaya Arab, kondisi ini menggambarkan ketiadaan integrasi budaya yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan yang dapat dijadikan panutan, disamping secara realitas para penyebar agama Islam saat itu dalam menyebarkan agama tidak pernah "mengusung total" budaya Arab ke masyarakat Indonesia, justru mereka melakukan adaptasi terhadap kebudayaan lokal. Kondisi tersebut teramat dimungkinkan karena sebelum masuk ke wilayah Indonesia para penyebar agama Islam sebelumnya pernah merasakan persentuhan dengan budaya India bahkan Persia, sehingga boleh dikatakan keberislaman masyarakat Indonesia cukup beragam tingkat pemahamannya sebagaimana klasifikasi yang dilakukan Geertz[47], yakni santri, abangan dan priyayi. Meski tidak terlalu tepat klasifikasi itu, namun secara esensial hal itu menunjukkan tingkat pluralitas nilai yang dimiliki masyarakat, bahkan dalam perkembangan pemikiran politik Indonesia, sebagian pendapat menyatakan bahwa ketiga golongan tersebut memberikan warna dan corak pemikiran politik Indonsia yang berkembang saat itu.

---

[46] Ibid

[47] Untuk lebih lengkapnya lihat Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Ter. Aswad Mahasin. Jakarta : Pustaka Jaya, 1981

1. Masa Penjajahan Belanda

Ada perkembangan cukup penting yang berkaitan dengan keberadaan ketiga golongan masyarakat Indonesia sebagaimana yang diklasifikasikan Geertz, yakni terjadinya pertentangan antar golongan yang mengarah pada benturan secara fisik. Benturan itu kian meruncing dan sulit untuk dikendalikan setelah ada upaya intervensi pihak kolonialisme Belanda dalam setiap masalah yang timbul[48]. Keterlibatan itu menurut semua kalangan bukan tanpa alasan, mengingat Belanda sendiri punya kepentingan strategis dibalik keterlibatannya, yaitu memecah kekuatan-kekuatan bangsa dalam beberapa kelompok yang tidak saling membantu melalui politik *devide et impera,* untuk kemudian melakukan perebutan wilayah Indonesia. Perlahan tapi pasti terbukti strategi itu berhasil memperdaya kelompok masyakat bangsa ini, dan waktu yang begitu lama Belanda menguasai hampir seluruh tanah di wilayah bangsa ini. Sementara itu benturan antar golongan itu telah menghasilkan beberapa akibat yakni, tersudutnya kelompok santri dari posisi sosial ekonomi bahkan politis, sedangkan pihak abangan terutama kelompok priyayi mendapatkan semua fasilitas dan kemudahan dari pihak kolonialisme Belanda, berupa bantuan pasukan untuk melakukan penumpasan, termasuk fasilitas yang diberikan pihak kolonialis disini adalah kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan.secara mudah.

Melihat kondisi yang demikian itu, menambah rasa kebencian kelompok santri terhadap kelompok priyayi atau abangan, terlebih kedua kelompok tersebut mendapat perlakuan istimewa pihak kolonialisme Belanda. Namun demikian kemarahan yang ada menurut kelompok santri bukan hanya dipicu dari

---

[48] Ingat kasus perang Paderi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat pada abad ke-16. Perang itu sebenarnya dipicu oleh faktor sosial keagamaan, dimana banyak kebiasaan masyarakat dianggap oleh kaum ulama (santri) menyimpang dari ajaran agama, dan mereka (masyarakat) lebih mementingkan adat istiadat daripada ajaran agama. Persoalan menjadi lain ketika Belanda ikut campur di dalamnya, dengan membela kaum adat. Belanda dan kaum Adat bersama-sama memerangi kaum santri. Akibatnya kemudian timbulah perang sauadara

pemberian fasilitas dan kemudahan, melainkan karena secara prinsipil menurut kalangan santri prilaku kelompok priyayi dan abangan dianggap telah menyimpang bahkan mengkhianati bangsa dengan cara bekerja sama dengan pihak pemerintah kolonialisme Belanda yang jelas-jelas kaum kafir dan telah melakukan tindak kejahatan terbesar, berupa penjajahan atas tanah bangsa Indonesia.

Memang, jika dilihat secara sepintas pemberian fasilitas yang dilakukan pihak kolonialisme Belanda kepada kelompok non santri, dalam hal ini misalnya yang paling menonjol adalah kesempatan pendidikan dan kerja, sebenarnya dimaksudkan strategi kolonialisme disamping sebagai wujud implementasi politik etis pemerintah kolonial. Dengan politik etis, yang berupa kesempatan pendidikan dan kerja, pemerintah kolonial hendak mencari tenaga lokal untuk mengembangkan ekonomi kolonial bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam arti sesungguhnya. Meski demikian, dalam kenyataan lapangan dan perjalanan waktu, ternyata keinginan pihak kolonialisme Belanda berjalan mulus, artinya putra-putra Indonesia yang kebetulan mendapatkan kesempatan itu tidak semuanya berminat memenuhi keinginan pemerintah kolonial atau menjadi pegawai pemerintah, justru dengan bekal pendidikan yang mereka peroleh, mereka menjadi sadar diri akan sebuah realitas yang menimpa bangsanya. Kelompok elit terpelajar inilah, dalam perkembangan selanjutnya menjadi kekuatan besar yang mampu menentang kolonialisme dengan bekal strategi yang lebih matang dan intelektual, bahkan dalam melakukan aktivitas pergerakan kebangsaan mereka mengggandeng semua elemen kekuatan bangsa untuk bersatu padu melawan penjajahan Belanda, termasuk dalam hal ini kelompok Islam. Dengan begitu hampir dapat dipastikan semangat kebangsaan atau nasionalisme si semua tempat di negeri ini bermunculan dalam bentuk dan aktivitas yang cukup beragam[49].

---

[49] Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam ; Rekonstruksi Pemikiran Islam* (Bandung : Mizan, 1990), 70-80

Nasionalisme atau kesadaran akan nasib bangsa yang tertindas oleh penjajahan itulah yang menjadi *mainstreem* dan perekat emosi serta rasio setiap individu masyarakat Indonesia yang selama ini telah terpecah belah oleh kekuatan kolonialisme Belanda. Dengan rasa itulah kemudian bangsa ini mulai menyusun dan menentukan langkah taktis dan strategis dalam melakukan perlawanan terhadap kaum kolonialisme. Rasa nasionalisme itu sendiri sebenarnya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak lama, bahkan kebangsaan atau nasionalisme itu diidentikan dengan keberislaman masyarakat Indonesia, seperti yang dicatat oleh para pengkaji nasionalisme Indonesia, dengan menyatakan bahwa Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional yang menentang kolonialisme Belanda, atau sebagaimana yang dikatakan Fred R Von der Mehden yang dikutip Bachtiar effendy

> Islam merupakan sarana yang paling jelasa baik untuk membangun rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Pulau-pulau yang mencakup Hindia Belanda tidak pernah ada sebagai sebuah kesatuan linguistik, cultural atau histories. Daerah-daerah terakhir yang jatuh ke dalam kekuasaan Belanda tidak pernah tunduk sepenuhnya hingga awal abad ke-20. Oleh sebab itu, karena terdiri dari berbagai tradisi, histories, linguistik, kultral dan bentuk geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal yang tersedia, di luar kekuasaan kolonial adalah Islam[50].

---

[50] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara ; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1998), 63. Bandingkan dengan Fred R Von der Mehden dalam *Religion and Nationalism in Southeas Asia* (Milwaukee and London : The University of Wincosin Press, 1968), 11-12. Untuk identifikasi keislaman dengan kebangsaan Indonesia juga dikemukakan oleh Haji Agussalim (1884-1954) di harian Hindia Baru, 9 januari 1925 sebagaimana oleh Anwar Harjono, " Syahdan bgi bangsa Jawa, bagi bangsa Hindia umumnya, adalah agama yang menjadi asas paham kehidupan dan pemandangan dunianya itu agama Islam, yang senyata-nyatanya agama itu berkelidan (berjalin) dengan bangsa kita dan dengan perasaan kebangsaan

Dalam pada itu, identifikasi keberislaman dengan nasionalisme semakin mengental ketika Haji Samanhoedi (1868-1956) mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta. Meskipun SDI semula dimaksudkan untuk sekedar menjadi koperasi pedagang batik tetapi gaung kehadirannya mampu melintasi wilayah ekonomi[51]. SDI kemudian diidentikan sebagai simbol perlawanan bangsa dalam melawan kesewenang-wenangan bangsa asing[52]. Tidaklah mengherankan jika dalam waktu yang relatif singkat SDI telah memiliki cabang di berbagai pelosok nusantara. Keberadaan SDI semakin menemukan bentuknya sebagai organisasi kebangsaan, setelah diserahkannya tampuk kepemimpinan dari Haji Samanhoedi ke tangan H.O.S Tjokroaminoto pada bulan Mei 1912, dan pada saat yang sama pula nama SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam)[53].

---

kita. Agama itu timbul dan tumbuhnya dalam bangsa kita sendiri, dengan tidak lebih dari seorang dua orang luaran menjadi hubungan kita dengan negeri asal akan alasan agama itu seolah-olah sekedar akan menanamkan benih atau bijinya." Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 16-17

[51] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional; Kisah dan Analisis Perkembangan politik Indonesia 1945-1965,* cet. II (Bandung : Mizan, 2000), 5

[52] George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995), 87

[53] Ibid, Dalam kongres pertama SI di Surabaya pada bulan Januari 1913, HOS Tjokroaminoto menekankan bahwa perkumpulan itu bukan suatu partai politik dan akan tetap setia kepada pemerintah, maka dari itu program yang diajukan dan dimiliki SI secara terbuka tidak mencerminkan sebagai partai politik. Dan program dimaksud, meliputi (a), memajukan perdagangan di lingkungan orang Indonesia, (b) saling membantu antar anggota yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, (c) meningkatkan perkembangan intelektual dan kepentingan-kepentingan materiil bangsa Indonesia, (d) menentang konsep-konsep agama yang salah bertalian dengan agama Islam dan meningkatkan kehidupan beragama di kalangan orang Indonesia. Penetapan program organisasi itu, sebenarnya hanyalah untuk mengelabuhi pihak pemerintah kolonial, hal itu disebabkan adanya peraturan pemerintah yang ditulis hakim Fromberg pada tahun 1914 yang menyatakan tentang larangan sepenuhnya bagi organisasi dan rapat-rapat bersifat politik.

Perubahan SDI menjadi SI, menurut Abdurahman Wahid bahwa semakin tampak wawasan kebangsaan dan kenegaraanya. Yang dipersoalkan bukan lagi masalah apakah Islam terkait dengan masyarakat bangsa---dan kenegaraan---melainkan bagaimana harus dirumuskan lingkup dan jangkauan wawasan yang ditumbuhkan. SI melihat dimensi kebangsaan dari kehidupan masyarakat terjajah di Hindia Belanda sebagai ikatan dasar yang meliput tidak hanya kelompok-kelompok yang memiliki persamaan primordial saja, melainkan juga memiliki kesamaan ideologis. Dalam konteks ini Abdurrahman Wahid mencatat bahwa SI telah melakukan lompatan besar berupa pertumbuhan dari kesadaran yang semula hanya untuk memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota belaka, menjadi kesadaran akan perlunya sebuah sistem kekuasaan yang akan menciptakan kesejahteraan yang diinginkan itu.[54] Karena itu dalam dekade pertamanya SI melakukan perekrutan aggota, ternyata mendapat sambutan yang begitu besar dari berbagai kelas dan aliran yang ada di Indonesia, sehingga tak heran jika kemudian organisasi ini menjadi besar dan beragam baik secara etnis maupun ideologi[55]

Dengan modal semangat dan dukungan yang begitu besar dari beragam komponen masyarakat Indonesia saat itu, SI memperjuangkan perlunya pemerintahan sendiri bagi bangsa

---

[54] Abdurahman Wahid "Masa Islam Daam Kehidupab Bernegara dan Berbangsa". *Prisma*

[55] Ibid. Terkait dengan perekrutan anggota SI, ada beberapa factor yang menyebabkan SI mendapatkan simpatik dari massa sedemikian cepat, hal ini pernah diungkapkan oleh Von der Mehden dengan menyebutkan "Tak diragukan sedikitpun bahwa perserikatan sungguh-sungguh memperoleh banyak anggota karena watak islamnya. Sejumlah alasan dapat dikemukakan untuk menerangkan kekuatan daya tarik Islam, termasuk perhaian yang semakin bertambah terhadap Islam sebagai agama, pertalian ratul adil dengan Cokroaminoto dan Sarekat Isla, digunakannya Islam sebagai symbol nasional oleh pimpinan SI, reaksi terhadap aktivitas penyebaran Kristen, bergandengnya kepentingan agama dan ekonomi di kalangan haji dan reaksi terhadap kebijaksanaan administrasi pemerintahan Belanda. Lebih jauh lihat Fred R Von der Mehden dalam *Religion and Nationalism in Southeas Asia* (Milwaukee and London : The University of Wincosin Press, 1968)

Indonesia yang mampu menentukan nasib sendiri, bukan tergantung dan bergantung pada pemerintah kolonial Belanda dalam arti merdeka. Niat dan semangat yang begitu menggelora, tampaknya tidak berjalan lama, artinya dalam perjalanan pergerakan SI ternyata mengalami friksi-friksi yang begitu tajam, banyak di kalangan tokoh dan anggota terlibat perbedaan untuk menentukan taktik dan strategi perjuangan, bahkan perbedaan menjadi meruncing yang sulit untuk dibersatukan. Akibatnya dapat digambarkan, jika kemudian SI mengalami perpecahan, yang ditandai dengan munculnya kekuatan baru yang mengusung komunisme sebagai ideologinya. Perpecahan itu, menurut Anwar Haryono, bukan hanya disebabkan faktor perbedaan penentuan taktik dan strategi perjuangan saja, melainkan ada "skenario" pihak kolonialisme Belanda yang mencoba mengintervensi organisasi ini, dalam hal ini Gubernur Jenderal Belanda A.W.E. Idenburg merasa khawatir akan pesatnya perkembangan SI sebagai organisai pergerakan. Untuk mengimplementasikan maksudnya Idenburg kemudian memecah SI menjadi perkumpulan-perkumpulan kecil, dan perkumpulan kecil baru dapat diakui oleh pemerintah jika dapat menunjukkan dan memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sendiri.[56]

Meski maksud Idenburg tak sampai menghilangkan dan mempersempit ruang gerak SI menjadi perkumpulan kecil, tapi secara esensial organisasi ini telah mengalami perpecahan akibat friksi yang berkembang. Dalam kaitan itu pula kemudian banyak kalangan pergerakan yang kecewa terhadap perpecahan itu. Mereka lebih kecewa lagi karena kekecewaan itu bukan karena taktik, tetapi lebih dari itu masing-masing golongan semakin mempertegas ideologinya, seperti Islam. Dalam kondisi kekecewaan itu kemudian banyak anggota dan tokoh SI yang tidak sepaham garis perjuangannya, mendirikan organisasi perjuangan yang lepas dengan SI, maka berdirilah Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun

---

[56] Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa...*, 20-25

1927, Partai Indonesia (Partindo) tahun 1931[57]. Dengan munculnya partai atau organisasi baru itu memberikan isyarat yang jelas bahwa ada tiga kekuatan politik yang mencerminkan tiga aliran ideologi, yaitu Islam, komunisme dan nasionalisme "sekular". Dan keberadaan ketiga golongan ini dalam perjalanan pentas perpolitikan Indonesia selalu mengalami gesekan-gesekan bahkan benturan-benturan.

Dalam suasana konflik yang sedemikian itu, dan munculnya partai baru dikalangan kelompok yang berseberangan, memberikan konsekuensi semakin melemahnya keberadaan organisasi pergerakan Sarikat Islam. Partai-partai yang baru dibentuk oleh kalangan nasionalis "sekular" ternyata mendapat sambutan yang cukup berarti dari masyarakat, bahkan perkembangannyapun semakin pesat dan manandingi keberadaan SI sendiri. Dalam pada itu di kalangan Islam terbentuk sebuah forum bersama yang mereka beri nama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang berdiri tahun 1938. Meski forum ini lebih menekankan pada segi agama, namun keberadaannya juga tidak dapat melepaskan dari pergulatan politik kebangsaan. Dengan demikian baik secara langsung maupun tidak, keberadaan SI semakin lama semakin merosot, terlebih setelah wafatnya H.O.S Tjokroaminoto dan sering terjadinya perdebatan diantara tokoh-tokohnya.

Usaha mempersatukan kembali kelompok-kelompok yang terpecah selalu dilakukan, namun selalu juga mengalami kegagalan. Hal yang demikian itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ideologi masing-masing aliran, disamping kebijakan pemerintah kolonialisme Belanda yang melakukan pembatasan ruang gerak orang dan organisasi pergerakan.

2. Masa Penjajahan Jepang

Memasuki masa kolonialisme Jepang, ada sebuah perkembangan menarik berkaitan dengan kiprah umat Islam dalam pentas perpolitikan nasional. Kiprah politik Islam itu, sebenarnya

---

[57] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : LSIK, 1998), 260

telah dimainkan atau telah didapatkan ketika masa kolonialisme Belanda, namun selalu saja menemui kendala yang cukup besar, berupa pembatasan ruang gerak bahkan upaya repesif oleh pihak penguasa kolonialisme Belanda. Ketika Jepang menggantikan Belanda menguasai bumi Nusantara ini, ternyata pihak kolonialisme yang baru ini cukup memberikan "peluang" kepada umat Islam untuk memainkan peran, meski pemberian peluang tersebut sebenarnya sarat dengan kepentingan kolonialisme Jepang yang teramat membutuhkan dukungan. Dengan "peluang" itu, banyak kalangan menilai bahwa semenjak pendudukan Jepang, Islam mulai mendapatkan peran politiknya kembali, setelah sempat hilang akibat kebijakan dan upaya represif pihak kolonial terdahulu.

Dalam banyak hal, sebenarnya pemberian ruang gerak yang cukup besar kepada Islam, disebabkan "kegagalan" pihak nasionalis dalam mendapatkan dukungan masyarakat di semua lapisan kepada Jepang. Melalui organisasi **Tiga A** (*Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia*) yang dibentuk pada bulan April 1942[58] ataupun Poesat Tenaga Rakyat (Poetra)[59], Jepang berharap dukungan yang dibutuhkan dapat diraih dengan cepat, ternyata oleh masyarakat tidak begitu direspon secara baik. Melihat kondisi yang demikian itu, tampaknya pihak Jepang merasa tidak puas. Dalam ketidakpuasan itu, Jepang melihat ada potensi kekuatan besar lain yang menurutnya dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan dukungan dan memobilisasi massa, dalam ini yang dimaksud adalah umat Islam, karenanya segera itu pihak Jepang bersedia memberikan konsesi-konsesi terhadap tuntutan kelompok-kelompok Islam, bukan kelompok-kelompok nasionalis,

---

[58] Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*..., 34-45. Lihat Juga Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Menurut banyak kalangan pemilihan Mr. Raden Samsoedin oleh Jepang menjadi pemimpin organisasi 3A dikatakan sebagai salah satu kesalahan Jepang dalam memasang orang, yang jelas-jelas kurang memiliki nama di kalangan pergerakan.

[59] Berdiri pada bulan Maret 1943, penggagasnya adalah PM Tojo. Organisasi dipandegani oleh empat serangkai, yaini Soekarno, Mohammad Hatta, KI Hajar Dewantoro dan Kyai Haji Mas Mansoer.

apalagi kelompok priyayi. Konsesi-konsesi dimaksud mencakup ; pembentukan Kantor Urusan Agama (*Shumubu*), pembentukan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan pembentukan Hizbullah organisasi militer untuk pemuda muslim[60].

Kesanggupan Jepang dalam memberikan konsesi ataupun ruang gerak dan fasilitas kepada umat Islam, tak lepas dari "respon cerdas" dari pemimpin Islam yang mampu memanfaatkan momentum tersebut secara baik. Meski kesan yang muncul adalah pihak Islam mau diajak bekerja sama dengan pihak kolonialisme Jepang, namun sejatinya para pemimpin Islam memiliki maksud "tersembunyi". Melalui lembaga-lembaga inilah ide-ide akan perlunya nasionalisme ataupun rasa kebangsaan mengalir deras ke masyarakat hingga lapisan paling bawah[61]. Dengan demikian, tampaknya para pemimpin Islam menyadari akan kegagalan masa lampau, yang menurut mereka sangat menyakitkan, karenanya kemudian merekapun menerapkan starategi "wajah ganda", di depan pemerintah kolonial Jepang, para pemimpin Islam seolah-olah mendukung setiap usaha yang dilakukan, namun dibalik itu para pemimpin Islam telah menyiapkan serangkaian strategi untuk memberikan penguatan terhadap masyarakat dan mencari celah dari setiap aktivitas yang dilakukan. Keberadaan lembaga *Shumubu* misalnya hingga tingkat tertentu Kantor Urusan Agama ini menyerupai Kantor Pemerintah Hindia Belanda untuk urusan-urusan Pribumi. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kenyataan bahwa Kantor Urusan Agama dipercayakan operasionalnya kepada umat Islam. Mengingat situasi saat itu, posisi kepemimpinan ini jelas sangat besar mafaatnya, terutama karena hal itu "memberikan" bobot pengaruh lebih besar (kepada para pemimpin Islam) dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam di Jawa, disamping keberadaanya yang tersebar

---

[60] Boland, *Pergumulan Politik Islam...*, 12-15. Ada sebagian pendapat menyatakan bahwa pemberian konsesi ini jika ditelaah lebih lanjut, merupakan salah satu bentuk manfaat akan keberadaan Jepang di Indonesia

[61] Ali dan Effedy, *Merambah Jalan Baru Islam...*, 81

hingga ke daerah-daerah memudahkan para pemimpin Islam untuk mengadakan konsolidasi kekuatan masyarakat secara lebih meluas. Secara keseluruhan, tampaknya cukup tepat jika dikatakan bahwa masa pendudukan Jepang telah memperkuat posisi kelompok-kelompok Islam. Pada tingkat yang lebih konkrit, masa itu telah memberikan lebih banyak pengalaman organisasi kepada para pemimpin Islam dalam pengaturan masalah-masalah keagamaan. Yang lebih penting lagi adalah, pemerintahan Jepang mengakhir kebijakan Belanda yang mengasingkan Islam dengan politik.

Namun demikian, keterlibatan politik Islam mulai mengendur seiring dengan mengendurnya upaya-upaya strategis Jepang untuk memenangkan perang. Pemerintah kolonialisme Jepang meulai mengubah arah kebijakan mereka, dengan makin banyak memberikan dukungan kepada para pemimpin nasionalis. Karena itu beberapa badan ataupun komite negara yang dibentuk oleh pemerintah kolonialisme Jepang lebih banyak diserahkan kepada pihak pemimpin yang berlatar nasionalis "sekular", misalnya *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (BPUPKI) yang secara kuantitas bahkan kualitas anggota yang duduk di dalamnya lebih didominasi kalangan nasionalis, sementara dari kalangan Islam hanya diwakili oleh beberapa orang saja, salah satunya adalah KH. A. Wahid Hasyim. Dengan demikian, peran dan keterlibatan Islam dalam politik mulai berkurang dan bergeser ke pihak nasionalis sebagai pemegang kendali pergerakan.

Mengenai lembaga BPUPKI ini, tercatat bahwa berbagai pertemuan yang diadakan hampir selalu diwarnai perdebatan yang seru ---kalau tidak dikatakan sebagai perseteruan--- antara pihak Islam dengan kalangan Nasionalis, perbedaan itu begitu mencuat dan berjalan sangat alot ketika membicarakan tentang pembentukan negara Indonesia. Disinilah kemudian masing-masing kelompok tersebut mengajukan dan mempertahan berbagai pandangan dan argumentasi yang mereka miliki. Bagi pihak Islam, hanya Islamlah yang cocok dan pantas untuk dijadikan dasar pijak kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menyandarkan semua kehidupan dimaksud dengan ajaran Islam, di samping secara

realitas objektif keberadaan umat Islam di Indonesia cukup dominan, sehingga sangatlah logis apabila negara ini berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sementara itu pihak nasionalis tetap berusaha menolak gagasan itu, karena memandang bahwa Indonesia berbeda dengan negeri lain, ada keistimewaan di negeri ini, di samping ada keraguan di benak para nasionalis akan kemampuan Islam dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan kehidupan modern

BAGIAN -3-

DARI PESANTREN UNTUK BANGSA ; BIOGRAFI SINGKAT KH. A. WAHID HASYIM

A. Menapak di Lingkungan Pesantren

K.H. Abdul Wahid Hasyim lahir pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 1914 di daerah Tebuireng, Jombang Jawa Timur[62]. Ia merupakan putra kelima dari seorang ulama besar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Ibunya bernama Nafiqah, putri Kyai Ilyas, pemimpin pesantren Sewulan, Madiun[63].

Gus Wahid atau K.H. Abdul Wahid Hasyim merupakan nama yang telah diubah oleh orang tuanya. Pada mulanya Gus Wahid bernama Mohammad Asy'ari (seperti nama dari moyangnya), namun karena seringnya beliau sakit-sakitan ketika kecil, akhirnya namanya diubah menjadi Abdul Wahid Hasyim. Ibunya sendiri lebih menyukai memanggil dengan "mudin"[64], dari

---

[62] Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiarnya* (Jakarta : Panitia peringatan KH. A. Wahid Hasyim, 1957), 141

[63] "Wahid Hasyim" Ensiklopedi Islam (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 163. Melihat latar kedua orang tua Wahid Hasyim itu tampak bahwa keduanya merupakan keturunan orang terpandang (ningrat) dan alim. Hal itu terbukti dari garis keturunan ayah dan ibunya bertemu pada Lembu Peteng (BrawijayaVI), yaitu di pihak ayah melalui Joko Tingkir (Sultan Pajang, 1569-1587) dan dari pihak ibu melelui Kyai Ageng Tarub I. Lihat Atjeh, Sejarah Hidup … , 141-142

[64] A. Zaini , *Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim ; His Contribution to Muslim Educational Reform and Indonesian Nationalism During The Twentieth Century* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), 86

pada Wahid, sedangkan para santri lebih banyak memanggil dengan Gus Wahid[65].

Sebagaimana putra kyai pesantren, mengaji adalah sebuah keharusan yang wajib diikuti, demikian pula yang terjadi pada diri Gus Wahid. Sejak usia 5 tahun ia telah belajar al-Qur'an melalui orang tuanya, selang 2 tahun kemudian mempelajari beberapa kitab yang biasa diajarkan di pesantren, yaitu *fath al-Qarīb* (kemenangan yang dekat), *al-Minhāj al-Qawīm* (jalan yang lurus), di samping ia sendiri juga mempelajari beberapa karya sastra Arab, misalnya *al Dīwan al-Shu'arā* (kumpulan penyair dengan syair-syairnya)[66].

Setelah menamatkan kitab-kitab dimaksud, Gus Wahid melakukan perjalanan "ngelmu" di beberapa pesantren untuk menambah wawasan keislamannya, yang dimulai di pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, dan dilanjutkan di pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Di kedua pesantren itulah Gus Wahid melengkapi wawasan keislamanya dengan mengkaji beberapa referensi Islam klasik ; *Sulam al- Taufiq* (tinggi untuk mendapat taufiq), *Taqrib* (mendekatkan), *Bidāyat al-Mujtahidīn* (permulaan tinggi mujtahid), dan *Tafsir Jalālain* (tafsir bagi dua tokoh yang bernama Jalal)[67].

Setelah menamatkan pelajaran di Siwalan Panji dan Lirboyo, Gus Wahid mencoba memperluas wawasannya dengan berlangganan sejumlah majalah, seperti *Penyebar Semangat, Daulat Rakyat, Pandji Pustaka, al-Umm al-Qurra, Saut al-Hijaz, al-Lata'ib al-*

---

[65] Kobayashi Yasuko, " Kyai and Japanese Military", *Studia Islamika* Vol. 4 no. 3 (1997) : 65-93

[66] Ensiklopedi Islam ..., 163

[67] *Ibid*, Tradisi "mondok" yang dijalankan Wahid Hasyim memang berada di Siwalan Panji dan Lirboyo, tapi yang dilakukan hanyalah dalam hitungan hari. Kemampuannya dalam menguasai berbagai kitab Islam klasik tersebut tak lebih dari kecerdasan dan kemampuannya membaca, dan dalam hal ini Wahid Hasyim lebih banyak belajar sendiri (autodidak) . Lihat Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI ; Biografi Sosial Politik* (Jakarta : INIS dan Depag RI, 1998), 83-113

Mushawarah,[68] di samping ia sendiri secara tekun mempelajari bahasa Inggris dan Belanda

Melihat potensi besar yang dimiliki Wahid Hasyim, ayahnya meminta untuk membantu memberikan pengajaran di pesantren Tebuireng, Jombang. Namun sekitar tahun 1932, ia bersama saudara sepupunya KH. Mohammad Ilyas, berangkat ke Makkah al-Mukarramah untuk melakukan ibadah haji, dan menambah wawasan pemikiran dan mengembangkan kemampuan bahasa Arabnya. Selama satu tahun di sana, Gus Wahid seringkali terlibat dan ikut dalam halaqah-halaqah yang dipimpin oleh seorang *Shaikh*, dengan materi Ilmu tafsir, fiqh, tasawuf dan ilmu agama lainnya.[69]

Merasa cukup dengan "ngelmu" di kota Makkah selama satu tahun, ia pun akhirnya kembali ke tanah airnya, untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah di perolehnya. Hal itu terbukti, ketika ia mencoba melakukan pembaharuan sistem pengajaran yang ada di pesantren Tebuireng. Sebuah sistem pengajaran yang mencoba memadukan ilmu yang berbeda yaitu ilmu umum dan agama. Artinya KH. Wahid Hasyim berorientasi ke depan bahwa sudah selayaknya seorang santri itu, di samping mengerti ilmu agama sebagaimana yang diajarkan di pesantren, juga mengerti ilmu umum lainnya. Untuk maksud itulah kemudian ia mendirikan madrasah Nidamiyah, yang untuk ukuran waktu itu dinilai sangat kontroversial.

Apa yang dilakukannya merupakan bentuk komitmennya terhadap peningkatan kualitas sumberdaya umat Islam melalui pendidikan khususnya pesantren. Dari sini dapat dipahami, bahwa kualitas manusia muslim sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas jasmani, rohani dan akal. Kesehatan jasmani dibuktikan dengan tiadanya gangguan fisik ketika berkatifitas. Sedangkan kesehatan rohani dibuktikan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan

---

[68] "Wahid Hasyim", IAIN Syarif Hidayatullah (ed), Ensiklopedi Islam (Jakarta : Djambatan,tt), 978-979

[69] Atjeh,Sejarah KH. A.Wahid Hasyim ...,86

nyata. Disamping sehat jasmani dan rohani, manusia muslim harus memiliki kualitas nalar (akal) yang senantiasa diasah sedemikian rupa sehingga mampu memberikan solusi yang tepat, adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Mendudukkan para santri dalam posisi yang sejajar, atau bahkan bila mungkin lebih tinggi, dengan kelompok lain agaknya menjadi obsesi yang tumbuh sejak usia muda. Ia tidak ingin melihat santri berkedudukan rendah dalam pergaulan masyarakat. Karena itu, sepulangnya dari menimba ilmu pengetahuan, dia berkiprah secara langsung membina pondok pesantren asuhannya ayahnya.

Pertama ia mencoba menerapkan model pendidikan klasikal dengan memadukan unsur ilmu agama dan ilmu-ilmu umum di pesantrennya. Ternyata uji coba tersebut dinilai berhasil. Karena itu ia kenal sebagai perintis pendidikan klasikal dan pendidikan modern di dunia pesantren.

Untuk pendidikan pondok pesantren Wahid Hasyim memberikan sumbangsih pemikirannya untuk melakukan perubahan. Banyak perubahan di dunia pesantren yang harus dilakukan. Mulai dari tujuan hingga metode pengajarannya. Dalam mengadakan perubahan terhadap sistem pendidikan pesantren, ia membuat perencanaan yang matang. Ia tidak ingin gerakan ini gagal di tengah jalan. Untuk itu, ia mengadakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya
- Menggambarkan cara mencapai tujuan itu
- Memberikan keyakinan dan cara, bahwa dengan sungguh-sungguh tujuan dapat dicapai.

Pada awalnya, tujuan pendidikan Islam khususnya di lingkungan pesantren lebih berkosentrasi pada urusan ukhrawiyah (akhirat), nyaris terlepas dari urusan duniawiyah (dunia). Dengan seperti itu, pesantren didominasi oleh mata ajaran yang berkaitan dengan fiqh, tasawuf, ritual-ritual sakral dan sebagainya.

Meski tidak pernah mengenyam pedidikan modern, wawasan berfikir Wahid Hasyim dikenal cukup luas. Wawasan ini kemudian

diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan. Berkembangnya pendidikan madrasah di Indonesia di awal abad ke-20, merupakan wujud dari upaya yang dilakukan oleh cendikiawan muslim, termasuk Wahid Hasyim, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam (pesantren) dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Apa yang dilakukan oleh Wahid Hasyim adalah merupakan inovasi baru bagi kalangan pesantren. Pada saat itu, pelajaran umum masih dianggap tabu bagi kalangan pesantren karena identik dengan penjajah. Kebencian pesantren terhadap penjajah membuat pesantren mengharamkan semua yang berkaitan dengannya, seperti halnya memakai pantolan, dasi dan topi, dan dalam konteks luas pengetahuan umum.

Dalam metode pengajaran, sekembalinya dari Mekkah untuk belajar, Wahid Hasyim mengusulkan perubahan metode pengajaran kepada ayahnya. Usulan itu antara lain agar sistem bandongan diganti dengan sistem tutorial yang sistematis, dengan tujuan untuk mengembangkan dalam kelas yang menggunakan metode tersebut santri datang hanya mendengar, menulis catatan, dan menghafal mata pelajaran yang telah diberikan, tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berdikusi. Secara singkat, menurut Wahid Hasyim, metode bandongan akan menciptakan kepastian dalam diri santri.

Perubahan metode pengajaran diimbangi pula dengan mendirikan perpustakaan. Hal ini merupakan kemajuan luar biasa yang terjadi pada pesantren ketika itu. Dengan hal tersebut Wahid Hasyim mengharapkan terjadinya proses belajar mengajar yang dialogis. Dimana posisi guru ditempatkan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendapat guru bukanlah suatu kebenaran mutlak sehingga pendapatnya bisa dipertanyakan bahkan dibantah oleh santri (murid). Proses belajar mengajar berorientasi pada murid, sehingga potensi yang dimiliki akan terwujud dan ia akan menjadi dirinya sendiri.

B. Memasuki Dunia Organisasi

Jangan ada orang yang memasuki suatu organisasi atau perhimpunan atas dasar kesadaran kritisnya. Pada umumnya orang yang aktif dalam sebuah organisasi atas dasar tradisi mengikuti jejak kakek, ayah, atau keluarga lain, karena ikut-ikutan atau karena semangat primordial. Tidak terkecuali bagi kebanyakan warga NU. Sudah lazim orang masuk NU karena keturunan; ayahnya aktif di NU, maka secara otomatis pula anaknya masuk dan menjadi aktivis NU. Kelaziman seperti itu agaknya tidak berlaku bagi Wahid Hasyim. Proses ke-NU-an Abdul Wahid Hasyim berlangsung dalam waktu yang cukup lama, setelah melakukan perenungan mendalam. Ia menggunakan kesadaran kritis untuk menentukan pilihan organisasi mana yang akan dimasuki.

Waktu itu April 1934, sepulang dari Mekkah, banyak permintaan dari kawan-kawannya agar Abdul Wahid Hasyim aktif dihimpunan atau organisasi yang dipimpinnya. Tawaran juga datang dari Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun-tahun itu di tanah air banyak berkembang perkumpulan atau organisasi pergerakan. Baik yang bercorak keagamaan maupun nasionalis. Setiap perkumpulan berusaha memperkuat basis organisasinya dengan merekrut sebanyak mungkin anggota dari tokoh-tokoh berpengaruh. Wajar saja jika kedatangan Wahid Hasyim ke tanah air disambut penuh antusias para pemimpin perhimpunan dan diajak bergabung dalam perhimpunannya. Ternyata tidak satupun tawaran itu yang diterima, termasuk tawaran dari NU.

Apa yang terjadi dalam pergulatan pemikiran Abdul Wahid Hasyim, sehingga ia tidak kenal secara cepat menentukan pilihan untuk bergabung di dalam satu perkumpulan itu? Waktu itu memang ada dua alternatif di benak Abdul Wahid Hasyim. Kemungkinan pertama, ia menerima tawaran dan masuk dalam salah satu perkumpulan atau partai yang ada. Dan kemungkinan kedua, mendirikan perhimpunan atau partai sendiri.

Di mata Abdul Wahid Hasyim perhimpunan atau partai yang berkembang waktu itu tidak ada yang memuaskan. Itulah yang menyebabkan ia ragu kalau harus masuk dan aktif di partai. Ada

saja kekurangan yang melekat pada setiap perhimpunan. Menurut penilaian Abdul Wahid Hasyim, partai A kurang radikal, partai B kurang berpengaruh, partai C kurang memiliki kaum terpelajar, dan partai D pimpinannya dinilai tidak jujur. "di mata saya, ada seribu satu macam kekurangan yang ada pada setiap partai," tegas Abdul Wahid Hasyim ketika berceramah di depan pemuda yang bergabung dalam organisasi Gerakan Pendidikan Politik Muslim Indonesia.

Setelah beberapa lama melakukan pergulatan pemikiran Wahid Hasyim akhirnya menjatuhkan pilihannya ke NU. Meskipun belum sesuai dengan keinginannya, tapi dianggap NU memiliki kelebihan dibanding yang lain. Selama ini organisasi-organisasi dalam waktu yang pendek tidak mampu untuk menyebar keseluruh daerah. Berbeda dengan NU dalam waktu yang cukup singkat sudah menyebar hingga 60% di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah yang dianggap oleh Wahid Hasyim kelebihan yang dimiliki oleh NU.

Dengan pemikiran seperti itu, maka pilihan terhadap organisasi NU lebih didasari oleh sebuah tanggung jawab moral yang ia rasakan, bahwa untuk mengubah sebuah kondisi masyarakat, tidak hanya dilakukan di dalam ruangan, melainkan masyarakat yang paling bawah. Hal itu tampak pada upayanya untuk mendirikan organisasi Ikatan Pelajar Islam (IKPI) pada tahun 1936 . Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1938 ia dipercaya sebagai pengurus NU ranting Tebuireng, Jombang, yang selanjutnya terus meningkat menjadi anggota pengurus besar NU yang berkedudukan di kota Surabaya, di mana ia diberikan amanat untuk membidani Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LPMNU)[70].

C. Dari Pesantren Untuk Bangsa ; Menapak ke Jalur Politik

Aktivitas keorganisasian yang ia lalui, ternyata tidak hanya terbatas di bidang sosial kemasyarakatkan melainkan juga di bidang

---

[70] Atjeh,Sejarah KH.A. Wahid Hasyim ...,161

politik. Hal itu terlihat pada tahun 1940 ia terpilih menjadi ketua MIAI[71] (*Majelis Islam A'la Indonesia*). Genap empat tahun kemudian (1944) ia ---mewakili ayahnya--- ditunjuk sebagai pimpinan shumubu, Kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1943[72]. Selanjutnya iapun terpilih sebagai anggota BPUPKI, kemudian menjadi anggota panitia 9 dalm sub komite badan tersebut, yang bertugas merumuskan rancangan pembukaan UUD 1945.

Dengan dinyatakannya, kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, ternyata membawa 'imbas' pada karir politiknya semakin meroket, yaitu dengan ditunjuknya ia menjadi Menteri Negara pada masa Kabinet Syahrir tahun 1946-1947. Tepat tanggal 20 desember 1950 ia diangkat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Hatta, yang untuk selanjutnya jabatan tersebut bertahan selama berturut-turut, yaitu di masa Kabinet M. Natsir (1950-1951) dan masa Kabinet Sukiman (1951-1952).[73] Selama menjabat Menteri Agama, ada beberapa upaya yang telah dilakukan Gus Wahid, yaitu :

---

[71] Setahun kemudian Wahid Hasyim mengundurkan diri. Keputusan itu diambilnya sesuai konferensi MIAI dan Konggres Muslimin Indonesia III yang membicarakan perbedaan paham antara GAPI dan MIAI mengenai Indonesia berparlemen. Pendapat lain menyatakan pengunduran itu disebabkan beliau memenuhi panggilan ayahnya untuk mengembangkan Pesantrren Tebuireng milik ayahnya. Lihat "Wahid Hasyim" Ensiklopedi ..., 164. Bandingkan dengan H.J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945* (Netherland : The Hague, 1958), 98

[72] Kantor Urusan Agama (Shumubu) adalah pengganti dari Kantor Voor Inlandshe Zaken yang sudah ada pada zaman kolonial Belanda , tapi kantor itu kemudian dikembangkan bidang tugasnya, sehingga mengurus berbagai masalah yang sebelum terbagi diantara Departemen Dalam Negeri , Kehakiman, Pendidikan dan Peribadatan Umum (*Binnenlandshe Bestuur, Justitie dan Onderwijs en Ecrediensy*). Untuk penetapan jabatan kali pertama oleh pemerintah Jepang dipercayakan kepada seorang Indonesia. Lihat BJ.Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta : Grafiti Press, 1985), 12. Lihat juga Benda, *The Crescent..., 126,201*

[73] "Wahid Hasim". IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi*...,979-980

1. Mendirikan Jam'iyatul Qurra wal Huffadz
2. Menetapkan tugas kewajiban kementerian agama melalui keputusan pemerintah nomor 8 tahun 1950.
3. Merumuskan dasar-dasar peraturan perjalanan haji di Indonesia.
4. Menyetujui berdirinya PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dalam kementerian agama.

Terobosan pemikirannya ternyata tak sepanjang usia yang dimilikinya, tepatnya tanggal 19 April 1953 K.H. Abdul Wahid Hasyim meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di daerah Bandung. Ia dikebumikan di desa kelahirannya Tebuireng, Jombang, dengan meninggalkan seorang istri, Solihah dan keenam anaknya antara lain ; Abdurrahman ad-Dachil (Gus Dur), Aisyah, Salahuddin al-Ayyubi (Gus Sholah), Umar Wahid, Chadijah dan Hasyim Wahid.[74]

Meski Gus Wahid telah meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, 39 tahun, namun kecerdasan dan kemampuannya dalam berorganisasi cukup diakui oleh banyak kalangan. Ia disegani oleh lawan dan kawan, sebagaimana pernyataan yang pernah dilontarkan oleh H.M. Isa Anshari, seorang ketua organisasi PERSIS, "bahwa sosok K.H. Abdul Wahid Hasyim adalah sosok pemimpin yang tenang dab dapat menyatukan berbagai aspirasi. Dia adalah organisator yang ulung, pandai dan bijaksana dalam memainkan "kartu" perjuangan."[75] Karena kehandalannya itulah Greg Borton pernah menyatakan, "seandainya saja Wahid Hasyim tidak meninggal dunia dalam kecelakaan tahun 1953, mungkin situasinya akan berbeda...."[45] Pernyataan itu "mungkin" didasari oleh ide-ide yang pernah dilontarkan Wahid Hasyim semasa hidup, yang dianggap Borton sangat kental dengan nuansa progresivitas. Karena itu pula Zamakhsyari Dhofier menyebut Wahid Hasyim

---

[74] Umam, "*Wahid Hasyim...,83-113*

[75] Ibid, Lihat juga Atjeh, *Sejarah Hidup. KH. Wahid Hasyim*

[45] Zaini, Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim..., 30. Lihat juga Greg Borton, "Indonesia's Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid as Intelectual Ulama; The meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in Neo Modernirst Thought" *Studia Islamika* Vol 4 no. 1 (1997) : 40

sebagai seorang tokoh penghubung peradaban pesantren dengan peradaban Indonesia modern[76].

Dengan meninggalnya KH. Abdul Wahid Hasyim bangsa Indonesia telah kehilangan putra terbaiknya, akan tetapi ada satu hal yang patut dicatat dari diri KH. Abdul Wahid Hasyim, berupa peninggalannya yang boleh di kata cukup tinggi nilainya, yakni beberapa karya tulisnya yang tersebar di berbagai media saat itu. Memang selama hidupnya salah satu ciri yang melekat dalam diri KH. Abdul Wahid Hasyim adalah kecintaannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun sebagian karya tulisnya dapat ditemukan dalam sebuah kumpulan tulisan yang dieditoriali oleh Aboebakar Atjeh,[77] yaitu :

- *Nabi Muhammad dan Persaudaraan Manusia*
- *Kebangkitan Dunia Islam*
- *Beragamalah dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan*
- *Islam antara Materialisme dan Mistiek*
- *Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang*
- *Umat Islam Indonesia dalam Menghadapi Perimbangan Kekuatan Politik Dari Partai-partai dan Golongan – golongan.*
- *Menyongsong Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke 8*
- *Apakah Meninggalnya Stalin Membawa Pengaruh pada Umat Islam ?*
- *Di Belakang layar Perebutan Kekuasaan Nadjib di Mesir*
- *Masyumi Lima Tahun*
- *Mengapa Saya Memasuki NU*
- *Analyse Kelemahan Penerangan Islam*
- *Fanatisme dan Fanatisme*
- *Siapa yang Akan Menang dalam Pemilu yang Akan Datang*
- *Kedudukan Ulama dalam Masyarakat*
- *Umat Islam Indonesia Menunggu Ajalnya, Tapi Pemimpin-pemimpinnya Tidak Tahu*

---

[76] Lihat Zamakhshari Dhofier, "KH. A. Wahid Hasyim Rantai Penghubung Peradapan Pesantren dengan Peradaban Indonesia Modern " *Prisma* 8 (1984) : 73-81

[77] Atjeh , *Sejarah Hidup KH .A. . Wahid Hasyim...*

- *Tuga Pemerintah terhadap Agama*
- *Membangkitkan Kesadaran Beragama*
- *Melenyapkan yang Kolot*
- *Dan lain-lainnya*

BAGIAN -4-

ISLAM MODERAT ; SEBUAH PILIHAN RASIONAL TEOLOGIS

KH. Abdul Wahid Hasyim merupakan penulis produktif, sebagian besar tulisan yang dihasilkan berbentuk artikel dengan tema yang beragam, dan tersebar di beberapa media massa. Karena itulah untuk mengungkap secara keseluruhan pemikiran KH. Abdul Wahid Hasyim tidaklah mudah.

Memperhatikan kondisi tersebut, bagian ini akan dikupas beberapa pemikiran keislamannya yang melandasi moderasi keberislamannya sehingga menjadikan KH. A. Wahid Hasyim begitu mudah "menyesuaikan" dengan realitas kekinian, tanpa harus menjadikan diri larut di dalamnya tanpa dasar teologi yang jelas. Sebagai pondasi pemikiran, maka beberapa intisari pemikiran KH. A. Wahid Hasyim akan ditampilkan dalam bab ini, yang meliputi kedudukan akal dan agama, Islam dan persaudaraan manusia serta Penerangan Islam, di samping itu penulis juga memberikan atau mengemukakan bebepa pemikiran Islam dari berbagai kalangan sebagai sarana untuk memperjelas wawasan keislaman yang dimiliki KH. Abdul Wahid Hasyim.

A. Kedudukan Akal dan Agama (Wahyu) Dalam Islam

Menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, keberagamaan seseorang menjadi lebih bermakna manakala akal seseorang tersebut diikutsertakan. Baragama bukanlah kepatuhan tanpa kesadaran, yang menghilangkan sisi rasionalitas manusia, namun beragama merupakan kepatuhan hakiki manusia, yang melibatkan

komponen rasio dan nurani manusia secara integratif[78]. Oleh karena itu, dalam konteks Islam sangat mustahil jika Allah SWT menurunkan agama hanya untuk menghilangkan sisi rasionalitas manusia, dan hadirnya Islam sebagai agama samawi bukan sebagai penghilang rasionalitas melainkan sebagai penumbuh dan penyubur rasionalitas manusia.

Melihat sifat dan karakteristik dasar Islam itulah, menurut Wahid Hasyim, Islam menjadi begitu cepat diterima manusia di mana saja, Ia bagaikan bibit yang kuat yang dapat tumbuh dengan subur di tempat manapun, dengan kata lain bahwa sebagai agama, ternyata Islam sangat menghargai kedudukan akal manusia yang hal itu, lanjut Wahid Hasyim tampak pada "redaksi" yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadith, di mana isi dari redaksi tersebut memiliki kekuatan untuk memerintahkan manusia agar senantiasa berpikir dan menggunakan akal secara maksimal dalam bentuk pengkajian bahkan menyelidiki dengan tujuan menemukan kebenaran ajaran Islam itu, seperti tampak uraian penjelasan pada salah satu tulisan KH. Abdul Wahid Hasyim;

> "... Apakah sebabnya bibit Islam jadi kuat ?. Sebabnya ialah karena Islam berdasarkan wahyu ilahi yang selaras dengan akal dan otak sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, " Tidak terdapat agama bagi orang yang tidak berakal". .... Islam bukan saja menghargai akal dan otak yang sehat, tetapi juga menganjurkan orang, supaya menyelidiki, memikir dan mengupas segala ajaran-ajaran Islam. Hal itu dianjurkan Islam, karena Islam memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat-sehat. Islam tahu bahwa pengajaran-pengajarannya adalah tahan uji, karenanya ia tidak takut pengajaran-pengajarannya itu diselidiki orang."[79]

---

[78] A. Wahid Hasyim. "Islam Agama Fitrah (Dasar Manusia)", *Soera Moeslimin Indonesia,* no. 1 Tahun II 1 Januari 2604. 3-4

[79] A. Wahid Hasyim, "Kebangkitan Dunia Islam" *Mimbar Agama,* III dan IV (Maret April. 1951), 28.Sehubungan dengan hal tersebut, firman Allah SWT dalam al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa beragama harus menggunakan akal pikiran, seperti pada surat al-Saba' ayat 46, " *Katakanlah :*

Mengingat begitu tingginya penghargaan Islam terhadap potensi akal yang dimiliki manusia, tak heran jika dalam pemikiran Islam posisi akal begitu menonjol yakni lanjut Wahid Hasyim, sebagai pondasi utama setelah wahyu yang memiliki kemamapuan dalam menentukan kebenaran, dan karenanya pula, jika sesuatu dianggap atau menurut logika tidak benar, maka Islampun akan mengatakan hal yang sama pula;

> "Dalam Islam... logika adalah pokok yang penting bagi menentukan benar atau salah. Sesuatu hal atau suatu kejadian atau suatu peristiwa yang menurut logika tidak dapat diterima, maka di dalam anggapan Islam tidak diterima juga. Islam tidak menyukai segala yang tidak tunduk pada logika."[80]

Namun demikian, beliau juga mengingatkan akan keterbatasan akal, artinya sekuat dan setinggi apapun potensi akal yang dimiliki seseorang, akan memiliki kelemahan paling tidak setiap melakukan aktivitas pemikiran akal selalu membutuhkan objek yang dapat diindera oleh manusia, padahal tidak semua objek pemikiran dapat disentuh oleh indera manusia. Karena keterbatasan itulah bukan berarti akal kemudian harus ditundukkan atau dikungkung dengan oleh agama (wahyu), melainkan akal harus didampingi dan dilengkapi oleh agama (wahyu). Mengapa demikian, lanjut beliau , jika akal tidak didampingi agama (wahyu), maka yang terjadi akal menjadi *kebablasan* dalam arti manusia akan

---

Sesungguhnya Aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu, menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri, Kemudian kamu pikirkan". Dalam surat al-Zumar ayat 9 juga ditegaskan perbedaan mencolok antara keberagamaan seseorang yang menggunakan akal (ilmu) dengan yang tidak menggunakan. *"...Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran".*

[80] Saiful Umam, "KH Wahid Hasyim; Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed) *Menteri-Meneter Agama Ri; Biografi Sosial Politik* (Jakarta : INIS dan Depag RI, 1998), 83-113

terjebak pada upaya pendewaan akal yang dikendalikan oleh hawa nafsu.

Kondisi yang demikian itu menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, baik langsung maupun tidak siapapun harus berhati-hati agar tidak begitu saja menjadikan akal sebagai sesuatu yang super. Jika itu masih tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah kearogansian manusia yang muncul, merasa paling berkuasa, bahkan tak jarang manusia seperti itu tak segan-segan melakukan kemudharatan terhadap sesamanya sesamanya, karena obor yang menjadi penerang hati mereka telah mati

> Allah Maha Besar ; manusia adalah makhluk yang dibuat Dia dalam keadaan lemah; dahulu mereka merasai kelemahannya itu, dan kini mereka setelah mencoba otaknya yang dapat mengimbangi kelemahannya itu dengan kekuatan buatan, lalu timbul pembalikan jiwa (kompensasi), dengan perasaan sombong. Allah Maha Besar; Dia lalu menghukum manusia yang sombong itu dengan mencabut ketentraman batinnya ; dan karena itu timbul curiga mencurigai antara sesama manusia, kemudia timbul persaingan dan perbutan hidup ; dan setelah masing-masing tidak mau menyelesaikan perebutannya itu dengan damai, maka sepakatlah mereka mencari hakim yang dapat memberikan keputusan ; sayang sekali hakim itu setelah datang untuk mengadili, ternyata ia tidak lain daripada malaikat Izrail. Allah Maha Besar ; marilah kita ingat kebesaran-Nya, agar dapat kembalilah ketentraman kita[81].

Sementara itu, kondisi yang sama akan juga dialami oleh seseorang yang hanya mengandalkan wahyu (agama) tanpa pelibatan akal dalam keberagamaannya, manusia tersebut tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam beragama. Ia tidak akan pernah mengerti kebenaran ajaran agama secara hakiki dan

---

[81] A. Wahid Hasyim, "Beragamalah dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan" dalam Atjeh, *Sejarah KH.A. Wahid Hasyim...*, 687-693

mandiri, yang ada hanya ketertundukan dan kepatuhan yang tidak utuh, parsial, semuanya berdasarkan "katanya" bukan dari hasil kajian dan pemikiran yang mendalam, dan kondisi seperti itulah yang menurut Wahid Hasyim dikatakan sebagai sebuah bentuk ketidaksehatan dalam beragama (taklid buta). Keberagamaan seseorang menjadi tidak jelas, mana yang shāriat mana yang bukan shāriat, karena mereka tidak memiliki kemampuan (ilmu) untuk membedakannya. Penyebab ketidaksehatan beragama, menurut beliau dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu ; *pertama*, secara internal karena terjadi kebekuan pemikiran seseorang. *Kedua,* secara ekstern hubungan dengan kolonial, artinya umat Islam tidak secara leluasa mengkaji Islam secara lebih baik karena secara eksternal mereka mengalami ketertindasan dalam semua sektor kehidupan sebagai akibat dari kolonialisasi yang dilakukan oleh pihak penjajah[82].

Melihat kondisi seperti itu bagaimana baiknya agar keberagamaan yang dijalankan oleh seorang muslim menjadi lebih baik. Menurut beliau, perlu penyelarasan (*tawassuth*) antara akal dan agama (wahyu). Dengan penyelarasan itu, keberadaan akal akan digunakan untuk memikirkan ajaran-ajaran agama, sehingga diperoleh kebenaran dari agama itu, sedangkan keberadaan wahyu akan berguna untuk mengontrol "kerja" akal, dengan singkat kata penyelarasan atau penyeimbangan itu akan memberikan kemampuan bagi manusia untuk membedakan antara akal sehat dengan hawa nafsu.

Lontaran pemikiran dari KH. Abdul Wahid Hasyim itu merupakan jalan tengah alternatif. Artinya karena begitu penting dan fundamentalnya kedua komponen, yakni akal dan wahyu dalam keberagamaan seseorang maka keduanya harus berjalan seiring sejalan dan hal itu telah menjadi fitrah dari Allah SWT. Dengan demikian relasi kedua komponen itu sangat kuat, keduanya sesuatu yang *integrative komplementer* tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, dalam bahasa agama Islam ketika orang telah

---

[82] A. Wahid Hasyim, "Kebangkitan Dunia Islam" *Mimbar Agama,* III dan IV (Maret April. 1951), 28

sekuat tenaga mengerahkan kemampuannya (otaknya) secara maksimal, maka yang harus dilakukan kemudian adalah bertawakkal kepada Allah SWT. Satu sisi ada kewajiban bagi manusia untuk secara maksimal berikhtiar dengan mendayaoptimalkan akalnya, di sisi lain manusia harus menyerahkan sepenuhnya hasilnya upayanya tersebut kepada sang pencipta akal (tawakkal). Dengan demikian manusia akan selalu memiliki tingkat keberagamaan (iman dan akal) yang sehat secara konsisten sebagaimana penjelasan KH. Abdul Wahid Hasyim ;

> Dengan pengajaran yang demikian itu, bisa dijamin bahwa tiap-tiap orang Islam tidak akan kehabisan jalan. Sebab dengan begitu, kalau misalnya pada suatu masa akal telah buntu, fikiran telah bertumpuk, rationalisatle tidak dapat dipakai lagi, masih ada jalan yang tidak dapat ditutup, yaitu jalan berharap pertolongan Allah SWT[83]

Dengan pola pikir jalan tengah yang dikembangkan oleh KH. Abdul Wahid Hasyim yang meletakkan akal dan wahyu dalam satu "bingkai", saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Menurut HM. Rasyidi sangatlah tepat, artinya memang antara akal dan wahyu tersebut tidak bertentangan, dan keberadaannyapun saling memberikan "kontribusi" yang begitu berharga bagi manusia itu sendiri, sebagaimana yang dikatakannya:

> "Dengan perkataan lain, ahli agama pada umumnya mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu. Mereka mengatakan. Bahwa mereka menghadapi angapan-anggapan atau pengakuan-pengakluan tentang adanya wahyu, sedang macam-macam agama dan wahyu itu bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu untuk menghadapi hal-hal yang bertentangan ini akal harus dipakai untuk menemukan mana yang merupakan wahyu yang betul dan mana yang hanya pengakuan-pengakuan."[84]

---

[83] Ibid

[84] HM Rasyidi, *Filsafat Agama* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 21

Pernyataan yang diberikan oleh HM. Rosyidi tampak senada dengan Kuntowijoyo, meski dalam kemasan redaksi yang berbeda. Bagi Kuntowijoyo Islam itu tidak mengenal sistem *panteologisme*, yaitu sebuah pemikiran serba teologis yang cenderung meremehkan pemikiran rasio. Islam sangat menghargai rasio, kalaupun ada al-Qur'an yang bertindak sebagai al-furqan, sebagai pembeda kebenaran dari kepalsuan, namun keberadaannya tidak sampai membelenggu dan membatasi kerja akal manusia, justeru al'Qur'an memberikan ruang bebas bagi akal manusia untuk melakukan observasi empiris bahkan intuitif untuk memperoleh kebenaran wahyu itu. Di samping itu lanjut Kuntowijoyo, meski manusia memiliki kebebasan dalam mendayagunakan akal ---Islam memang memerintahkan---, namun manusia perlu petunjuk wahyu, untuk memberikan arahan bagi diri manusia sendiri dalam menyelenggarakan kehidupan yang benar secara totalitas. Dalam kaitan itu Kuntowijoyo mengatakan:

> "Manusia sebenarnya masih memerlukan petunjuk, karena sampai sekarang manusia terus menghadapi dilemma-dilema besar, yaitu dilemma-dilema yang berasal dari filsafat-filsafatnya, dari ideologi-ideologinya, dan dari pemikiran-pemikiran rasionalnya sendiri. Dilema-dilema itu dapat muncul misalnya dalam bentuk pilihan antara individualisme, atau kolektivisme antara faham *free will* atau paham *determinisme*, dan sebagainya. Persis karena dilemma-dilema itu tidak mungkin dipecahkan hanya oleh rasio manusia, hanya oleh sistem filsafat dan ideology yang dirumuskan manusia, maka petunjuk wahyu sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, petunjuk itu merupakan premis kebenaran yang dengannya manusia melakukan pilihan-pilihan. Tapi haraplah dicatat, bahwa penerimaan atas premis kebenaran itu tidak sama dengan *panteologisme.* Seluruh statemet wahyu al-Qur'an

bersifat *observable*, dan manusia diberi kebebasan untuk mengujinya."[85]

Sejalan dengan itu pula KH. Achmad Siddiq menyatakan bahwa dalam aqidah muslim harus menerapkan *tawassuth,* yaitu keseimbangan antara penggunaan pemikiran rasional dan dalil-dalil teks al-Qur'an dan al-Sunnah, yang pada intinya memberikan atau mencerminkan baik langsung maupun tidak ada langsung 'kewajiban' baik secara aqli maupun naqli bagi seorang muslim untuk membuktikan secara mandiri tentang ---paling tidak--- adanya ciptaan pasti ada yang mencipta, atau dengan kata lain keselerasan dalam menggunakan iman dan akal dalam keberagamaan seorang muslim menjadi begitu diperlukan, dan itu merupakan bagian integral dari dasar-dasar agama Islam (*usul al-Din*)[86].

Satu hal yang perlu ditekankan adalah pemikiran keseimbangan dari KH. Abdul Wahid Hasyim tersebut jika dicermati secara mendalam memberikan gambaran tingkat kemoderatan pemikiran beliau, dan itu merupakan ciri yang sangat menonjol dari seseorang yang menganut *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*[87], di mana dalam konteks pemikiran keagamaan, paham ini

---

[85] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung : Mizan, 1993),169

[86] Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama ; Biografi KH Hasyim Asy'ari (Yogyakarta : LkiS, 2000), 45

[87] Istilah ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dapat diartikan secara khusus dan umum. Secara umum pengertian berarti faham ahl al-sunnah dikonfrontir dengan aliran shi'ah sehingga masuk dalam pengertian ini golongan mu'tazilah dan yang lainnya. Sedangkan secara khusus pengertian ahl al-sunnah berarti identik dengan al-ash'ariyah dan maturidiah. Term al-sunnah mengandung dua pengertian, yaitu pertama, al-Tariqah atau mengikuti jalan sahabat dan tabi'in, kedua, al-Hadith atau memegang teguh hadith Nabi tanpa banyak melakukan ta'wil sebagaimana faham mu'tazilah. Sedangkan term Jama'ah berarti mayoritas (*'ammah al-Muslimin atau al-Jama'ah al-Kathir wa al-Sawad al-A'zam*) dikutip oleh Harun Nasution dari *kitab Tauhid* karya Sadr al-Shari'ah al-Mahbubi. Lebih lanjut lihat Harun Nasution, Teologi Islam (Jakarta : UI Presss, 1986), 64. Dalam kontek sejarah pemikiran Islam ahl al-Sunnah wa

lebih banyak mengembangkan keseimbangan (jalan tengah) antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio (*aqliyah*), sehingga sangat dimungkinkan para pemilik dan penganut pemikiran ini begitu akomodatif terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang hal itu tidak melawan doktrin keagamaan yang sifatnya dogmatis, Karena itu pula sikap-sikap toleransi terhadap tradisi begitu tampak dan menonjol

Sementara itu, secara historis model pemikiran tersebut, tampak memiliki benang merah atau keterkaitan dengan pemikiran Islam klasik yang dikembangkan oleh kalangan sunisme yang tercermin dari sosok al-Asy'ari[88] dan al-Maturidi[89] di mana kedua

---

al-Jama'ah ini muncul sebagai aliran pada masa pasca mihnah yaitu masa al-Mutawakkil(234-247 H). Aliran ini menurut Montgomery Watt diistilah dengan General Religious Movement. Lihat Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh : Edinburgh Univerity Prss, 1992), 21. Lihat juga Nurcholis Majid, "Warisan Inteletual Islam" dalam *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 26

[88] al-Ash'ari bernama lengkap Abu al-Hasan 'Ali Ibn Ismail al-Ash'ari, lahir di Basrah pada tahun 260 H atau 873 M, wafat di Baghdad tahun 324 H atayu 935 M. Ia merupakan murid dari al-Juba'I (mu'tazilah). Karena sesuatu hal al-Ash'ari keluar dari mu'tazilah dan mendirikan aliran yang diberi nama al-Ash'ariyah.

[89] al-Maturidi bernama lengkap Abu Manshur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi al-Samarkand al-Ansan. Lahir di Maturid sebuah daerah di Samarkand wilayah Transoxania di Asia Tengah dan wafat tahun 333 H atau 944 M. Lihat Ibrahim Madkour, *Aliran dan Teori Filsafat Islam* terj. Yudin Wahyudi, Yasmin (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 81. Pemikiran al-Maturidi sebenarnya ingin menjembatani pemikiran mu'tazilah dengan al-Ash'ari, sehingga jika diteliti secara cermat bahwa pemikiran al-Maturidi dekat dengan al-Ash'ari, juga dekat dengan pemikiran mu'tazilah. Namun demikian banyak kalangan menilai pemikiran al-Maturidi lebih rasional bila dibandingkan dengan al-Ash'ari. Abu Zahra, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (Jakarta : Logos, 1994), 212. Sementara itu Toshiko Izutsu menjelaskan perbedaan pemikiran dimaksud. Untuk al-Maturidi dengan al-Ash'ari tampak pada penjelasan Abu Udhbah dalam kitab Rawdah al-Bahiyyah, dengan menyatakan, "Berkenaan dengan wajibnya pengetahuan tentang Tuhan, tidak terdapat perselisihan sama sekali antara kedua kelompok tersebut, satu-satunya perbedaan adalah al-Ash'ari mengatkan ; Yang mewajibkan adalah wahyu atau hukum ilahi (Shar'), sedangan al-Maturidi mengatakan : karena

pemikir tersebut mencoba melakukan upaya sintesis terhadap dua pemikiran keagamaan yang menonjol saat itu, yaitu mereka yang mengedepankan akal (mu'tazilah[90]) dengan mereka yang mengedepankan wahyu dalam memahami dan menjalankan keberagamaan (Jabariah). Meski banyak kalangan menyatakan bahwa upaya sintesis yang dilakukan oleh al-Ash'ari terkadang tak dapat secara tegak berdiri tepat di tengah sekte tersebut, namun keberadaannya secara histories telah menyelamatkan teologi Islam dari ancaman Helenisme.

B. Islam dan Persaudaraan Manusia

Manusia adalah saudara sesama manusia, baik dia suka maupun tidak suka. Itulah konsep dasar Islam tentang manusia dan kemanusiaan, yang ditegaskan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam salah satu tulisannya yang berjudul "Nabi Muhammad dan Persaudaraan Islam." Meski sangat singkat redaksi konsep tersebut,

---

akal ('aql) wajibnya . Sedangkan perbedaan al-Maturidi dengan Mu'tazilah dapat dilihat juga dari kitab Rawdah al-Bahiyyah. Perbedaan antara Mu'tazilah dengan al-Maturidi adalah bahwa Mu'tazilah menganggap akal saja sudah cukup bagi diwajibkannya "pengetahuan", sedangkan al-Maturidiyah menganggap bahwa akal tidak lain adalah sebagai alat yang dengannya "pengetahuan" menjadi wajib, sedangkan yang sesungguhnya menjadikan wajib adalah Tuhan sediri. Dengan kata lain, Dia (menjadikan "pengetahuan" wajib) dengan menggunakan akal manusia sebagai alat. Lebih jauh lihat Toshihiko Izutsu, *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Silam ; Analisis Semantik Iman dan Islam* terj. Agus Fahri Husein (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), 123-132

[90] Aliran Mu'tazilah muncul pada abad I H sebagai akibat dari reaksi terhadap aliran khawarij yang sangat keras dan fanatik serta kelemahan kaum Murji'ah yang begitu kompromistik. Tokoh Mu'tazilah misalnya Wasil bin Atho (wafat 131 H). Doktrin Mu'tazilah dikenal dengan *Usul al-Khamsah*, yaitu *al-Tauhid* (kesempurnaan dan kemutlakan keesaan Tuhan), *al-Adl* (kemutlakan keadilan), *al-Wa'd wa al-Wa'id* (janji dan ancaman Tuhan), *al-Manzil bain al-Manzilatain* (posisi di tengah bagi yang berdosa besar), *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy an al-Mungkar* (kewajiban untuk mendorong pada tingkah laku baik secara efektif dan mencegah pada tindakan mungkar. Lihat Kamil Y Avdic, *Survey of Islamic Doctrine*, terj. Shonhaji Sholeh (Surabaya : Hikmah, 1991), 163

namun memiliki makna yang sangat mendalam, yakni pemahaman dan pengakuan Islam akan keberadaan manusia yang secara hakiki merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, yang harus dihormati, dihargai bahkan dilindungi hak-hak kemanusiaannya, meski ia berbeda baik secara etnis, jenis kelamin maupun keberagamaannya.

Dalam konteks historisitas Islam, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, junjungan Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sikap dan tindakan dalam menghargai manusia yang kondisinya masih jahiliyah. Waktu itu, yakni ketika peristiwa fath al-Makkah, lanjut KH. Abdul Wahid Hasyim, Nabi Muhammad SAW memberi pengampunan tanpa reserve yang begitu besar kepada kaum Qurays yang telah memperlakukan beliau sangat tidak manusiawi, bahkan mengusir beliau dari tanah kelahirannya. Ketika beliau mampu menduduki kota Makkah, di mana secara politis posisi beliau sangat begitu kuat, beliau tidak menggunakan posisi dominannya untuk menekan atau memaksa kaum Qurays untuk masuk dalam ajaran Islam[91]. Justru dengan posisi tersebut beliau memberikan kemerdekaan (ampunan) kepada kaum Qurays:

---

[91] Dari sudut pandang inilah kita harus memahami banyak penegasan dalam al-Qur'an bahwa agama tidak boleh dipaksakan, dan bahkan Nabi saw pun diperingatkan Allah untuk tidak memaksan agamanya kepada orang lain. Sebuah ayat suci yang paling banyak dikutip dalam kaitanini ialah yang artinya "Tidak boleh ada paksaan dalam agama "(al-Baqarah ayat 256), turun kepada Nabi saw setelah sating kepada beliau sepasang ayah ibu Muslim bekas Yahudi yang melaporkan bahwa anak mereka tidak mengikuti jejak mereka masuk Islam dan mereka berniat memaksanya. Dan peringatan Allah kepada Nabi saw untuk tidak memaksakan agamanya kepada orang lain ialah friman Allah yang artinya, " Jika sekarang Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang yang ada dibumi ini tanpa kecuali, apakah engkau akan memaksa umat manusia sehingga mereka menjadi beriman semua? (Yunus ayat 99). Di samping itu banyak penegasan kepada Nabi saw bahwa, "Berilah peringatan, sebab engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan engkau bukanlah orang yang menguasai manusia (Al-Ghasiyah ayat 21-22), dan "Dan tidaklah seorang rasul itu terbebani kewajiban selain menyampaikan seruan yang jelas" (al-Nur ayat 54), dan lain-lain. Berbagai penegasan serupa itu dalam kitab suci disertai dengan isyarat, baik eksplisit maupun implicit, bahwa manusia diberi kebebasan untuk menerima atau menolak seruan kebenaran

"...Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat kemenangan akhir yang memuaskan pada umat Islam, dengan dapat menduduki tempat kota markas lawannya, yaitu kota Makkah ......, maka dikumpulkannya pemimpin-pemimpin lawan beliau di satu tempat dan ditanya ; Cobalah pikirkan, apakah yang akan kukerjakan terhadap tuan-tuan semua ?. Mereka menjawab ; tentu tindakan yang baik. Tuan adalah saudara yang baik (jujur) dari keturunan yang baik. Beliau lalu mengambil putusan ; Pulanglah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan adalah merdeka dari tuntutan..."[92]

Sejak peristiwa fath al-Makkah itulah dan karena kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang selalu melandaskan diri pada nilai-nilai al-Qur'an termasuk di dalamnya nilai persaudaran antar sesama manusia, Islam menjadi tumbuh pesat. Penentangan yang selama ini dilakukan berbalik menjadi ketulusan dan kesadaran diri dalam memeluk ajaran Islam. Kekolotan menjadi persaudaraan, pelecehan dan penghinaan terhadap perempuan menjadi penghargaan terhadap perempuan. Kesemua perubahan yang terjadi pada masyarakat jahiliyah itu, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, pada hakekatnya merupakan hasil "kerja keras", di samping nilai-nilai perjuangan Islam sendiri yang selalu mengedepankan persaudaraan, keadilan dan kebaikan budi pekerti, rahmat li al-'alamin :

"…. Mestinya masyarakat jahiliyah di Makkah pada waktu itu mengalami nasib kehancuran..., Cuma alhamdulillah masyarakat jahiliyah dapat ditolong oleh Islam. Dengan bibit

---

para Nabi, suydah tentu dengan resiko yang harus ditanggung sendiri. Lihat Nurcholis Madjid, "Religiustas Masyarakat ; Mempertimbangkan Peran Kaum Cendikiawan " dalam *Masyarakat Religius* (Jakarta : Paramadina, 1997), 13

[27] A. Wahid Hasyim, "Nabi Muhammad dan Persaudaraan Islam." Dalam Atjeh, *Sejarah KH. A. Wahid Hasyim...*, 677-679

[92] A. Wahid Hasyim, "Nabi Muhammad dan Persaudaraan Islam." Dalam Atjeh, *Sejarah KH. A. Wahid Hasyim...*, 677-679

Islam yang kuat itu dan berkat kepemimpinan yang bijaksana dari pada Nabi kita, maka perubahan lalu terjadi. Pendirian yang kolot yang menentukan bahwa orang yang kuat memakan yang lemah, lalu dihilangkan dan diganti dengan pengajaran menurut hadith ; "Tidak masuk golongan kita (kaum muslimin) barang siapa yang tidak mengasihi orang yang kecil dari pada kita, dan tidak menghormati orang yang besar dari pada kita"....alhasil semua keburukan yang terdapat pada masyarakat jahiliyah berangsur-angsur lenyap dan diganti dengan keutamaan Islam yang pada hakekatnya tiada lain dari pada persaudaraan, keadilan dan kebaikan budi pekerti." [93]

Apa yang terurai dalam prinsip persaudaraan manusia itu, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari nilai agung Islam (*grand values*) rahmat li al-'alamin. Artinya prinsip persaudaraan manusia itu merupakan salah satu jabaran dari nilai rahmat li al-'alamin, di mana Islam melalui ajarannya selalu memberikan dan concern terhadap upaya pencapaian kedamaian dan ketentraman hakiki bagi seluruh alam semesta, termasuk dalam hal ini adalah bagi manusia.

Sebagai salah satu jabaran nilai rahmat li al-'alamin itu, dalam implementasinya menurut KH. Abdul Wahid Hasyim prinsip persaudaraan manusia ternyata memiliki dan mengandung nilai-nilai yang agung pula, yang meliputi toleransi, keadilan dan inklusivitas. Dengan demikian baik secara langsung atau tidak langsung prinsip persaudaraan manusia tersebut selalu diiringi dan beriringan dengan prinsip Islam yang lain, yakni toleransi (*tasamuh*), bersikap adil (*I'tidal*) dan tidak fanatik (*inklusivisme*).

---

[93] A. Wahid Hasyim, "Kebangkitan Dunia Islam" *Mimbar Agama*, III dan IV (Maret April. 1951), 28

1. Toleransi

Sikap toleran atau tasamuh adalah sikap menghargai terhadap wujudnya perbedaan pandangan, baik menyangkut keagamaan, kemasyarakatan dan kebudayaan. Dengan melekat dan tumbuhnya sikap ini pada diri, seseorang akan sadar bahwa orang lain tidak dapat dipaksa untuk mengikuti pandangannya. Karena itu sangat tidak dibenarkan seseorang yang toleran melakukan hujatan, pelecehan, dan caci makian, justru, dengan sikap ini seseorang harus belajar dan berupaya untuk menghargai dan menghormati.

Dalam konteks sejarah, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, Nabi Muhammad SAW. selalu mengembangkan sikap toleran dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Beliau berupaya menghormati dan menghidarkan diri untuk melakukan caci makian kepada orang-orang yang berbeda pemahaman keagamaanya, bahkan ketika semua orang yahudi melakukan penghinaan terhadap Nabi Isa AS, beliau melakukan pembelaan dengan memberikan pengakuan bahwa Nabi Isa adalah Rasul Allah SWT yang mulia.

> "..... Bukanlah Nabi Muhammad SAW itu yang menegakkan pengakuan pada Nabi Isa AS sebagai pesuruh Allah ?. Oleh orang yang hidup di jaman beliau yaitu orang yahudi, Nabi Isa bin Maryam AS itu digambarkan sebagai seorang yang jahat, berkelakuan buruk dan dari keturunan yang tidak baik. Tapi Nabi Muhammad SAW., beliau diakui sebagai pesuruh Allah yang mulia. Walaupun pada waktu itu kepentingan umat Islam dan penganut-penganut Nabi Isa bin Maryam AS bertentangan, tetapi Nabi Muhammad SAW, tidak kehilangan pertimbangan yang adil, dan mengakui kebenaran sebagai hakikat yang harus dipertahankan."[94]

Selain itu juga, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, dengan sikap ini orang menjadi begitu terbuka, dalam arti orang menjadi

---

[94] Wahid Hasyim, "Nabi Muhammad dan Persaudaraan Islam." Dalam Atjeh, *Sejarah KH. A. Wahid Hasyim...*, 677-679

tidak terbebani perasaan dan pikirannya akan perbedaan yang ditemui, bahkan tak jarang kedua belah yang saling berbeda tersebut akan senantiasa bekerja sama, asal tidak menyangkut masalah-masalah keberagamaan yang dianggap prinsip. Sekali lagi sejarah menurut KH. Abdul Wahid Hasyim telah membuktikan, bahwa meskipun Khalifah Harun Al-Rasyid maupun Khalifah al-Ma'mun adalah seorang raja beragama Islam taat, namun dalam hal penggunaan tenaga ahli, para khalifah tersebut merasa tak terhalangi untuk menggunakan tenaga ahli yang beragama Nasrani :

> "...Orang yang mempelajari Chalifah dari Harunur Rasyid (lahir pada tahun 763 dan meninggal tahun 809 Masehi) pasti mengetahui, bahwa dokter kepala padanya adalah seorang beragama masehi, dan bahwa kepala gedung perpustakaan Chalifah Ma'mun (lahir pada tahun 786 dan meninggal pada tahun 833), juga seorang Nasrani. Banyak sekali kedudukan-kedudukan yang penting diserahkan pada orang-orang di luar kalangan muslimin"[95]

Dengan demikian jelas, bahwa Islam begitu sangat mengembangkan sikap toleran kepada siapa saja. Artinya umat Islam senantiasa dididik untuk menjadi umat yang benar-benar menghargai dan menghormati sebuah perbedaan yang terjadi, bahkan bila perlu saling bekerja sama asal tidak sampai mengganggu nilai-nilai keberagamaan secara prinsipil.

2. Bersikap Adil

Dalam tulisan yang berjudul "Islam Agama Fitrah ; Dasar Manusia", KH. Abdul Wahid Hasyim mengungkapkan bahwa salah satu dasar atau alasan mengapa Islam dikatakan sebagai agama fitrah, agama yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah, karena Islam menegakkan keadilan. Keadilan seperti apakah yang ditegakkan oleh Islam ?, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, keadilan dalam segala hal, tidak ada pembedaan antara si

---

[95] Ibid

miskin dan si kaya, tidak ada perlakuan yang berbeda kepada seseorang meski berbeda agama, bahkan hukum harus ditegakkan, dengan kata lain persamaan perlakuan dalam segala hal menjadi sesuatu yang harus ditegakkan :

> "... Hal menegakkan keadilan itu perlu kepada pandangan yang sama terhadap halnya tiap-tiap orang. Maka Islam tidak membeda-bedakan si kaya dari si miskin. Semua dipandangnya sama... Junjungan besar kita dalam khotbahnya di waktu menjalankan haji yang penghabisan adalah menyebutkan ....' hai manusia semua !, barang siap pernah uangnya saya ambil, maka inilah uang saya, ambillah.! Barang siapa pernah saya pukul, meskipun sekali, maka hendaklah mengkisos (membalas) pada saya sebelum (pembalasan) hari kiamat.."[96]

Sementara itu konsep keadilan yang ditegakkan Islam menurut KH. Abdul Wahid Hasyim bukanlah omong kosong belaka yang hanya digunakan untuk menarik simpatik manusia agar tertarik untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Tapi konsep tersebut benar-benar dijalankan secara praksis, proporsonal dan tidak diskriminatif, tidak sebagaimana propaganda yang selama ini didengung-dengungkan oleh negara-negara Barat:

---

[96] A. Wahid Hasyim. "Islam Agama Fitrah (Dasar Manusia)", *Soera Moeslimin Indonesia,* no. 1 Tahun II 1 Januari 2604. 3-4. Melihat substansi keadilan yang dilontarkan KH. A. Wahid Hasyim tampak ada kesesuaian dengan pandangan Asghar Ali Engineer, yang menyebutkan bahwa dalam masalah keadilan kata kunci yang digunakan al-Qur'an adalah 'adl dan qist. 'Adl dalam bahasa Arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan sawiyyat. Kata itu juga mengandung makna penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur (kejahatan dan penindasan). Qist mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran dan kewajaran. Taqassata salah satu kata turunannya, juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat. Lebih Jauh lihat Ashghar Ali engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 59-60

> Pengajaran-pengajaran Islam bukanlah kosong begitu. Di dalam Islam ada ketentuan, bahwa orang bersalah, haruslah dihukum, haruslah mengembalikan barang orang lain. Ketentuan yang demikian bukanlah aturan kosong guna memikat hati orang, tetapi betul-betul dijalankan... seperti yang diceritakan oleh riwayat bagaimana orang-orang Kristen hidup dengan aman dan sentosanya di dalam lindungan negara Islam di abad pertengahan... Tidaklah Islam sekali-kali mengulang-ulang kata-kata keadilan itu sebagai propaganda kosong seperti yang diperbuat oleh negeri-negeri barat dan lainnya tentang demokrasi, persamaan dan lain-lainnya, tapi prakteknya jauh bertentangan dengan propaganda kosongnya itu !"[97]

Satu hal yang sangat terkait dengan prinsip keadilan adalah kejujuran. Bagi KH. Abdul Wahid Hasyim, kejujuran merupakan penopong utama bagi tegaknya keadilan. Artinya keadilan tidak dapat tercapai dengan baik dan maksimal, jika kejujuran tidak menjadi landasan. Karena itulah menurut KH. Abdul Wahid, kejujuran demi keadilan itu harus selalu ditegakkan, meski hal itu pahit dan merugikan diri, jika tidak ditegakkan, jangan harap keadilan dapat diwujudkan :

> "Sikap jujur walaupun merugikan diri sendiri diajarkan dan dijalankan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena sikap menangkan kepentingan diri sendiri, walaupun tidak jujur. Itulah pangkal segala kekacauan masyarakat. Bahkan itulah sebab yang penting yang membawa kebakaran dunia."[98]

---

[97] A. Wahid Hasyim, "Kebangkitan Dunia Islam" *Mimbar Agama*, III dan IV (Maret April. 1951), 28

[98] A. Wahid Hasyim, Nabi Muhammad dan Persaudaraan manusia" dalam Atjeh, Sejarah KH. A. Wahid Hasyim..., 677-679

3. Tidak Fanatik

Dalam tulisan yang berjudul "Melenyapkan Yang Kolot", "Fanatisme dan Fanatisme ", "Agama Dalam Indonesia Merdeka" KH. Abdul Wahid Hasyim menegaskan, bahwa Islam baik secara teoretik maupun praktik tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir, bertindak fanatik atau kolot. Penegasan itu penting, karena Menurut KH. Abdul Wahid Hasyim banyak masyarakat Indonesia (baca ; umat Islam) saat itu mulai "terjangkiti" sifat ini. Sebuah sikap yang mengedepankan aspek kedirian yang begitu dominan dan menolak "kedirian" yang lain, akibatnya orang akan merasa yakin paling benar, tidak ada kebenaran selain dari dirinya sendiri (ekstrem).

> "Di dalam sejarah seringkali kita jumpai perselisihan dan perbantahan. Jika kita teliti, tentu terdapat bahwa sebab perselisihan yang asli, biasanya tidak lain daripada sifat fanatik, ta'assub atau kekolotan dalam memegangi pahamnya. Dan biasanya sifat fanatik atau ta'assub itu lalu menimbulkan ta'assub atau fanatik dari pihak lawannya."[99]

Munculnya sifat seperti itu, menurut KH. Wahid Hasyim, disebabkan orang kurang begitu memahami istilah fanatisme atau kekolotan (ta'assub) itu. Akibatnya , orang menjadi begitu yakin dan percaya diri menggunakan istilah itu karena dianggap bahwa fanatik (ta'assub) merupakan bentuk keteguhan seseorang dalam memegang pendiriannya secara sadar (pengertian), padahal istilah itu hanyalah sebuah kepercayaan yang membabi buta terhadap suatu ajaran (paham pemikiran):

> "Fanatisme atau ta'assub ialah kepercayaan membabi buta terhadap sesuatu ajaran, dan menolak segala pendapat lain dari pada yang dianut. Kita seringkali mendengar anjuran orang, jangalah fanatik atau ta'assub, artinya janganlah

[99] A. Wahid Hasyim, "Agama Dalam Indonesia Merdeka"dalam Pitoyo Darmosugito, *Menjelang Indonesia Merdeka ; Kumpulan Tulisan tentang Bentuk dan Isi Negara Yang Akan Lahir* (Jakarta : Gunung Agung, 1982), 109-111

> memegang kepercayaan sendiri dengan cara membabi buta... kerapkali (juga) kita dengar orang salah mengartikan ta'assub itu. Dikiranya ta'assub ialah memegang teguh pendirian dengan pengertian. Pendirian yang teguh bukanlah fanatisme atau ta'assub, tetapi yang demikian itu adalah kesatriaan dan perasaan tanggung jawab yang penuh.."[100]

Satu hal lagi yang perlu dijelaskan, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim adalah bahwa kesalahan orang dalam menggunakan istilah tersebut, tidak hanya disebabkan ketidakmengertiaannya, melainkan juga karena faktor kesengajaan dari orang Barat (penjajah, red), yang telah merasa begitu sulit menembus keteguhan pendirian umat Islam, akhirnya mereka (baca ; penjajah) melakukan upaya penjungkirbalikkan logika kata. Ironisnya, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, banyak umat Islam yang terkecoh :

> " Timbulnya perkataan *ta'assub* (fanatisme) di dalam kalangan Islam ialah setelah orang Barat merasa tidak dapat menembus keteguhan pendirian umat Islam dengan cara hujjah (*argumentative*), lalu mencari akal menuduh umat Islam adalah fanatik (*ta'assub*). Sungguh amat disayangkan sekali diantara umat Islam ada yang tertipu dengan perkataan tadi. Dikiranya bahwa keteguhan mereka memegang pendirian yang didasarkan pengertian itu adalah fanatisme (*ta'assub*), lalu mulai segan memegang pendiriaannya menghadapi orang Barat. Mereka ini tidak insaf, bahwa tindakan fanatik yang dikenakan orang Barat pada Islam itu adalah akalan dan tipuan semata-mata..."[101]

Melihat kenyataan itu, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, umat Islam harus segera menanggalkan dan meninggalkan sifat-

---

[100] A. Wahid Hasyim, "Fanatisme dan Fanatisme" dalam Atjeh, *Sejarah KH. A Wahid Hasyim.....*, 749-750

[101] Ibid

sifat itu, karena memang sangat merugikan diri sendiri, dan secara factual Islam tidak mengenal istilah itu. Islam hanya mengajarkan agar umat berpikir jernih dan terbuka (inklusif) pada siapa saja meski mereka itu berbeda pemahaman bahkan kebergamaannya.

> "Islam tidak kenal fanatisme atau ta'assub itu. Ajaran-ajaran Islam menganjuri pemeluk-pemeluknya berpikir sehat dan bebas. Akan tetapi janganlah disangka bahwa dengan perkataan Islam tidak kenal fanatisme, ta'assub atau kekolotan itu, berarti bahwa agama Islam membonceng dan mengamini saja... Di dalam sejarah Rasulullah SAW tidak terdapat kejadian yang menunjukkan ta'assub atau kekolotan beliau. Menghadapi kaum Musyrikin Qurays, beliau tidak pernah mempertengkarkan pahamnya dengan kaum Qurays itu. Tetapi sebaliknya beliau terus menyusun tenaga dan mengatur barisan..."[102]

C. Penerangan Islam

Penggunaan istilah dakwah pada era KH. Abdul Wahid Hasyim kurang begitu popular. Saat itu orang lebih mengenal dengan penerangan Islam untuk menunjuk aktivitas dakwah yang dilakukan di kalangan orang Islam. meski secara redaksional berbeda, namun esensi dari aktivitas penerangan Islam tidak jauh berbeda dengan dakwah sebagaimana sekarang ini, yakni mengajak umat manusia ke jalan yang lurus (Islam), dengan cara dan metode tertentu.

Keberadaan penerangan Islam menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, teramat dibutuhkan, mengingat secara realitas empirik masih terdapat manusia-manusia yang tak sadar dan tak ingat akan Tuhannya. Ketidaksadaran hakiki manusia akan Tuhan dan dirinya sendiri itulah, menjadikan dirinya sebagai sosok yang arogan, merasa besar tanpa perlu pertolongan dari Tuhan dan manusia lainnya. Realitas seperti itu bagi KH. Abdul Wahid Hasyim harus

---

[102] Hasyim, "Agama Dalam Indonesia Merdeka"...., 109-111

segera disikapi, artinya menjadi suatu kewajaran dan alasan mengapa penerangan Islam perlu dilakukan, sebagaimana ungkapannya :

> "Manusia (mereka) meyakini bahwa di atas mereka semuanya ada Dia yang mengatur..., hanya saja, keinsafan pada adanya sang Maha Pengatur tidak berjalan terus, oleh karena manusia sudah merasa pandai, cakap sempurna, lalu bersikap sombong (arrogant) menyangkakan dirinya mempunyai tenaga raksasa yang tidak terbatas... Dia manusia menyangka bahwa segala soal hidup dapat dipecahkan dengan otaknya."[103]

Lebih dari itu, ketika kondisi telah seperti demikian, yang muncul adalah pendewaan akal menjadi begitu kuat di kalangan manusia, akibatnya dapat ditebak, manusia mulai bahkan sudah merasa tidak membutuhkan agama sebagai salah satu pedoman jalan hidupnya. Menurut KH. Abdul Wahid Hasyim , pendewaan akal dan penolakan terhadap agama pada dasarnya lebih didasari eoleh ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu, tidak ada kebijaksanaan dalam dirinya. Karena itulah, meski manusia berdalih bahwa cukup dengan otaknya saja manusia dapat menyelesaikan persoalan hidup tak perlu yang lain (agama, red), namun secara hakekat mereka tak pernah menggunakan akalnya yang sehat. Padahal, lanjut beliau, orang yang menggunakan akalnya secara sehat dan baik selalu dan pasti dibarengi dengan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu sumbernya dari hati nuraninya ;

> "Agama dan kepercayaan yang memberikan batasan pada otak dengan diam-diam telah ditolaknya (manusia). Dia menolak agama, karena ia (agama, red) memberikan batasan antara buah pikiran dan hawa nafsu. Dia, manusia sudah membuangkan perkataan Plato ; ... apabila seseorang

[103] A. Wahid Hasyim. "Beragamalah Dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan" dalam atjeh, *Sejarah Hidup KH.A Wahid Hasyim...*, 687-693

> mempunyai kebijaksanaan, maka hawa nafsunya akan membantu menguatkan otaknya dan apabila kebijaksanaanya tidak ada, maka otaknya akan membantu menguatkan hawa nafsunya. Dia (manusia) membuangkan kata Plato, karena terlebih dahulu sudah ada keputusan kata dalam hatinya, bahwa beratlah baginya meninggalkan hawa nafsu dan mengikuti kebenaran."[104]

Sementara itu, objek penerangan Islam yang lain, dalam hal orang yang telah mengakui dan menjalankan aktivitas keagamaan, "terkadang" juga mengalami hal yang sama. Artinya mereka ketika menjalankan keberagamaannya seringkali terjebak oleh hawa nafsunya. Agama selalu diposisikan dan terposisikan sebagai pelengkap pendirita. Agama digunakan manakala keberadaannya dirasa menguntungkan manusia secara sepihak, bahkan yang paling parah agama hanya dijadikan alat untuk memerangi lawan dan melindungi diri dengan berlindung pada doktrin-doktrin religius. Kondisi yang demikian itu menurut KH. Abdul Wahid Hasyim merupkan faktor kegagalan manusia dalam memosisikan agama atau kepercayaan bagi dirinya

> "Kegagalan manusia dunia yang telah menjadikan agama dan kepercayaan sekedar untuk pemikat dan penarikan mencari teman dan dalam menghadapi lawan, hendaklah menjadi pelajaran bagi manusia Indonesia. Pemakaian aga,a untuk maksud sesuatu yang ditujukan ke arah Allah SWT, tidak akan bermanfaat yang baik bagi pemakai sendiri maupun bagi orang yang terpikat olehnya, bahkan akan merusakkan dia sendiri."[405]

Dari gambaran yang dipaparkan KH. Abdul Wahid Hasyim, tampak siapa sebenarnya objek garapan penerangan Islam, atau dengan lain kata, bahwa sasaran objek penerangan Islam tidak

---

[104] Ibid
[405] Ibid

terbatas pada mereka yang mengalami "penyimpangan" saja, melainkan juga bagi mereka yang telah mengerti akan makna beragama, di mana hal yang kedua itu dimaksudkan untuk lebih mempertebal kemengertian mereka akan makna agama dan keberagamaan secara hakiki. Lebih jelasnya menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, objek garapan penerangan Islam dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ; *pertama*, masyarakat beragama atau masyarakat yang semangat beragama, termasuk dalam kelompok ini adalah kaum muslimin dan orang non muslim. *Kedua*, masyarakat yang tidak beragama atau masyarakat yang tidak bersemangat beragama, yakni orang-orang yang benar-benar tidak (mau) mengenal agama, apalagi bersemangat beragama (atheis)[106].

Dengan kondisi semacam itu, jelas sikap apa yang dapat ditentukan oleh para penganjur penerangan Islam, yaitu mengemas lebih baik lagi dan tertata semua aktivitas penerangan Islam agar hasil dan tujuan yang telah ditetapkan dapat diraih secara maksimal, yaitu terbetuknya manusia atau masyarakat yang dengan kesadaran tinggi menjalankan dan menerapkan ajaran Islam dalam semua sektor kehidupan.

Namun demikian, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, kondisi penerangan Islam yang ada di negara ini menunjukkkan perkembangan yang kurang memuaskan. Artinya seringkali penerangan Islam yang dilakukan kurang begitu terencana, bahkan tidak pembagian yang begitu jelas dalam melaksanakan penerangan

---

[106] Dalam kenyataannya kedua golongan dimaksud juga memberikan respon, sikap dan pandangan yang berbeda terhadap Islam, yang pertama, khususnya yang muslim lebih menghargai dan menyenangi setiap aktivitas penerangan Islam yang dilakukan, bahkan dengan kemampuan 'seadanya' mereka mencoba menerapkan ajaran Silam sesuai dengan kemampuannya. Untuk yang non muslim terkadang juga memperlihatkan sikap yang kurang menyenangkan terhadap aktivitas Islam. Sedangkan untuk golongn yang kedua mereka lebih bersikap memusuhi Islam dalam arti menganggap agama saingan besar, dan mereka juga berkeyakinan bahwa agama pada dasarnya menghalangi kebebasan yang dimiliki oleh seorang manusiaa. Lihat A. Wahid Hasyim, "Tugas Pemerintah Terhadap Agama" dalam Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim...*, 870-877

Islam, sehingga pesan-pesan Islam yang seharusnya sampai mengenai sasaran secara maksimal menjadi tidak sampai dan kurang maksimal. Kondisi yang demikian, lanjut KH. Abdul Wahid Hasyim, mengakibatkan umat menjadi kurang begitu memahami ajaran Islam secara baik, bahkan yang lebih parah umat mengalami kejenuhan yang begitu akut, sehingga jangankan mengikuti, mendatangi acara penerangan Islam yang dilakukan oleh pelaku penerangan Islam baik secara organisatoris maupun perorangan[107]. Terhadap persoalan dimaksud, ternyata KH. Abdul Wahid Hasyim memiliki beberapa catatan ---kalau tidak dikatakan sebagai auto kritik--- terhadap pelaksanaan penerangan Islam selama ini, yiatu[108]:

Pertama, tidak terkoordinasikannya dan tidak termanaj-nya tenaga-tenaga penerangan Islam saat itu, di mana hal itu berakibar pada semakin tidak jelasnya pelaksanaan, bahkan ada kecenderungan latah. Dalam konteks demikian KH. Abdul Wahid Hasyim melihat, seringkali organisasi penerangan Islam yang ada saat itu tidak mampu memetakan dan memberdayakan potensi yang dimilikinya. Kondisi yang demikian menyebabkan penerangan Islam yang dilakukan menjadi tidak jelas arahnya, malah tak jarang mengikuti arus angin atau bahasa KH. Abdul Wahid Hasyim "penerangan Islam telah kena penyakit latah (hysteria), di mana orang berbicara pancasila, penerangan Islam iku juga membicarakan, dan seterusnya."

Kedua, Penerangan Islam yang dilakukan oleh para da'I hanya terfokus pada aktivitas lisan (metode bi al-Lisan), tanpa mau memanfaatkan metode yang lain, misalnya menggunakan pamflet, slide, buku-buku dan lain-lain. Penerangan Islam yang mengandalkan ceramah dan sebangsanya perlu dirombak, artinya meski secara factual metode ceramah tergolong metode yang paling tua, namum ada baiknya menurut KH. Abdul Wahid Hasyim para juru penerang Islam memanfaatkan metode dan media selain lisan. Hal itu disebabkan, salah satunya adalah

---

[107] A. Wahid Hasyim "Analyse Kelemahan Penerangan Islam" dalam Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim.....*, 743-745

[108] Ibid

keunggulan metode dan media lain. Dengan demikian, penggunaan media dan metode selain lisan menjadi sesuatu yang harus dilakukan, agar target utama dari penerangan Islam dapat dicapat secara maksimal.

Ketiga, tidak adanya pemetaan sasaran penerangan Islam. Artinya para juru penerang Islam tidak dapat memetakan sasaran penerangan Islam (tingkat pemahaman keberagamaan) secara jelas, mana sasaran yang telah faham agama, dan mana yang belum bahkan tidak faham sama sekali akan ajaran agama. Dengan ketiadaan pemetaan sasaran penerangan Islam yang jelas, akhirnya penerangan Islam yang dilakukan hanyalah sebatas melaksanakan rutinitas kegiatan. Kondisi demikian lambat laun menyebabkan semakin tidak mengertinya umat akan makna hakiki keberagamaannya, umat menjadi jenuh terhadap pelaksanaan dan materi yang diberikan dalam penerangan Islam.

Keempat, Tidak terkoordinasikannya lembaga-lembaga penerangan Islam saat itu. Salah satu penyebab dari tidak terkoordinasikannya lembaga penerangan Islam yang ada, yaitu karena masing-masing lembaga merasa sudah cukup besar, merasa mampu sendiri sehingga tidak memerlukan bantuan dan koordinasi dari lembaga lain. Di samping itu menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, penyebab ketidakkompakkan itu, dipicu oleh banyaknya para tokoh Islam yang ada dan duduk di lembaga penerangan Islam itu terjebak pada semangat fanatisme yang berlebihan, sehingga tak heran jika satu sama lain saling mengunggulkan diri.[109] Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak, KH. Abdul Wahid Hasyim menolak dan membantah beberapa asumsi yang menyatakan bahwa kelemahan penerangan Islam saat itu karena kurangnya lembaga atau organisasi Islam.

---

[109] Hasyim, "Fanatisme dan Fanatisme"...., 749-450

BAGIAN -5-

ISLAM DAN NEGARA ; RELASI SALING MELENGKAPI

A. Nasionalisme

Dalam tulisan yang berjudul "Pendidikan Ketuhanan", KH. Abdul Wahid Hasyim pernah menyinggung persoalan nasionalisme[110]. Baginya nasionalisme yang merupakan kata kunci perjuangan bagi negeri-negeri terjajah termasuk Indonesia di pertengahan abad 19 adalah bukan filsafat, tapi sebuah perasaan mendahulukan sesuatu yang bertalian dengan bangsanya.

[110] Kata Nasionalisme berasal dari kata *"nation"* atau nasional, kata ini sebagai kata sifat dari kata pergerakan yang menunjukkan seluruh aktivitas dari pergerakan di semua lapangan penghidupan yang mempunyai tujuam yang sama, yakni berjuang melawan kekuasaan bangsa asing. Menurut H Kohn (1944) sebagaimana yang dikutip oleh Sartono, kata nasionalisme merupakan suatu *state of mind.* Jadi berarti bahwa sejarah pergerakan nasional terutama harus dianggap sebagai *history of ideas.* Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru ; Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (Jakarta : PT Gramedia, 1993), 227-230. Sementara itu menurut Azyumardi Azra, bahwa konsep nasionalisme di Asia tenggara (termasuk dalam hal ini Indonesia) bukanlah sesuatu yang baku, melainkan sebagai konsep yang dinamis yang mengalami perubahan sebagai hasil dari dialektika, baik dengan perubahan sosial, politik, ekonomi dalam negeri maupun dengan pada tingkat global. Karenanya menurut Azyumardi Azra , ada tiga tahap perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, yaitu ; *Pertama,* pertumbuhan awal dan kristalisasi gagasan nasionalisme, tahap ini ditandai dengan penyerapan gagasan nasionalisme yang diikuti dengan pembentukan organisasi-organisasi protonasinalisme. *Kedua,* nasionalisme yang sarat dengan muatan politis daripada social dan cultural. Tahap ini lebih mengedepankan *"nation and caracter building"* yakni memupuk keutuhan dan intergritas negara dan bangsa yang akan segera terwujud. *Ketiga,* nasionalisme, tahap ini mulai menggeser nasionalisme politik ke nasionalisme ekonomi. Lihat Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara ; Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), 108-112

Nasionalisme juga merupakan wadah semata-mata yang dapat diisi dengan macam-macam filsafat[111]. Dengan pandangannya tersebut, tampak KH. Abdul Wahid Hasyim hendak menyatakan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kata nasionalisme, yaitu pertama, ketika bangsa mengalami sesuatu yang membutuhkan bantuan tenaga, fikiran, jiwa bahkan raga, maka anak bangsa itu harus segera menjawab dan menyambutnya, artinya semua kepentingan apapun yang hendak dimunculkan harus diorientasikan terlebih kepada kepentingan negara. Kedua, mengingat kata itu hanyalah wadah yang dapat diisi oleh bermacam-macam pemikiran, maka "keadaannya" akan bergantung pada "jenis" pemikiran apa yang dapat disandingkan dengan kata itu, dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia menurut KH. Wahid Hasyim, Islam adalah "kata" yang dapat dipersandingkan dengan nasionalisme. Perjuangan bangsa Indonesia yang nota bene memiliki penduduk yang mayoritas Islam menurut KH. Abdul Wahid Hasyim dapat dikatakan memiliki "greget" yang tinggi, karena ditopang oleh semangat religiusitas (Islam)

Salah satu bentuk kongkrit makna nasionalisme yang dapat dimunculkan Menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, adalah. semangat dan kesadaran hakiki dari sebuah bangsa tertindas (Indonesia, red) untuk segera bangkit dan berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Karena itu, lanjut KH. Abdul Wahid

---

[111] KH. A. Wahid Hasyim, "Pendidikan Ketuhanan" dalam Atjeh, Sejarah Hidup KH.A. Wahid Hasyim..., 802-805. Dalam tulisan yang berbeda KH. A. Wahid Hasyim memberikan gambaran tentang sifat nasionalisme yang di pengaruhi berbagai pemikiran, dengan menyatakan bahwa, "nasionalisme sebenarnya di mana-mana sifatnya tidak bercorak (kleurloss); di negeri-negri yang masyarakatnya demokratis, maka nasionalisme itu bercorak demokratis ; di negeri-negeri yang masyarakatnya feodalistis, maka nasionalismenya bercorak feudal, di Indonesia yang kebanyakan terpelajarnya opportunisten, maka tidak heran jika pada satu masa nasionalismenya merupakan opportunime, lihat KH. A. Wahid Hasyim, "Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang" dalam atjeh,. Sejarah Hidup KH.A. Wahid Hasyim..., 697-707

Hasyim, kesadaran dan semangat itu tidak akan punya nilai jika tidak disertai tindakan nyata, yaitu berjuang baik secara fisik maupun non fisik secara totalitas dan strategis. Dalam kasus bangsa Indonesia KH. Abdul Wahid Hasyim melihat bahwa kemerdekaan yang diidam-idamkan selama ini tidak akan pernah diraih jika tidak dicapai dengan berjuang (nasionalisme). Tidak ada kata menunggu dan mengharapkan serta mengandalkan kemurahan bangsa penjajah, karena sejatinya mereka (baca; bangsa Eropa) menurut KH. Abdul Wahid Hasyim ketika mengalami perang dunia pertama keadaannya telah lemah.

> "Bangsa Eropa yang sudah kocar-kacir itu, sesudah perang tidak dapat memberikan kemerdekaan kepada rakyat Asia, jika rakyat tidak mendatangkan kemerdekaan itu tadi"[112]

Hanya dengan perjuangan sajalah menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, kemerdekaan itu dapat diraih dan dinikmati. Kalaupun kemerdekaan itu akan diberikan pihak penjajah, lanjutnya, sama halnya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa peminta-minta, bangsa yang tidak memiliki harga diri karena hanya mengharapkan belas kasihan bangsa lain, padahal selama ini penjajah tidak pernah memiliki rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan belas kasihan terhadap bangsa ini, mereka justru melakukan pemerasan dan pembodohan serta menjadikan "diri" bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kerdil yang tak mampu melakukan sendiri jika tidak dibantu orang lain.

> 'Kita tentu tidak dapat menghargai kenikmatan Allah SWT yang diberikannya dengan perantaraan Dai Nippon Teikoku, yaitu kemerdekaan di kemudian hari itu, jika kita tidak merasakan sungguh-sungguh bagaimana tidak enaknya bangsa yang hidup di dalam penindasan dan pemerasan dibawah penjajahan Belanda, sungguh hidup kita susah dan sengsara... Kaum penjajah itu sama sekali tidak memikirkan kemanusiaan, tidak mengenal keadilan, tidak tahu arti belas

---

[112] Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim...*, 147

kasihan. Mereka membikin anak-anak kita lupa dan bodoh tentang sejarahnya, lupa dan bodoh akan tentang kebesaran nenek moyangnya, lupa dan bodoh tentang nasib mereka di kemudian hari, lupa alan Tuhannya dan tidak tahu arah kiblatnya, di dalam lapangan ekonomi, sungguh nasib kita menyedihkan sekali dibawah penindasan mereka... Oleh daya upaya Belanda kita menjadi bangsa seperti anak-anak, yaitu selalu meminta-minta, selalu berharap belas kasihan orang lain, selalu mengusulkan ini dan selalu mengusulkan itu. Sekarang keadaannya berobah, maka kita harus mengubah sifat kita..."[113]

Lontaran KH. Abdul Wahid Hasyim tersebut secara tegas mencerminkan keinginannya untuk mengajak masyarakat Indonesia sadar diri, bahwa semangat nasionalime itu harus segera ditumbuhkembangkan dan sifat kekanak-kanakan yang selama ini "diajarkan" pihak penjajah harus diubah menjadi sifat orang dewasa yang mampu mengambil keputusan secara mandiri. Jika hal itu tidak ada dan tidak dilakukan menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, jangan harap kemerdekaan bangsa ini akan terwujud.

Untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, yaitu kemerdekaan hakiki ada satu hal yang perlu diperhatikan menurut KH. Abdul Wahid Hasyim yaitu persatuan yang kokoh di semua elemen bangsa Indonesia. Persatuan merupakan syarat mutlak bagi pencapaian kemerdekaan yang sempurna, sebagaimana dikatakannya, "bahwa kita bangsa Indonesia sekarang ini belum memperoleh kemerdekaan, keutuhan dan kehormatan, sebab kita bangsa Indonesia masih lemah, karena itu untuk mencapai kemerdekaan dengan sempurna bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat hal ini bisa dicapai dengan persatuan yang kokoh dan teguh". Di lain kesempatan KH. Abdul Wahid Hasyim juga menekankan pentingnya persatuan bangsa yang kokoh. Kesemua

---

[113] Hasyim, "Perkenan Indonesia Akan Merdeka" dalam *Soeara Moeslimin Indonesia* Th.11. Januari 2604

itu menurutnya karena sejarah bangsa ini belum pernah mencapai persatuan, akibatnya semua perjuangan yang dilakukan selalu berakhir dengan kekalahan karena tercerai berai satu sama lain.

> "Sejarah masa lampau kami telah menunjukkan bahwa kami belum mencapai kesatuan. Demi pentingnya kesatuan ini, yang sangat kami perlukan secara mendesak dan dalam usaha untuk membangun negara Indonessia kita, di dalam pikiran kami pertanyaan yang terpenting bukanlah "Di manakah akhirnya tempat Islam (di dalam negara itu)?", akan tetapi pertanyaan yang terpenting adalah "Dengan jalan manakah akan kami jami tempat agama (kami) di dalam Indonesia Merdeka?" karena itu sekali lagi saya ulangi : Yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahkan."[114]

Dengan demikian, hanya dengan persatuan kemerdekaan dapat diraih, dengan kata lain KH. Abdul Wahid Hasyim sangat tidak menginginkan perpecahan di semua elemen bangsa ini, karena perpecahan itu merupakan "warisan lama" yang sengaja diberikan dan ditradisikan bangsa penjajah dengan maksud agar bangsa ini tidak akan pernah bersatu dan tetap dalam posisi saling bermusuhan satu sama lain.

> Sebenarnya di setiap negeri jajahan, pihak penjajah mesti mengadakan politik-politik melemahkan golongan terbanyak (*mayoritet*) dan menghidupkan (bukan menguatkan) golongan kecil (*minoritet*). Maksudnya supaya kedua belah pihak berselisih terus menerus, golongan terbesar didesak dan golongan kecil disokong sekedar dapat menghadapi golongan terbesar, akhirnya kedua-dua golongan itu perlu pada penjajah."[115]

---

[114] Hasyim, "Agama Dalam Indonesia Merdeka" dalam Pitoyo Darmosugito, *Menjelang Indonesia Merdekam Kumpulan Tulisan-Tulisan Tentang Bentuk dan Isi Negara Yang Akan Lahir* (Jakarta : Gunung Agung, 1982), 104-111

[115] Hasyim, "Perbaikan Perjalanan Haji" dalam Atjeh, *Sejarah Hidup...*, 886

Karena itu menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, apapun baiknya pola perjuangan yang dilakukan anak bangsa ini, namun jika pelaksanaanya tidak bernuansakan persatuan di semua elemen, hasilnya tidak akan maksimal. Dalam kondisi demikian, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan satu sama lain dari elemen bangsa ini akan saling bermusuhan, karena merasa paling kuat dan mampu dalam berjuang. Karena itu pula menurut KH. Abdul Wahid Hasyim harus segera diakhiri sikap dan semangat yang tidak mencerminkan semangat nasionalisme dalam arti bergolong-golong (primordialisme) itu, agar tujuan hakiki bangsa Indonesia menjadi cepat tercapai.

> "...sikap dan semangat bergolong-golong itu di dalam lingkungan tanah air kita, apabila diterus-teruskan akan berakibat rusaknya kemurnian persaudaraan kita sebangsa... Kita perlu mempunyai persatuan bangsa yang kokoh teguh. Lebih-lebih sebelumnya kemerdekaan dating. Maka fanatisme, ta'assub atau kekolotan dari segala pihak jamgan dikeluarkan, supaya persatuan bangsa tidak terganggu dan kita tidak menjadi bangsa yang mentah. Kita tidak berkeberatan orang mengemukakan pahamnya, bahkan orang harus mempertahankan pendiriannya. Hanya saja fanatisme, kekolotan atau ta'assub janganlah dibawa-bawa. Salah satu dari macam-macam paham di Indonesia tentu akan mendapat kemajuan nanti. Bagi penganut paham itu kejadian itu tidak usah menjadi kesombongan, dan bagi penganut paham lainnya tidak usah hal itu menjadikan kecil hati. Sebab paham yang melebihi paham lainnya itu bukti, bahwa paham itu kuat. Penganut penganutnya banyak berbuat daripada beromong dan berkata.[116]

Di kesempatan terpisah KH. A. Wahid Hasyim menambahkan bahwa :

---

[116] Hasyim, "Agama Dalam Indonesia Merdeka"...., 109-111

"Di dalam sejarah sering kita jumpai perselisihan dan perbantahan. Jika kita teliti tentu terdapat bahwa sebab perselisihan itu tidak lain daripada sifat fanatik, ta'asub atau kekolotan orang memegangi pahamnya, dan biasanya sifat fanatik ata ta'asub itu lalu menimbulkan ta'asub dari pihak lawannya."[117]

Untuk mencapai persatuan kokoh atau semangat nasionalisme yang tinggi itu menurut KH. Abdul Wahid Hasyim ada satu "alat" yang dapat diandalkan, yaitu Islam. Dipilihnya Islam menurut KH. Abdul Wahid Hasyim karena Islam secara realitas sedari awal telah mendeklarasikan "diri" sebagai agama kemanusiaan dan selalu *concern* terhadap nilai-nilai kemanusiaan pula. Sebagai wujud kebermanusiaannya agama Islam menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, Allah SWT telah memberikan gambaran yang jelas dalam salah ayat al-Qur'an, yang artinya "*...dan Allah menjadikan kamu (manusia) berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal*". Melalui ayat itu lanjutnya dapat ditarik sebuah pandangan tentang pijakan dasar yang harus dipahami umat Islam Indonesia dalam melihat realitas plural sebuah masyarakat di mana dengan kondisi itu umat harus (juga) mengenal, terlebih dalam kondisi bangsa Indonesia yang sedang berjuang.Dengan demikian saling mengenal (persatuan) di semua elemen bangsa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Selain itu, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, sejarah Islam telah membuktikan betapa Islam teramat berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kasus Khalifah Umar Ibn Khatab dalam menyelesaikan persoalan putra Amr Ibn Ash gubernur Mesir yang memperlakukan rakyatnya secara sepihak dapat dijadikan pijakan historis di mana dalam kasus itu Umar langsung menindak Gubernur secara bijak dan tegas dengan menyatakan "Sampai kapan tuan-tuan memperbudak manusia, sedang mereka itu

[117] Hasyim, "Umat Islam Indonesia dalam Menghadapio Perimbangan Kekuatan Politik Daripada Partai-Partai dan Golongan" dalam Atjeh, *Sejarah Hidup...*, 721-722

diperanakkan ibunya sebagai manusia merdeka"[118] Dari ungkapan itu menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, dapat diambil sebuah pandangan bahwa Islam adalah agama kemerderkaan, agama pembebasan yang anti terhadap perlakukan ketidakadilan dan penjajahan sebagaimana dalam salah satu tulisannya "Kedudukan Islam di Indonesia"

> "Bahwa Islam berlainan dari agama-agama yang lain adalah anti penjajahan, kekejaman dan penindasan ... Oleh karena itu maka umat Islam di Indonesia adalah penentang penjajahan sejak kebangkitan bangsa pada 45 tahun yang lalu. Dalam hal ini semangat kebangsaan di jalin dengan semangat menentang kekafiran"[119]

Lebih jauh, KH. Abdul Wahid Hasyim mengemukakan bahwa, dengan "sentuhan" Islam itulah, kaum muslimin Indonesia menunjukkan sikap tanpa tedeng aling-aling, tegas terhadap penjajah. Tidak kata kompromi atau mempertundukkan diri dihadapan penjajah, yang ada hanyalah perlawanan dan berjuang terus merebut kemerdekaan. Karena itu sambil mengutip ungkapan Dr Dauwes Dekker (Dr. Setia Budi), KH. Abdul Wahid Hasyim menyatakan "seandainya tidak ada Islam kemungkinan besar nasionalisme di Indonesia tidak ada"[120]. Sebagai bukti yang dapat

---

[118] Idem

[119] Hasyim, "Kedudkan Islam di Indonesia" dalam Atjeh, *Sejarah Hidup*..., 866

[120] Hasyim, "Indonesia Menghadapi Perimbangan.....", dalam Atjeh, *Sejarah Hidup*.., 721-727. Sementra itu ungkapan senada juga dilontar oleh George Mc Turnan Kahin, yang menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme terpadu adalah tingginya derajat homogenitas agama di Indonesia., lebih dari 90 % penduduknya beragama Islam. Dengan menyebarnya gerakan nasionalisme dari tempat asal mulanya dan pangkalan utamanya, Jawa ke pulau-pulau lain di Indonesia yang berada di bawah pengawasan Belanda, kecenderungan fisik yang sebaliknya mungkin telah menjadi kuat di kalangan komunitas mereka, justru menjadi netral karena solidaritas mereka terdesak oleh agama yang sifatnya umum. Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa ini benar-benar merupakan semacam symbol ideology... dalam (ingroup) untuk melawan pengganggu asing daan penindas suatu agama yang berbeda. Lihat George Mc Turnan

dimunculkan dari pernyataan itu menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, adalah kalimat takbir "Allahu Akbar" selalu membahana dan mengiringi gerak perjuangan yang dilakukan para pemuda Indonesia, yang nota bene beragama Islam. Dengan demikian dapat diberikan penjelasan bahwa Islam di alam perjuangan Indonesia menjadi "ruh" bagi bangkinya nasionalisme Indonesia.

> "Di atas rasa kebangsaan itu menggeloralah semangat Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dahsyatnya. Dengungan Allahu Akbar dan Allah memberkati menghilangkan ragu-ragu pemuda dalam menghadapi maut. Berkat perjuangan dan pengorbanan rakyar itu tegaklah Republik Indonesia..."[121]

Perjuangan menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, tidak selamanya harus mengandalkan kekuatan fisik, maju ke medan laga dan mengangkat senjata melainkan juga dapat dilakukan dengan kecerdikan (akal), misalnya diplomasi atau yang lainnya, dalam konteks perjuangan melawan penjajah menurut KH. Abdul Wahid Hasyim hal itu dapat dibenarkan. Strategi KH. Abdul Wahid Hasyim dapat dilihat kesediaannya berkolaborasi dengan Jepang, di mana beliau diberi salah jabatan di lembaga yang diciptakan pihak Jepang, yaitu kantor *Shumubu*, dengan harapan pengangkatan tersebut akan berdampak pada keuntungan bagi Jepang. Namun dalam aplikasinya KH. Abdul Wahid Hasyim memiliki agenda lain, sebagaimana yang dikatakannya ;

> "Dalam perjuangan bisa berlaku tipu menipu. Musuh menipu kita dan kita mamakai akal, sehingga siapa memperalat siapa. Di kalangan santri, Nippon yang oleh Jepang harus diucapkan nippong, itu diartikan "nipu wong". Mereka katanya akan membebaskan kita dari penjajahan

---

Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia ; Refleksi Pergerakan Lahirnya Republik* . terj. Nin Bakti Soenarto (Semarang : UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995), 50

[121] Hasyim, Menyongsong Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-8" dalam Atjeh, *Sejarah Hidup...*, 731

Belanda. Itu memang benar kita dibebaskan, tidak lagi dijajah Belanda, tapi apakah setelah bebas dari Belanda kita jadi merdeka ataukah dijajah mereka, itu tidak mereka katakana. Inilah bentuk penipuannya.Masa kita tidak bisa membalas mengakali mereka?" [122]

Dengan demikian, KH. Abdul Wahid Hasyim menerima "kebaikan" Jepang tersebut, tapi ia gunakan untuk kepentingan bangsa sendiri. Prinsipnya kita membantu kita sendiri. Kita membantu diri kita melalui kesempatan yang mereka berikan kepada kita. Mungkin, dan ini pasti, mereka akan memperalat kita. Tetapi kita bukan benda mati. Yang penting kita pergunakan sebaik-baiknya[123]. Dari sinilah KH. Abdul Wahid Hasyim

---

[122] Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren* (Yogyakarta : LkiS, 2001), 232

[123] Ibid.228-230 Alasan kesediaan Kh. A. Wahid Hasyim membantu pihak Jepang diceritakan oleh Saifudin Zuhri ketika berada di Hotel Des Indes, Jakarta, dan beliau menyatakan, "Aku ingin memberitahukan kepada saudara bahwa suatu tahap baru dalam perjuangan kita harus kita mulai sekarang"... "Setan gundul ini, maksudnya Jepang merasa bahwa peperangan antara mereka dengan sekutu akan memakan waktu lama dan memerlukan kelengkapan perang yang bukan main hebatnya. Setan gundul ini tahu bahwa ulama mempunyai pengaruh yang besar sekali di kalangan rakyat kita. Sebaliknya mereka juga mengetahui bahwa rakyat sangat membenci orang-orang yang selama ini menjadi alat yang membantu dengan setia penjajahan Belanda. Jepang koini sedang memikat rakyat, mereke sangat memerlukan dukungan rakyat.!"... "Mereka telah membebaskan kita dari penjajahan Belanda, mereka telah mengusir Belanda dari kedudukan penguasa di negeri kita. Ini berarti babakan dalam perjuangan kita telah berakhir. Nah kini kita memasuki tahapan baru dalam perjuangan, yaknio menghadapi Jepang sebagai penjajah baru.!"... "Saudara ingat dongeng-dongeng Al-Baidaba tentang cerita dunia binatang Singa dan harimau sebagai raja hutan dan gajah yang mempunyai keperkasaan, toh bisa dikalahkan oleh kancil, dan kancil masih dikalahkan oleh siput-siput yang bersatu!"... "Kita pakai ini!", sambil menunjuk kekeningnya, kita harus memakai otak dan pikiran. Kita bisa menjadi kancil dalam menghadapi segala singa dan serigala, dan saya akan mengubah teori Al-Baidaba, janganlah kancil bermusuhan dengan siput, tetapi harus bersahabat. Ya kalau saya sendiri tentulah tidak menjadi kancil

melakukan transformasi besar-besaran peran kyai, sehingga mereka memahami dan terlibat dalam politik dan pemerintahan. Selain itu KH. Abdul Wahid Hasyim juga merekrut tenaga-tenaga muda yang kritis terhadap penjajah, seperti M. Natsir dan Prawoto Mangkusasmito untuk aktif dalam Masyumi sehingga lembaga yang dipimpinnya tidak sekedar perpanjangan tangan pihak Jepang, melainkan sebagai lembaga penyadar dan pemberdaya masyarakat Indonesia dengan cara mendorong dibentuknya barisan Hizbullah dan Sabilillah[124]

B. Islam, Pancasila dan Negara

Melalui sebuah tulisan yang berjudul "Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang". KH. Abdul Wahid Hasyim pernah menyatakan bahwa ada 3 kekuatan atau aliran politik di masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yakni Nasionalis "sekular", Nasionalis Islam, dan Sosialis atau Komunis[125]. Ketiga

---

yang berhasil mengelabuhi singa dan srigala. Akan tetapi kalau kita kaum ulama bersatu, insya Allah akan jadi kancil, bahkan lebih dewasa dan lebih dari sekedar seekor kancil!"

[124] Gagasan untuk mendirikan Hizbullah ataupun juga Sabilillah dari KH. Abdul Wahid Hasyim dapat dilacak dari penuturan KH. Saifuddin Zuhri, tatkalah KH. Abdul Wahid Hasyim menerima tamu yang bernama Abdul Hamid Ono. Dalam kesempatan tersebut Abdul Hamid Ono memmbawa pesan Saiki Sikikan, berhubung dengan serangan-serangan sekutu, Jepang memerlukan serdadu pendamping tentara Jepang di medan perang. Lalu Abdul Hamid Ono meminta kepada KH. Abdul Wahid Hasyim, agar pemuda-pemuda santri dilibatkan atauy dimasukkan dalam Heiho. Permintaan Abdul Hamid Ono oleh KH. Abdul Wahid Hasyim sebagaimana dikatakan KH. Saifuddin Zuhri, disikapi dengan baik, dengan catatan para santri harus dilatih kemiliteran, kemudian keberadaan mereka tidak untuk dikirimkan ke medan perang sebab akan merepotkan serdadu Jepang sendiri. Karena itu mereka (santri yang telah dilatih kemiliteran tersebut) dipersiapkan untuk menjaga tanah air jika diserang sekutu, dan ini secara tidak langsung membantu pihak Jepang. Lihat KH. Saifuddin Zuhri, *Guru Orang-Orang Dari Pesantren* (Yogyakarta : LkiS, 2001),

[125] Hasyim, "Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang" dalam Atjeh, Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim....697 –706. Sementara itu menurut analisis Zamakhshari Dhofier, bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan ada 2

aliran ini menurut KH. Abdul Wahid Hasyim dalam aktivitas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saling berusaha memberikan warna perjuangan Indonesia dengan karakter dan ciri masing-masing. Kondisi yang demikian itu mempengaruhi aktivitas operasional perjuangan bangsa yang seringkali terlibat "bentrok ideologis" di antara para pelaku perjuangan saat itu.

Melihat gambaran tersebut tampaknya Douglas E Ramage begitu sepakat dengan KH. Abdul Wahid Hasyim. Dengan mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution, Douglas menyatakan bahwa di tahun 1940-an memang terjadi perdebatan ideologis yang sengit diantara ketiga aliran politik tersebut. Ke-sengitan-an perdebatan disebabkan oleh adanya "semangat zaman" waktu itu yang dipengaruhi oleh pertempuran antara fasisme dan demokrasi, menyebarnya komunis, dan bangkitnya nasionalisme dan anti kolonialisme, terutama di Asia[126].

Dengan "atmosfir" yang demikian itu, di samping persetujuan pemerintah pendudukan Jepang, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk[127], yang tujuan utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai badan persiapan kemerdekaan untuk sebuah "negara baru", maka dipilihlah beberapa tokoh terkenal yang mewakili berbagai kelompok sosial, etnis, regional dan politis. Sebut saja Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, A. Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Abd. Wahid Hasyim, dan lain-lain.

---

kecenderungan atau aliran kelompok dalam melihat persoalan dasar negara yang akan lahir. Kelompok pertama, mereka yang menghendaki Indonesia didirikan sebagai negara Islam (negara agamis), sedangkan kelompok kedua, menyarankan supaya negara yang akan dibentuk itu nantinya terpisah atau memisahkan antara urusan negara dengan urusan Islam (negara secular)/ Lebih lanjut lihat Dhofier, *KH. A. Wahid Hasyim Rantai...*, 78

[126] Douglas E Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia ; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi.* Terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta : MataBangsa, 2002), 18-19

[127] BJ Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia.* Ter. Safroedin Bahar (Jakarta L PT Temprint, 1985), 19. Badan ini beranggotakan 62 orang yang diketuai Dr Radjiman Wedjodiningrat.

Persoalan muncul ketika BPUPKI sedang membicarakan dasar negara (dasar filosofis negara) yang akan dimasukkan dalam undang-undang dasar yang baru. Terdapat banyak kesulitan dalam mempertemukan posisi-posisi ideologis anggota BPUPKI. Yang mencolok di antaranya adalah posisi-posisi dari mereka yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara di satu sisi, di sisi lain ada yang berusaha menegakkan demokrasi konstitusional sekular dan menganjurkan negara integralistik. Dengan kondisi yang demikian itu, maka perdebatan sengit tak dapat dielakkan lagi. Akhirnya untuk menjembatani perbedaan itulah Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila[128].

Argumen yang paling mendasar dari Soekarno ketika itu adalah, bahwa meskipun negara baru ini didasarkan kepada Tuhan, namun bukan berarti negara ini negara Islam, juga bukan negara sekuler melainkan sebagai negara "religius", semua agama termasuk Islam akan bebas memenuhi kewajiban agama masing-masing. Menyikapi argumen itu, tampak KH. Abdul Wahid Hasyim menyadari betapa khawatirnya kaum nasionalis dalam mempertahankan kesatuan negara ini, karena itu pada tanggal 11 mei 1945 melalui tulisannya "Agama Dalam Indonesia Merdeka" KH. Abdul Wahid Hasyim tampak memberikan apresiasi dan ketersetujuannya apabila persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi prioritas dalam menentukan Pancasila :

> Riwayat kita yang lalu membuktikan bahwa persatuan kita tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakan persatuan

---

[128] Ibid, 23. Lima Prinsip "Pancasila" yang ditawarkan oleh Soekarno itu meliputi : Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Perikemanusiaan ; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu sebelum tanggal 1 Juni, tepatnya tanggal 29 Mei Muhammad Yamin juga menyampaikan 5 prinsip dasar negara, yang meliputi ; Perikebangsaan ; Perikemanusiaan;Periketuhanan;Perikerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* (Jakarta : Sekretariat Negara, 1995), 8-10, 70. Lihat juga Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama ; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1999)

> yang sangat perlu bagi pembentukan Negara Indonesia yang sedang diusahakan itu, menurut pikir kita yang dimajukan bukanlah pertanyaan : Di mana tempat Agama di dalam negara Indonesia itu nanti. Akan tetapi yang penting dimajukan ialah pertanyaan : Bagaimanakah caranya menempatkan Agama di Indonesia Merdeka itu?. Saya ulangi lagi : Persatuan bangsa yang kokoh teguh sangat perlu di waktu ini. Bagaimanakah caranya menempatkan Agama di Indonesia Merdeka, dengan tidak mengendorkan persatuan bangsa yang sangat perlu waktu itu?[129]

Ketersetujuan KH. Abdul Wahid Hasyim terhadap argumen Soekarno itu pula, menurut kesaksian lisan Kyai Maskur sebagaimana yang dikutip oleh Andree Feillard, karena sebelumnya tepatnya pada akhir bulan Mei telah terjadi dialog antara Soekarno dengan tiga pemimpin muslim yaitu KH. A. Wahid Hasyim, Kiai Masykur dan Kiai Kahar Muzakkir, yang diadakan di rumah Mohammad Yamin di mana dalam dialog tersebut disimpulkan ada saling kesepahaman bahkan saling memberikan gambaran dan penjelasan fenomena tentang rumusan Pancasila antara Soekarno dan ketiga pemimpin Islam itu.

> "... di rumahnya Mohammad Yamin, saya, Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dari Yogyakarta. Bertiga, berempat dengan Yamin. Bung Karno datang. Kita berhenti omong-omong itu. Lantas Bung Karno tanya, "Ada Apa ?., Kita ingin dasar Islam tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air, tetapi tidak pecah?". Bung Karno katakana : "Coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin, tanah jawa, tanah Indonesia ini?". Yamin mengatakan : "Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi ke pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekar, untuk minta sama Tuhan. Minta keselamatan, minta apa begitu". Lantas Bung Karno

---

[129] Hasyim, Agama dalam Indonesia Merdeka...., 109-111

katakana : "Nah ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar ; itu mencari Tuhan." Kata Bung Karno, "Kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah ketuhanan ! sudah ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman ketuhanan. Ketuhanan ! Bagaimana Islam ? Ketuhanan!. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan. Mufakat ? Bangsa ketuhanan. Tulis ! tulis ! ketuhanan. Lalu bagaimana bangsa Indonesia selanjutnya?". "Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa, kalau dating dikasih wedang, kalau waktu makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa, itulah bangsa jawa dulu, sampai-sampai kalau sama-sama menemani." "Kalau begitu, Kata Bung Karno, "bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang peri kemanusiaan. Satu sama lain suka menolong. Kerjasama, perikemanusiaa.". Lantas kita, sama Wahid Hasyim, kita...: "Kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya ; Siti Fatimah putri Rasulullah. Jadi harus adil. Biar anaknya, kalau salah, ya salah dihukum bagaiman ; Ini Islam. Ya, benar-benar ini memang." "Lantas ada lagi. Bung Karno katakan, "Siapa dulu ...?. Kahar Muzakkir katakan, "ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Umpamanya ornag bawahan, pengemis. Kasih uang, dilemparkan saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya ini tadi." "Lantas, sampai kepada orang Indonesia iyu dulu, orang Jawa itu dulu, suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumah ini tak punya cabe, minta sama rumah sini, kalau tidak punya garam, minta sama rumah sini, kan begitu. Jadi orang Jawa dulu, kalau masak di

rumah, minta garam di tetangga".... Ini diusulkan oleh Bung Karno...."Ini namanya tolong-menolong, gotong-royong. Lantas ada lagi, bangsa Jawa itu dulu, sampai kepada ada lima itu. Begini, kalau ada apa, kumpul orang-orang desa itu. Satu sama lain tanya, bagaimana baiknya begini, baiknya begini." Ini dikatakan Bung Karno musyawarah. "Jadi bangsa kita dulu itu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya mufakatan, yang diambil suara biasanya yang tertua." Bung Karno katakana perwakilan. "Lantas orang Jawa itu dulu, kalau dimintai apa-apa, minta 'apa-apa dikasihkan. Sampaian minta apa, biar disini habis, diberikan. Solidaritas sosialnya." Lalu ditanyakan kepada Islam, " Islam memang zakat, kita kewajiban zakat, kita memberikan sama fakir miskin, yang kaya memberikan ke fakir miskin, jadi sampai kesimpulan lima itu. Kesimpulan lima itu tadinya mau ditambah, tapi kita umat Islam mengatakan, "rukun Islam itu lima, jadi lima itu saja bisa dikembangkan satu persatu, tetapi jangan ditambah". Hitungannya supaya bisa lima. Ramai... daeri jam 7 malam sampai jam 4 pagi, sampai subuh. Ini dijadikan oleh Bung Karno Pancasila, menjadikan penggantinya dasar Islam negara. "Kita umat Islam mengatakan kalau dasar Islam itu isimnya diambil, kalau Pancasila itu musamahnya yang diambil. Sila-sila itu musamahnya Islam. Lima ini kita umat Islam, ini sebagai musamahnuya. Isi Islam, musamahnya Pancasila", Saya, Wahid Hasyim... Lantas Bung Karno katakan, "Mau saya usulkan Pancasila. Awas kalau ada yang mengacau !" (Kiai Masykur tertawa imitasi Bung Karno), Awas !" "Kita tak boleh bantah. Lantas diusulkan Bung Karno itu. Lima sila itu. Saya pikir waktu itu dengan kawan-kawan, Pak Yusuf Hasyim apa, kalau dasar Islam belum tentu menjalankan Islam. Kadang-kadang negara ada tokoh-tokoh Islam, atau

prakteknya tidak Islam. Ini kita ambil musamahnya, isimnya kita tinggalkan[130].

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, pembahasan tentang pancasila ternyata mencuat kembali, ketegangan antara pihak nasionalis dan Islam tak bisa dielakkan, kedua belah pihak saling melemparkan dan bersikukuh dengan argumentasinya masing-masing. Karena itu, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia sembilan[131] yang bertugas membahas kemungkinan kompromi lebih lanjut antara Islam dan nasionalisme, dan tercapailah kompromi yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Jakarta. Dalam piagam inilah terjadi penambahan redaksi pada dasar negara mengenai Ketuhanan ditambahkan acuan syariat dalam kata-kata: *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*[132].

---

130 Andree Feillard, *NU vis a vis Negara ; Pencarian Isi, Bentuj dan Makna.* Terj. Lesmana (Yogyakarta : LkiS, 1999), 32-35

131 Anggota panitia sembilan itu terdiri dari ; Soekarno. Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin. Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Jakarta : CV Rajawali, 1993). 30. Dalam kesempatan rapat panitia sembilan inilah kemudian Soekarno dalam pidatonya menyatakan, "Panitia 9 orang inilah sesudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna, telah mencapai hasil baik untuk mendapatkan satu modus. Satu persetujuan antara pihak Islam dan Pihak kebangsaan Modus persetujuan itu termaktub di dalam satu rencana, pembukaan hokum dasar, rancangan preambule hokum dasar yang dipersembahkan sekarang oleh panitia kesil kepada sidang sekarang ini sebagai usul. Kemudian Soekarno menambahkan, "berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota=anggota Dokuritsu Zyunby Tyosakai (Badan Penyelidik)". Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta : LP3ES,1999), 38

132 Ibid, 33. Adapun bunyi lengkap dari Piagam Jakarta adalah : " *Bahwa sesungguny a kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai(lah) kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan*

Hampir sebulan setelah ditandatanginya Piagam Jakarta itu, tepatnya tanggal 11 Juli Latuharhary, seorang nasionalis sekular, Kristen Protestan, merasa keberatan dengan tambahan redaksi pada dasar negara itu khususnya yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Keberatan Latuharhary ini kemudian juga dirasakan oleh kelompok nasionalis lainnya, yaitu Wongsonegoro dan Hoesin Djajadininrat. Ketiga orang nasionalis ini, merasa bahwa penambahan redaksi tersebut akan menimbulkan fanatisme karena umat Islam sepertinya diharuskan menjalankan shariat, di samping kesan diskriminatif warga non Islam itu menampak. Terhadap keberatan kelompok nasionalis tersebut, KH. Abdul Wahid Hasyim menyatakan bahwa sila Permusyawaratan akan menghalangi segala bentuk paksaan, bahkan formulasi ini lanjut KH. Abdul Wahid Hasyim merupakan suatu kompromi yang bagi kaum lebih radikal malah tidak mencukupi.[133]

Lontoran jawaban KH. Abdul Wahid Hasyim jika disimak merupakan bentuk konsekuensi dan konsistensi beliau terhadap sebuah kesepakatan yang telah ditandatangani (Piagam Jakarta, red). Karena itu pada sebuah kesempatan rapat panitia 19, KH. Abdul Wahid Hasyim melontarkan 2 rumusan, yaitu, *pertama*, agama negara adalah agama Islam, dengan jaminan bagi pemeluk

---

rakyat Indonesia ke depan pintu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil, dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hkimat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat Bolan, *Pergumulan....*, 28

[133] Ibid, 31

agama lain untuk dapat beribadah menurut agama masing-masing. *Kedua*, Presiden dan wakilnya harus beragama Islam. Menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, kedua rumusan yang ia lontarkan tersebut didasari oleh pemikiran bahwa kalau Presiden adalah seorang muslim, maka peraturan-peraturan akan mempunyai ciri Islam dan hal itu akan penting artinya bagi pertahanan negara ; Umumnya pertahanan yang didasarkan kepada keyakinan agama akan sangat kuat, karena menurut ajaran Islam orang hanya boleh mengorbankan jiwanya untuk ideologi agama[134].

Usulan dari KH. Abdul Wahid Hasyim ini kemudian disambut dan didukung oleh Sukiman, dengan alasan menyenangkan banyak orang, namun bagi H. Agus Salim hal itu tidak akan mungkin dilakukan, karena akan berkonsekuensi pada lainnya, misalnya wakil presiden, para duta besar dan seterusnya, yang hal itu akan berimbas pada bagaimana dengan perlindungan pemeluk agama lain. Pendapat H. Agus Salim tampak "diamini" oleh Wongsinegoro dan Hoesin Djajadiningrat yang memang sedari awal kurang sependapat, terutama pada persoalan tujuh kata.

Meski usulan KH. Abdul Wahid Hasyim oleh H. Agus Salim, Wongsonegoro dan Hoesin Djajadiningrat ditolak, kenyataannya usulan tersebut "berdampingan" dengan tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta, dengan kata lain usulan tersebut diterima dalam keputusan sidang BPUPKI. Menilik usulan KH. Abdul Wahid Hasyim meskipun dalam konteks sekarang dikatakan cukup kuno, namun jika dilihat konteks saat itu, hal itu menunjukkan kewajaran, bahkan merupakan bentuk konsistensi dan implementasi lebih lanjut dari tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Bagaimana mungkin sebuah syariat dapat "berjalan" di tengah masyarakat jika tidak didukung oleh perangkat-perangkat dari shariat, yang tak lain adalah negara dan pemangku negara itu sendiri.

Dua hari setelah Jepang menyerah, yakni tanggal 17 Agustus malam, pada hari proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, Mohammad Hatta menerima

---

[134] Ibid, 32-33

kunjungan seorang perwira Angkatan laut Kekaisaran Jepang[135] yang menyampaikan keberatan-keberatan penduduk dari Indonesia Timur, yang tidak beragama Islam, mengenai dimuatnya Piagam Jakarta pada Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Bila tidak diubah, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta memanggil empat anggota panitia Persiapan Kemerdekaan yang dianggap mewakili Islam ; Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo. Teuku Mohammad Hasan dan A. Wahid Hasyim. Demi menjaga keutuhan bangsa pada saat-saat genting ini, mereka setuju untuk menghapuskan rujukan pada agama Islam dalam teks Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Sebagai gantinya, KH. Abdul Wahid Hasyim mengusulkan agar kata dengan menjalankan shariat Islam bagi pemeluknya yang terbuang dari piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, penambahan kata Esa menggarisbawahi keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak terdapat pada agama lain[136]. Dengan demikian Indonesia tidak menjadi negara Islam, namun menjadi negara monoteis. Presisden

[135] Menurut Mohammad Hatta, perwira yang dimaksud bernama Nishizima (Nishijima Shigetoda) yang merupakan pembantu Laksamana Maeda. Keberadaan perwira menurut pandangan Deliar Noer menyampaikan keberatan-keberatan masyarakat Indonesia di bagian Timur akan tujuh kata ataupun redaksi islam yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Mendengar berita tersebut, maka Mohammad Hatta memiliki waktu hanya semalam untuk mencoba mencari jalan keluar. Lihat Noer, *Mohammad Hatta ; Biografi Politik* (Jakarta : LP3ES, 1990), 254-255

[136] Menanggap kasus redaksi "Ketuhanan Yang Maha Esa" Huzairin sebagaimana yang dikutip oleh Endang Saifuddin Anshari menyatakan, "Bagaimanakah datangnya sebutan "Ketuhanan YME" itu, dari fihak Nasrani-kah, atau dari fihak Hindu-kah atau dari fihak Timur Asing (sekarang Keturunan Cina)-kah yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun UUD 1945 itu?. Tak mungkin !. Istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu hanya sanggup diciptakan oleh otak kebijaksaan dan iman orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan penegrtian yang terhimpun dalam "Allahu al-Wahid al-Ahad" yang disalurkan terjemahan Qs.2 :163 dan Qs.112 dan di dzikirkan dalam doa kanzul 'Arsy baris 17. Lihat Zuhri, *Piagam Jakarta...*, 23

harus diangkat dari orang Indonesia asli, tanpa ketentuan jelas mengenai agamanya. Presiden juga wakil presiden bebas memilih upacara pengambilan sumpah jabatan atau janji secara keagamaan.

Ditinggalkannya Piagam Jakarta dan persyaratan Presiden dan wakilnya harus orang muslim menimbulkan pertentangan yang berlangsung lama. Bahkan kehadiran KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pertemuan yang sangat penting pada tanggal 18 Agustus 1945 itu diragukan banyak pihak termasuk dalam ini adalah Prawoto Mangkusasmito, seorang pemimpin Masyumi. Keraguan ini kemudian dikutip oleh Saifuddin Anshari dalam karyanya yang berjudul "Piagam Jakarta ; 22 Juni 1945", Namun menurut beberapa saksi termasuk Mohammad Hatta sendiri, bahwa Wahid Hasyim memang benar-benar hadir dalam pertemuan yang menentukan itu. Bahkan menurut Kasman, justru KH. Abdul Wahid Hasyimlah yang berusaha meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia menerima perubahan itu[137].

---

[137] Persoalan kehadiran KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pertemuan bersama Mohammad Hatta tanggal 18 Agustus 1945 , oleh banyak kalangan diragukan. Endang Saifuddin Anshori dalam tulisannya juga meragukan kehadiran Wahid Hasyim, demikian pula Deliar Noer. Namun jika mengacu pada tulisan Andree Feilard yang mengacu sumber mutakhir tampaknya keraguan itu terbantahkan. Melalui tulisan *NU vis a vis Negara* Andree Feilard memberikan keyakinannya bahwa KH. AbdulWahid Hasyim memang benar-benar hadir, Keyakinan itu didasarkan pada hasil wawancaranya dengan Ibu Wahid Hasyim pada bulan Januari 1992, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 Wahid Hasyim memang menemui Mohammad Hatta, demikian pula hasil wawancara Feilard dengan Wangsawijaya Sekretaris Pribadi dari Mohammad Hatta pada tanggal 29 –7-1991, juga memberikan kesaksian akan kehadiran Wahid Hasyim. Lihat Feilard, *NU vis a vis Negara...*, 40. Dalam kasus yang sama KH. Abdurrahman Wahid, Putra Pertama KH. Abdul Wahid Hasyim memberikan keyakinan bahwa Wahid Hasyim benar-benar hadir, ini tercermin dari pengantarnya dalam sebuah tulisan karya Ernar M Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta : Pustaka Sinar Serasi, 1996). Dalam kesempatan Seminar Nasional di Hotel Garden Palace Surabaya yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) pada tanggal 14 September 2002. pukul 10.00 wib, KH. Abdurrahaman Wahid juga memberikan penjelasan yang sama, yakni kehadiran sekaligus penerimaan KH. Abdul Wahid Hasyim terhadap pancasila.

Menyikapi kontroversi tentang kehadiran itu, mungkin pandangan Zamakhsyari Dhofier memberikan catatan tersendiri kepada sosok KH. A. Wahid Hasyim, yaitu pertama, baik Hatta maupun Prawoto telah menempatkan Wahid Hasyim sebagai salah seorang penentu dalam persoalan usul perubahan. Bagi Hatta, kelancaran tercapainya mufakat dalam sidang Panitia Persiapan tanggal 18 Agustus 1945 itu antara lain ; karena persetujuan Wahid Hasyim yang telah diberikans ejak sebelum sidang dimulai. Tapi bagi Prawoto, tercapainya mufakat itu justru karena Wahid Hasyim sedang berada di Jawa Timur, sehingga tidak dapat mengikuti sidang. Yang kedua, Wahid Hasyim tidak pernah memberikan reaksi sesudah terjadinya perubahan Piagam Jakarta yang disiarkan secara resmi tanggal 19 Agustus 1945.[138]

Bagi diri seorang KH. Abdul Wahid Hasyim yang lebih mengedepankan persatuan bangsa tampaknya tidak terlalu menjadi persoalan tentang perubahan itu, meski dia sendiri yang mengusulkan dua klausul pelengkap Piagam Jakarta, namun ketika ada sesuatu yang lebih penting dari kedua klausul tersebut, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, maka iapun menerima pencoretan tujuh kata dan klausul tersebut. Keinginan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa—terlepas dari kasus keberatan masyarakat Indonesia Timur yang disampaikan perwira Jepang kepada Mohammad Hatta--- itu tampak ucapan yang dicatat oleh Saifudin Zuhri, salah seorang santri dan teman perjuangannya menyatakan :

> "Pertama, situasi politik dan keamanan dalam permulaan Revolusi memang memerlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, sebagai golongan minoritas mereka memang dapat melakukan politik ofensif, bahkan disertai tekanan politik (chantage) seolah-olah ditindas oleh golongan mayoritas. Sebagai golongan yang paling berkepentingan tergalangnya persatuan dan kesaatuan dalam menghadapi Belanda yang masih mempunyai kaki tangan di mana-mana,

---

[138] Dhofier, KH. A. Wahid Hasyim..., 77-78

> para pemimpin Islam dan nasionalis memenuhi tuntutan mereka. Dengan pengertian : bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan dapat ditampung dalam melaksanakan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 secara jujurm yaitu ayat yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.[139]

Bagi KH. Abdul Wahid Hasyim, kata "kemerdekaan" yang ada di pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tersebut lebih punya yang lebih tinggi daripada kata "kewajiban" sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta, dengan kata lain bahwa sebenarnya "spirit" Piagam Jakarta tidak pernah hilang dalam benak KH. Abdul Wahid Hasyim, justru ia melakukan penafsiran yang begitu liberal. Dengan demikian, dapat dikatakan ada 2 hal yang dipegang oleh KH. Abdul Wahid Hasyim, dalam persoalan Islam dan Negara, yakni kebebasan mutlak beragama, dan monoteis.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal penerimaan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, baik secara pemikiran maupun tindakan bagi seorang KH. A. Wahid Hasyim tidak persoalan, dalam arti penerimaan yang tulus yang didasari oleh kepentingan luhur akan bersatunya bangsa Indonesia. Untuk menunjukkan betapa konsistensi dan konsekuensinya KH. A. Wahid Hasyim, pertama tidak sedikitpun bukti atau sumber lain yang menunjukkan sikap penolakan KH. A. Wahid Hasyim terhadap kasus perubahan itu. Kedua, sebagaimana diungkapkan oleh KH. Abdurrahman Wahid, salah seorang putranya menyatakan, bahwa penerimaan KH.A. Wahid Hasyim terhadap pancasila diimplementasikan ketika menjadi Menteri Agama, di mana dengan berani ia mengeluarkan kebijakan yang menerima permintaan agar siswi diterima pada Sekolah Guru Hakim Agama Negeri (SGHAN). Keputusan itu dikatakan berani,

---

[139] Feilard, *NU vis a vis Negara*…., 40-41

karena dalam pandangan ulama salaf (sebagaimana tercermin dalam karya-karya klasiknya), sangat tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi hakim agama. Logikanya jika seorang wanita tidak diijinkan menjadi hakim agama apatah lagi bersekolah untuk menjadi hakim agama[140].

C. Pengaruh Pemikiran KH. Abdul Wahid Hasyim

Pengaruh pemikiran keislaman dan kebangsaan KH. Abdul Wahid Hasyim tidak dapat diragukan. Ide-ide beliau yang dikemukakan baik lewat tulisan maupun yang melalui pidato-pidato cukup punya pengaruh yang berarti yang tidak hanya terbatas pada kalangan muslim tradisional saja tapi juga kalangan muslim modernis atau lebih tepatnya kalangan nasionalis. Pengaruh ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, yang *pertama*, banyak karya tulis yang dihasilkan oleh KH. A. Wahid Hasyim didasarkan pada masalah aktual yang terjadi di masyarakat dengan tema yang beragam dan karya itu di muat di beberapa media yang memungkinkan semua kalangan mengaksesnya. *Kedua*, Sosok KH. A. Wahid Hasyim dikenal sebagai orang yang haus ilmu dan pandai bergaul, ini terbukti dari seringnya beliau terlibat dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh mereka yang bukan dari kalangan pesantren[141]. *Ketiga*, sebagai Menteri Agama, memungkinkan ia untuk melakukan interaksi atau hubungan dengan semua pihak.

Hingga kini pemikiran-pemikiran keislaman dan kebangsaan KH. A. Wahid Hasyim masih dikagumi, meski banyak orang kurang begitu mengenalnya. Salah satu bukti betapa pemikiran keislamannya mampu memberikan inspirasi banyak pihak

---

[140] Abdurrahman Wahid, "A. Wahid Hasyim, NU dan Islam" dalam Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 3-11. dalam konteks pemikiran hokum Islam, menurut Abdurrahman Wahid, KH. Abdul Wahid Hasyim itu mengikuti mazhab supremasi hukum kontemporer dengan mengalahkan syariat. Dalam kasus ini pula, pandangan Gus Dur dibantah oleh adiknya KH. Sholahuddin Wahid, yang merasa tidak setuju dengan padangan Gus Dur, dan merasa yakin bahwa KH. Abdul Wahid Hasyim masih meletakkan Syariat di atas hukum kontemporer.

[141] Lebih jauuh lihat Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim....*

khususnya pesantren-pesantren dalam melakukan pemaduan antara ilmu agama dan ilmu umum, bahkan upaya pemaduan itu secara monumental telah berkembang hingga sekarang yakni berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam atau yang dikenal dengan sekarang dengan nama IAIN (Intitut Agama Islam Negeri)[142]

Di bidang pemikiran kebangsaan pengaruh pemikiran KH. Abdul Wahid Hasyim tercermin dari beberapa keputusan penting yang diambil organisasi keagamaan NU dalam menyikapi persoalan dasar negara Pancasila, di •mana dalam dinamika perkembangan organisasi ini mampu memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa ini, dalam bentuk pandangan yang menyejukkan, yaitu pengakuan dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara , dengan beberapa *pertama*, masalah Pancasila adalah masalah duniawi dan tidak memiliki dimensi akhirat, karena masalah itu lebih tepat diurus oleh negara dengan didampingi oleh ahli shariat. *Kedua*, persoalan Pancasila adalah persoalan yang harus dipecahkan di negara ini dalam konteks bernegara pula. Sehingga tidak tepat menanyakan, bagaimana pandangan Pancasila tentang suatu hal, karena itu adalah yurisdiksi dan shariah[143]. Konsekuensi ini berpengaruh pada pandangan NU terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).Dengan mengacu hasil Muktamar XXVII di Situbondo, NU menyebutkan bahwa Republik Indonesia sebagai bentuk final dari upaya kaum muslimin untuk membentuk negara di kawasan Nusantara. Dengan demikian logikanya NU akan menolak keras siapapun yang berkehendak mendirikan negara selain NKRI.[144]

Pengaruh pemikiran moderat dan liberal KH. A. Wahid Hasyim juga terasakan pada dua tokoh utama NU yaitu, KH. Achmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid. Kedua tokoh inilah yang kemudian mampu menindaklanjuti pemikiran progresif KH. Abdul Wahid Hasyim dalam memandang persoalan

---

[142] Umam, *KH. Wahid Hasyim...*,

[143] Abdurrahman Wahid, "A.Wahid Hasyim, NU dan Islam" dalam *Membangun Demokrasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 3-11

[144] Abdurrahman Wahid, "Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa"

kebangsaan. Dalam hal penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, KH. Achmad Siddiq yang juga Rois Am organisasi NU menyatakan dalam makalahnya di muktamar 1984 menyatakan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam akan keesaan Allah, yang dikenal pula dengan sebutan Tauhid. Adanya pencantuman anak kalimat "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukan kuatnya wawasan keagamaan dalam berkehidupan bernegara kita sebagai bangsa[145]. Lebih jauh dalam penerimaan Pancasila ini, KH. Achmad Siddiq juga memaparkan beberapa pokok pemikirannya, yang meliputi, *pertama*, perjuangan umat Islam Indonesia untuk menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah telah berlangsung sejak lama. *Kedua*, ketioka perjuangan merebut kemerdekaan sudah mendekati keberhasilannya, umat Islam memberikan saham yang sangat besar dalam persiapan lahirnya negara Indonesia merdeka. Melalui para pemimpinnya, umat Islam ikut menentukan wujud, azas dan hukun negara yang akan lahir itu. *Ketiga*, setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan, umat Islam tanpa ragu-ragu membela dan mempertahankan kemerdekaan itu, bukan saja sebagai kewajiban nasional melainkan juga sekaligus sebagai kewajiban agama. Keempat, ketika revolusi fisik telah selesai, umat Islam memberikan saham pula dalam pengisian kemerdekaan yang dicapai dengan penuh pengorbanan itu. Keikutsertaan umat Islam itu terbukti dalam dua jenis kerja besar, antara lain (a), umat Islam berhasil turut menjaga keutuhan negara dari gangguan-gangguan separatis dan pemberontakan bersenjata. (b), Dalam era Orde Baru, umat Islam turut mengisi kemerdekaan dalam bentuk partsisipasi penuh dalam pembangunan nasional yang sedang berlangsung dewasa ini[146].

Sementara itu pandangan senada terhadap penerimaan Pancasila tercermin dari beberapa pemikiran KH. Abdurrahman

---

[145] Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996),177

[146] Ibid, 180-181

Wahid, di mana dia menyatakan bahwa sebenarnya Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Pancasila memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan, karena itu menurutnya ia akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raganya, terlepas dari kenyataan bahwa tidak jarang Pancasila dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam. Dengan pernyataan itu menandakan bahwa seorang Abdurrahman Wahid menyaampaikan penerimaannya terhadap Pancasila, bahkan ia menyatakan tanpa Pancasila negara akan bubar[147].

Dengan demikian kedua orang ini ---yang kebetulan memikiki hubungan yang sangat dekat dengan KH. Abdul Wahid Hasyim--- memiliki "warna" pemikiran yang senada khususnya berkaitan dengan pancasila dan kehidupan berbangsa, bernegara.

---

[147] Douglas E Ramage, "Pemahaman Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila dan Penerapannya ; Dalam Era Pasca Asas Tunggal" dalam *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (ed) Elyasa KH. Darwis (Yogyakarta : LkiS, 1997)101. Lihat Juga Douglas E Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia* ; Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2002)

BAGIAN -6-

PENUTUP

Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya bahwa kombinasi kesempatan yang disediakan oleh keluarganya serta kerajian dan kecerdasannya, KH. Abdul Wahid Hasyim dapat memperoleh kesuksesan. Kemampuan keilmuan dan intelektualitasnya merupakan hasil dari belajar keras selama waktu yang tidak pendek. Hal ini menyebabkan ia dihargai banyak kalangan apakah dari santri maupun nasionalis. Sejak usia muda ia belajar ke berbagai ulama di berbagai pesantren, sebelum melanjutkan pendidikan lanjutan ke al-Makkah al-Mukarromah dibawah bimbingan para *shaikh*, yang nota bene memiliki perbedaan etnisitas, karakter dan pemikiran serta faham atau aliran yang berbeda dengan beliau. Inilah yang kemudian menjadikannya begitu terbuka dan toleran kepada siapa saja yang berbeda aliran pemikiran, ditambah lagi kegemarannya membaca yang memungkinkan ia melakukan pergesekan pemikiran di luar pemikiran Islam.

Mengenai wawasan keislaman yang dimiliki KH. Abdul Wahid Hasyim ada beberapa kesimpulan yang dapat diajukan. *Pertama*, KH. Abdul Wahid Hasyim mempercayai doktrin Ahl al-Sunnah wa al-jamaah, yaitu mengikuti jalan Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin sebagaimana yang dijalani oleh empat madzhab sunni. Karena itu, KH. Abdul Wahid Hasyim mengikuti tradisi sunni. Dalam hal membicarakan kedudukan akal dan wahyu, terlihat jelas sekali bahwa formulasi yang dipegang milik al-Ash'ari dan al-Maturidi, dan ini baginya dianggap sebagai formulasi yang terbaik. Sebagai konsekuensi dari formulasi ini, maka yang tampak ke permukaan dalam pola pikir dan pola tingkah KH. Abdul Wahid Hasyim cenderung moderat (*tawassuth*), bersikap adil (*I'tidal*), bersikap seimbang (*tawadzun*) dan bersikap toleran

(*tasamuh*) sehingga dapat dipastikan jika KH. Abdul Wahid Hasyim akan menolak segala bentuk tindakan dan pemikiran yang bersifat ekstreem atau fanatik, taa'ssub yang dapat melahirkan penyimpangan dan penyelewengan dari ajaran Islam. Karena itu sangat dimungkinkan jika beliau begitu akomodatif terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan doktrin-doktrin yang sifatnya dogmatis

Walaupun banyak kalangan tradisionalis dianggap hanya mengurusi bidang agama saja dan tidak peduli dangan bidang sosial politik, cap semacam ini tidak dapat ditujukan kepada KH. Abdul Wahid Hasyim. Karena secara realitas keberadaan beliau cukup diakui bahkan Benda pun mengakui sebagai salah satu orang Indonesia yang cukup berpengaruh di masa pendudukan Jepang. Sebagai bukti yang dapat dimunculkan adalah, keterlibatan beliau pada aktivitas sosial politik, misalnya menjadi anggota BPUPKI, PPKI, ketua partai Masyumi dan semacamnya. Dengan demikian teramat salah jika julukan tradisional bagi KH. Abdul Wahid Hasyim disamakan dengan seorang yang sangat konservatif, kolot dan tidak peka lingkungan. Apa yang melekat dan dilakukan oleh KH. Abdul Wahid Hasyim, sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman beliau akan ajaran Islam, di mana Islam secara dasariah tidak pernah membedakan antara aktivitas keagamaan murni dengan aktivitas keduniawian, karena itu pula meski kesan agama oriented selalu ditujukan kepada kaum tradisionalis, namun hakekatnya mereka tidak pernah menelantarkan aspek lainnya.

Sementara itu, dalam hal wawasan kebangsaan, tampak sekali warna dan corak pemikiran keislamannya selalu menghiasi. Artinya spirit keislaman selalu dijadikan patokan bagi KH. Abdul Wahid Hasyim dalam menjalankan "roda" pemikiran kebangsaannya. Salah satu contoh kasus yang dapat dimunculkan adalah kesediaan beliau untuk menjalin hubungan dengan pihak penjajah Jepang. Meski kesannya penurut dan kompromi, namun sejatinya itu merupakan taktik dan strategi bagi beliau untuk melakukan perlawanan yang "berakal", artinya melakukan perlawanan terhadap penjajah tidak hanya dilakukan secara fisik tapi juga

melalui akal yang strategis. Kondisi pemikiran itulah yang beliau sampaikan kepada KH. Saifuddin Zuhri, dan terbukti bahwa atas jasa dan strategi yang dimainkan KH. Abdul Wahid Hasyim, para santri dapat kesempatan untuk berlatih kemiliteran, para ulama dapat memanfaatkan wadah Jepang "Shumubu" sebagai sarana konsolidasi dan koordinasi perjuangan bangsa dalam rangka mempertahankan dan menggelorakan nasionalisme Islam di tingkat masyarakat terbawah.

Satu hal yang menarik dalam pemikiran KH. Abdul Wahid Hasyim, terhadap kasus Piagam Jakarta. Kemenarikan itu terletak pada kerelaan beliau untuk melepaskan kepentingan golongan (Islam, red) demi kepentingan nasional yang lebih besar. Meski sejak awal beliau mendukung pelaksanaan shariat Islam bahkan usulan terhadap "perangkat" pendukung shariat diakui dan disepakati dalam sidang,yaitu syarat seorang Presiden harus beragama Islam, namun ketika ada kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan dan kesatuan bangsa, maka KH. Abdul Wahid Hasyim rela dan ikhlas melepaskan Piagam Jakarta. Pelepasan ini bukan tanpa dasar, tapi justru realitas masyarakat Indonesia itulah yang dijadikan pijakan dan dasar oleh beliau dalam memutuskan pelepasan itu. Meski demikian, pelepasan itu masih memberikan warna Islami terhadap UUD 1945, yaitu penggunaan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kontek ini sebenarnya KH. Abdul Wahid Hasyim melakukan upaya "interpretasi" liberal terhadap makna Islam yang terkandung dalam Piagam Jakarta. Islam tidak dipahami dari formalitasnya melainkan lebih dimaknai substansialnya, Islam harus memberikan spirit dan ruh bagi negera ini. Dengan demikian secara hakikiah KH. Abdul Wahid Hasyim tidak pernah hendak menghilangkan Islam dari Negeri ini, meski secara tekstual, justru yang dilakukannya jauh lebih bermakna bagi Islam itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Primer

Hasim, Abdul Wahid, "Agama Dalam Indonesia Merdeka", dalam *Menjelang Indonesia Merdeka, kumpulan tulisan tentang bentuk dan isi negara yang akan lahir*, ed. Pitoyo Darmo Sugito. Jakarta : Gunung Agung, 1982

____________________, "Nabi Muhammad dan Persaudaraan Manusia ", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

____________________, "Kebangkita Dunia Islam", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

____________________, "Beragamalah Dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan ", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

____________________, "Perkembangan Politik Masa Pendudukan Djepang", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

____________________, "Apakah Meninggalnya Stalin Membawa Pengaruh Pada Umat Islam?, Djuga Pada Umat Islam Indonesia.", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

____________________, "Di Belakang Lajar Perubahan Kekuasaan Djenderal Nadjib di Mesir", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

____________________, "Umat Islam Indonesia Dalam Menghadapi Perimbangan Kekuasaan Politik Dari Partai-Partai dan Golongan", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

____________________, "Menyongsong Tahun Proklamasi Kemerdekaan Yang Kedelapan", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan*

Tersiar. (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Masyumi Lima Tahun ", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Analyse Kelemahan Penerangan Islam", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Fanatisme dan Fanatisme", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Siapakah Yang Akan Menang Dalam Pemilihan Umum Yang Akan Datang", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Akan Menangkah Umat Islam Indonesia Dalam Pemilihan Yang Akan Datang", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Kedudukan Ulama Dalam Masyarakat Islam Indonesia", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Umat Islam Indonesia Menunggu Adjalnya Tetapi Pemimpin-Pemimpinya Tidak Tahu", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Islam Antara Materialisme dan Mystiek", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

________________, "Membangkitkan Kesadaran Beragama", dalam *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* (Peny) Aboebakar Atjeh. Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957.

2. Sumber Sekunder

Atjeh, Aboebakar, *Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* Jakarta : Panitia Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasyim, 1957

Abdullah, Taufiq, *Islam dan Masyarakat ; pantulan Sejarah Indonesia.* Jakarta : LP3ES, 1987.

Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai : Kasus Pondok Pesantren Tebuireng.* Malang : Kalimasada Press, 1993.

Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama.* Sala : Jatayu. 1985.

Aziz, MA, *Japan's Colonialism and Indonesia.* Martinus Nijhof : The Hague, 1955

Aziz, M. Imam, Suhaelan dan Wafa, *Agama dan Perubahan Sosial ; Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia.* Yogyakarta : LKPSM, 2000

Ali, Fachri dan Bachtiar Effendy, *Merambah Jalan baru Islam Indonesia Masa Orde Baru.* Bandung : Mizan, 1990.

Amin, M. Masyhuri, *Dinamika Islam : Sedjarah Transformasi dan Kebangkitan.* Yogyakarta : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1995.

Azra, Azyumardi dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI ; Biografi Sosial Politik*, Jakarta : INIS, 1998

Azra, Azyumardi, *Renaissans Islam Asia Tenggara ; Sejarah Wacana dan Kekuasaan.* Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.

Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* . Sala : Jatayu, 1985.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945.* Jakarta : CV Rajawali, 1983

Avdic, Kamil Y, *Survey of Islamic Doctrin.* Terj. Shonhadji Sholeh. Suarabaya : Hikmah, 1991.

Benda, J Harry, *The Crescent and The Rising Sun ; Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 19842-1945.* The Hague and Bandung : Van Hoeve, 1958.

Borton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia.* Jakarta : Paramadina dan Pustaka Antara, 1998.

______________, " Indonesia's Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid as Intelectual Ulama ; The Meeting of Islamic Tradisionalism and Modernism in Neo Modernism Thougt, dalam *Studi Islamica* Vol.4. no.1 1997

Boland, BJ. *Pergumulan Islam di Indonesia.* Jakarta : PT Temprina, 1985

Bruinessen, Van Martin, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa ; Pencarian Wacana Baru*, terj.Farid Wajdi. Yogyakarta : LKIS, 1994.

Bakti, Faisal Andi, *Islam and Nation Formation in Indonesia ; From, Communitarian to Organizational Communicatios.* Jakarta : Logos, 2000.

Dahrm, Benhard, *History of Indonesia in The Twentieth Century*. Tran. PS. Falla. Praeger Publisher, 1971.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren ; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* . Jakarta : LP3ES, 1982.

__________________, "K.H. A. Wahid Hasyim ; Rantai Penghubung Peradaban Pesantren dengan Peradaban Indonesia Modern", *Prisma*, no.8 (1984) : 73-81.

Dharwis, KH Elyasa, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil.* Yogyakarta : LkiS, 1997

Esposito, John L, *Islam and Polities.* New York : Syracuse Univrsity Press, 1991.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara ; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia.* Jakarta : Paramadina, 1998.

Ensiklopedi Islam. Jakarta : Djambatan

Ensiklopedi Islam 5. Jakarta : Ichtiyar Van Hoeve, 1952

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Federspiel, Howard M, *Persatuan Islam ; Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996.

Feith, Herbert dan Lancae Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965.* Jakarta : LP3ES, 1995.

Feillard, Andree.*Nu vis a vis Negara ; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* . Yogyakarta : LkiS, 1999

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa.* Ter. Aswad Mahasin. Jakarta : Pustaka Jaya, 1981

Harijanti, *KH.A Wahid Hasyim ; Peranannya Dalam Pengembangan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.* Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. 1995/1996.

Holand, William L (ed), *Asian Nationalism and The West.* New York : The Macmillan Company, 1953.

Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa ; Menoleh Ke Belakang Menatap Ke Depan.* Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Haidar, M. Ali, *Nu dan Islam di Indonesia ; Pendekatan Fikih Dalam Politik.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa.* Jakarta : Gema Insani Press, 1997

Ismail, Faishal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama ; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila.* Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1999.

Izutsu, Toshihiko, *Konsep Kepercayaan Dalam Teologi Islam ; Analisis Semantik Iman dan Islam.* Ter. Agus Fahri Husein. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.

Koentowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam.* Jakarta : Mizan, 1997

______________, Paradigma Islam ; *Interpretasi Untuk Aksi.* Bandung : Mizan, 1993.

Kahin,George Mc Turhan, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.* Alih bahasa. Nin Bakdi Soemanto. Sala : UNS Press, 1995

Khuluq. Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama ; Biografi KH. Hasyim Asy'ari.*Yogyakarta : LkiS, 2000

Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru ; Sejarah Pergerakan Nasional.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993

Maridjan, Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926.* Jakarta : Erlangga, 1992.

Mehden, Fred R Von Der, *Religion and Nationalism in Southeast Asia ; Burma, Indonesia, The Philipines.* Madison, Milwaukee and London : The University of Winconsin Press, 1968.

Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius.* Jakarta : Paramadina, 1997.

________________, *Khazanah Intelektual Islam.* Jakarta : Bulan Bintang, 1984.

Madkour, Ibrahim, *Aliran dan Teori Filsafat Islam.* Ter. Yudian Wahyudi (Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.* Jakarta : LP3ES, 1996.

______________, *Partai Islam di Pentas Nasional,* Jakarta : LP3ES, 1999

______________. *Mohammad Hatta ; Biografi Politik.* Jakarta : LP3ES, 1990

Nasution, Harun, *Teologi Islam.* Jakarta : UI Press, 1986.

Qomar, Mujammil *NU Liberal ; Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam.* Bandung : Mizan, 2002

Ricklefs, MC. *A History of Modern Indonesia Since C. 1300.* London : The MacMillan Press, 1981.

Ramage, E Douglas *Percaturan Politik di Indonesia ; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi.* Yogyakarta : Mata Bangsa, 2002.

Sitompul, M. Ernar, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila.* Jakarta :Pustaaka Sinar Serasi, 1996.

Shihab, Alwi, *Membendung Arus ; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia.* Bandung : Mizan, 1998

Sutjiatingsih, *KH Wahid Hasyim.* Jakarta : Depdikbut, 1984.

Umam, Saiful, " KH.Wahid Hasyim : Konsolidasi dan Pembentukan Eksistensi", dalam (ed) Azyumardi Azra, *Menteri-Menteri Agama RI ; Biografi Sosial Politik.* Jakarta : Departemen Agama RI. 1998.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta : RajaGrafindo Press, 1998.

Wahid, Abdurrahman. *Membangun Demokrasi* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000

________________, "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia" dalam *Prisma* edisi April, 1984

________________, "Masa Depan Islam Dalam Kehiduypan Bernegara dan Berbangsa" dalam *Prisma*

Watt, Montgomery. *Islamic Philosphy and Theology.* Edinburgh : Edinburgh Unuversity Press, 1992.

Zaini, Achmad, *Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim ; His Contribution to Muslim Educational Reformand Indonesian Nationalism During The Twentieth Century.*Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.

Zuhri, Saifuddin. *Guruku Orang-Orag Dari Pesantren* Yogyakarta : LkiS, 2001

CURICULUM VITAE

MOCH. CHOIRUL ARIF- Dilahirkan di kota Pahlawan Surabaya pada 17 Oktober 1971. Pendidikannya diawali pada PP. Hasyimiyah Surabaya dan MINU Tanwirul Wathon Surabaya, Kemudian di SMP Negeri 4 Surabaya, dan SMA Negeri 6 Surabaya jurusan A2 (Biologi). Istirahat satu tahun untuk memperdalam kemampuan computer di LPKT Surabaya, setelah itu melanjutkan ke Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Penerangan dan Penyiaran Islam (PPAI). Semasa mahasiswa sempat menjadi Dewan Redaksi Majalah Mahasiswa "ARA AITA" (1993-1995) dan Ketua BIdang I (Keilmuan) pada Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel (1994-1995). Di organisasi ekstra kampus mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Rayon Dakwah PMII IAIN Sunan Ampel Surabaya (1993-1994). Aktif juga di kelompok studi "Dakwana" dan "Tanpa Nama" serta LSM Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD). Sebuah kelompok kajian yang mencoba mendekonstruksi pemikiran dakwah dan social. Tahun 1996 menjadi dosen tetap di Fakultas Dakwah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tebuireng. Tahun 1997-1998 kembali ke almamaternya Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk mengabdi sebagai tenaga edukatif di bidang ilmu Komunikasi. Setahun kemudian melanjutkan studi Filsafat Islam pada pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Di tahun inilah penulis merintis dan menerbitkan Jurnal Ilmu Dakwah (1999-2002) serta duduk sebagai dewan redaksi, kemudian redaktur majalah SOPHIA IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Tahun 2003 penulis terlibat dalam deklarasi berdirinya APDII (*Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia*) di Bandung. Tahun 2004 terlibat dalam pendirian Forum Dosen Komunikasi Jawa Timur. Ketika penulis dipercaya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel (2001-2006) bersama teman sejawat mendirikan DAKWAH TELEVISI (DTv) yang menjadi *icon* IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Tahun 2003 mengikuti TOTF Pemberdayaan Masyarakat di Bandung. Dua tahun kemudian (2005) mendirikan Pusat Studi Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PSP2M) dan duduk sebagai Wakil Sekretaris. Di sinilah awal karir penulis menjadi *trainer Community Development*, yang mengantarkan penulis semakin dekat kepada masyarakat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB dan Papua dalam bingkai kegiatan *mapping social* dan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Saat ini penulis sedang menyelesaikan program doctor (S3) Kajian Budaya dan Media di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Beberapa karya tulis telah dihasilkan antara lain : Ilmu komunikasi (2001), Manajemen Pesantren (2005), Panduan Pemetaan Sosial (2006), Panduan Pemberdayaan Masyarakat (2006), Dasar Jurnalistik (2010), Peningktan Peran Serta Masyarakat dan Sektor (2010), serta beberapa penelitian yang dibiayai proyek Kementerian Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

Almaghfurlah

Kyai ABDUL WAHID HASYIM Jombang

(1 Juni 1914 – 19 April 1953 M)

Pahlawan Nasional; Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur; Ketua Umum Tanfidziyah Ke-5 Pengurus Besar Jam'iyyah Nahdlotul 'Ulama; Menteri Agama Republik Indonesia Ke-1 (1945) & Ke-7 (1950–1951)

[digital painting by @FihrilKamal, 2021-05-14]